



RENCANA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

1. Kondisi umum.

Tahun 2025 merupakan awal dari tahapan pertama Grand Strategi Polri Tahun 2025-2045 dan Rencana Strategis Polda Sultra Tahun 2025-2029 yaitu tahapan yang ditandai dengan Rasionalisasi Organisasi, Modernisasi teknologi terkini serta meningkatkan instrumen baik sistem, metode, platform, senjata, performa ataupun data center dalam menjalankan tugas operasional sesuai fungsi Polri. Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini merupakan transisi dari Rencana Strategis Polda Sultra Tahun 2020-2024 serta disusun masih memperhatikan RPJMD Tahun 2020-2024 khususnya di bidang pelayanan publik, Harkamtibmas dan penegakan hukum.

Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polda Sultra dan jajaran dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana siber, Narkoba, korupsi maupun kejahatan transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif, baik dari pemerintah ataupun masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah. Keberhasilan yang dicapai Polri tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh Polda Sultra dan jajaran dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai *stakeholders* yang terkait dengan tugas Kepolisian. Apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polda Sultra dan jajaran oleh pemerintah/swasta/ masyarakat, akan dijadikan tantangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja guna mencapai keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.

Lingkungan strategis semakin dinamis dan kompleks, dimana dunia menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi sosial budaya masyarakat dan berpotensi dapat mempengaruhi perilaku positif/negatif seperti eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme.

2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis seperti demokratisasi, paham radikalisme, intoleransi, HAM, lingkungan hidup serta faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang dinamis akan dijadikan pertimbangan dan bahan masukan dalam penyusunan rencana kerja Polda Sultra Tahun Anggaran 2025. Kondisi internal dan eksternal Polda Sultra yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan Daerah.

1) Geografi.

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak dibagian selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 02°45'-06°15' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 120°45'-124°30' Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Tenggara sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi NTT di Laut Flores, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku di Laut Banda, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone.

Provinsi Sulawesi Tenggara mencakup daratan (jazirah) Pulau Sulawesi dan kepulauan yang memiliki wilayah daratan seluas 38.067,7 Km² atau 3.067.700 Ha dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas 110.000 Km² atau 11.000.000 Ha. Dengan dimekarkannya beberapa daerah wilayah Sultra pada tahun 2014, wilayah administratif Sultra saat ini menjadi 17 wilayah Kab/Kota dengan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO.	KAB/KOTA	LUAS WILAYAH (KM ²)	%
1.	Kota Kendari	265,79	0,74
2.	Kota Baubau	294,14	0,81
3.	Kab. Kolaka	2.958,92	8,18
4.	Kab. Muna	1.858,10	5,14
5.	Kab. Konawe	5.351,85	14,80
6.	Kab. Buton	1.669,33	4,62
7.	Kab. Bombana	3.293,97	9,11
8.	Kab. Konawe Selatan	4.237,74	11,72
9.	Kab. Kolaka utara	2.932,25	8,11
10.	Kab. Wakatobi	450,46	1,25
11.	Kab. Buton Utara	1.755,83	4,86
12.	Kab. Konawe Utara	4.219,81	11,67
13.	Kab. Kolaka Timur	3.992,53	11,04
14.	Kab. Konawe Kepulauan	705,71	1,95
15.	Kab. Muna Barat	818,70	2,26
16.	Kab. Buton Tengah	836,96	2,31
17.	Kab. Buton Selatan	517,63	1,43
Jumlah		36.159,71	100,00

Selain

3 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

Selain jazirah tenggara Pulau Sulawesi yang menjadi daratan terluas Provinsi Sulawesi Tenggara, di provinsi ini juga terdapat pulau-pulau yang tersebar di masing-masing Kab/Kota antara lain:

- a) pulau yang terdapat di Kota Kendari yaitu Pulau Bungkutoko;
- b) pulau yang terdapat di Kab. Konawe yaitu Pulau Wawonii, Pulau Karama, Pulau Bokori, Pulau Saponda laut, Pulau Campada, Pulau Labengki, Pulau Bawulu, Pulau Saponda Darat dan Pulau Hari;
- c) pulau yang terdapat di Kab. Kolaka yaitu Pulau Padamarang, Pulau Lambasina Kecil, Pulau Buaya, Pulau Pisang, Pulau Lambasina Besar, Pulau Maniang dan Pulau Lemo;
- d) pulau yang terdapat di Kab. Muna yaitu Pulau Muna, Pulau Toba Kecil, Pulau Koholifano, Pulau Toba Besar, Pulau Wataitona, Pulau Bakealu, Pulau Tiworo (Pulau Maginti, Pulau Balu, Pulau Katela, Pulau Mandi, Pulau Bero, Pulau Rangko, Pulau Maloang, Pulau Sola, Pulau Tobuan, Pulau Kayuangan);
- e) pulau yang terdapat di Kota Baubau yaitu Pulau Makassar;
- f) pulau yang terdapat di Kab. Buton yaitu Pulau Buton, Pulau Talaga Besar, Pulau Talaga Kecil, Pulau Sanciri, Pulau Domalawa, Pulau Tambake, Pulau Liwuto, Pulau Kadatua, Pulau Batu atas, Pulau Siompu, Pulau Kanota dan Pulau Lanone;
- g) Kab. Konawe Selatan dan Kab. Kolaka Utara tidak terdapat gugusan pulau;
- h) pulau yang terdapat di Kab. Bombana yaitu Pulau Sagori, Pulau Mutaha, Pulau Kambing, Pulau Kabaena dan Pulau Masaloka;
- i) pulau yang terdapat di Kab. Wakatobi yaitu Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko, Kapota, Runduma, Hoga, Onemobaa, Sempora dan Sawa.

Kondisi topografi tanah di Sulawesi Tenggara umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit, terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah digunakan untuk usaha mencapai luas 1.868.860 Ha. Tanah ini sebagian besar berada pada ketinggian 100 s/d 500 meter di atas permukaan laut dan kemiringan tanahnya 40o.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai yang tersebar di empat kabupaten. Sungai-sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi untuk kebutuhan industri besar maupun industri kecil/rumah tangga serta untuk irigasi. Sungai besar seperti Sungai Konawehe yang terletak di Kab. Konawe dengan debit air 200 M3/detik dan berdiri sebuah bendungan Wawotobi yang mampu mengairi persawahan di Kabupaten Konawe seluas 18.000 Ha. Selain itu masih banyak sungai-sungai di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tekanan airnya berpotensi untuk pembangunan dan pengembangan irigasi seperti Sungai Lasolo di Kab. Konawe, Sungai Soraya dan Sungai Sampolawa Kab. Buton, Sungai Wandasa dan Sungai Kabangka Balano di Kab. Muna serta Sungai Laeya di Kab. Kolaka.

Provinsi

4 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

Provinsi Sulawesi Tenggara dari sudut oceanografi memiliki perairan (laut) yang sangat luas. Luas perairan Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan mencapai 110.000 Km² atau 11.000.000 Ha. Perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping memiliki bermacam-macam hasil ikan, juga memiliki panorama laut yang sangat indah. Beberapa jenis ikan hasil perairan laut Sulawesi Tenggara yang banyak ditangkap oleh nelayan di daerah ini adalah Cakalang, Teri, Layang, Kembung, Udang dan masih banyak lagi jenis ikan yang lain. Disamping ikan, juga terdapat hasil laut lainnya seperti Teripang, Agar-Agar, Japing-Japing, Lola, Mutiara dan sebagainya.

2) Demografi.

Dengan luas wilayah 36.159,71 KM², secara rata-rata setiap KM² wilayah Sulawesi Tenggara ditinggali sekitar 76 orang penduduk. Seiring dengan persebaran penduduk tiap kabupaten/kota, Kota Kendari dengan persentase penduduk sebesar 13,25 persen memiliki tingkat kepadatan tertinggi mencapai 1.370 jiwa/km². Sementara tingkat kepadatan terendah di Kabupaten Konawe Utara sebesar 17-18 jiwa/KM² dengan persentase penduduk sebesar 2,63 persen.

NO	KAB/KOTA	JUMLAH		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kota Kendari	186.117	184.643	370.760
2	Kota Baubau	80.121	81.159	161.280
3	Kab. Kolaka	125.540	120.394	245.934
4	Kab. Muna	112.624	116.015	228.639
5	Kab. Konawe	136.776	125.663	262.439
6	Kab. Buton	60.739	59.490	120.229
7	Kab. Bombana	82.602	80.800	163.402
8	Kab. Konawe Selatan	165.487	157.459	322.946
9	Kab. Kolaka Utara	71.995	68.493	140.488
10	Kab. Wakatobi	58.452	57.995	116.447
11	Kab. Buton Utara	35.173	33.781	68.954
12	Kab. Konawe Utara	38.363	36.109	74.472
13	Kab. Kolaka Timur	65.337	61.417	126.754
14	Kab. Konawe Kepulauan	21.010	20.510	41.520
15	Kab. Muna Barat	42.242	43.464	85.706
16	Kab. Buton Tengah	59.921	59.540	119.461
17	Kab. Buton Selatan	50.375	49.204	99.579
	Jumlah	1.384.496	1.347.758	2.749.010

(Sumber data : BPS Sulawesi Tenggara Dalam Angka tahun 2024)

Piramida penduduk Sulawesi Tenggara sampai tahun 2023 masih bertipe ekspansif, dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Hal ini mengindikasikan angka kelahiran yang cukup tinggi dan ditunjukkan oleh lebarnya dasar piramida. Di sisi lain, angka kematian juga terlihat masih tinggi, ditunjukkan oleh kecil/sempitnya puncak piramida. Dengan angka kelahiran masih cukup tinggi, trennya menunjukkan peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif meningkat. Namun tetap terjadi pergeseran distribusi penduduk menurut umur yaitu penduduk usia produktif (15-64 tahun) tumbuh lebih tinggi dibanding penduduk usia muda (0-14 tahun) sehingga penduduk usia produktif tersebut (15-64 tahun) mejadi dominan. Perubahan ini merupakan proses transisi demografi yang berlangsung beberapa dekade dan berkelanjutan.

Seiring dengan terjadinya pergeseran distribusi penduduk menurut umur, diikuti pula dengan berkurangnya beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif atau rasio ketergantungan. Rasio ini menggambarkan berapa persen penduduk yang dianggap mempunyai aktivitas konsumtif harus ditanggung oleh penduduk usia 15-64 tahun, yang dianggap sebagai penduduk yang (secara potensial) produktif. Pada tahun 2023, penduduk usia produktif (15-64 tahun) tercatat sebanyak 1.844.380 jiwa. Sedang penduduk usia tidak produktif, yaitu mereka yang masih sangat muda (0-14 tahun) sebanyak 763.620 jiwa dan yang sudah sangat tua (65+ tahun) sebanyak 140.010 jiwa. Dengan demikian, rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 32,90 %. Ini artinya bahwa untuk setiap 100 orang penduduk usia produktif di Sulawesi Tenggara harus menanggung biaya hidup sekitar 32-33 orang lain, yaitu mereka yang tergolong sebagai penduduk usia tidak produktif.

3) Sumber Daya Alam.

a) tanaman pangan

Tanaman pangan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara didominasi oleh tiga jenis tanaman utama yaitu; padi, jagung, dan kedelai. Dari tiga jenis tanaman pangan tersebut, padi mendominasi produksi tanaman pangan di Sulawesi Tenggara. Sentra produksi padi berada di Kabupaten Konawe, dengan total produksi mencapai 151.675,85 ton di tahun 2023 atau 31,44 persen dari total produksi Sulawesi Tenggara.

b) hortikultura

Ragam produksi tanaman hortikultura di Sulawesi Tenggara cukup bervariasi. Untuk tanaman sayuran, terdapat bawang daun, bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, kubis, petsai/sawi, terung, tomat, dan lainnya. Terung, cabai rawit dan tomat menghasilkan produksi yang dominan untuk tanaman sayuran di Sulawesi Tenggara.

Untuk tanaman buah-buahan, pisang, mangga, dan rambutan menjadi tanaman yang banyak dihasilkan, selain tanaman buah buahan lainnya. Produksi ketiga tanaman buah- buahan tersebut masing-masing 411.356 kuintal, 266.898 kuintal, dan 254.993 kuintal.

Untuk

Untuk tanaman biofarmaka, Jeruk Nipis serai, dan jahe menghasilkan produksi yang dominan untuk tanaman biofarmaka di Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk tanaman hias, heliconia (Pisang-Pisangan), aglonema, dan sedap malam menjadi tanaman hias yang banyak dihasilkan di Sulawesi Tenggara.

c) perkebunan

Kakao menjadi komoditi perkebunan yang dominan dihasilkan di Sulawesi Tenggara. Tahun 2023 produksi kakao sebesar 103.205,91 ton, dari luas tanam 220.103,69 hektar. Selain kakao, terdapat tanaman kelapa dan jambu mete yang produksinya juga tergolong besar, masing-masing sebesar 42.320,52 ton dan 51.453,21 ton tahun 2023.

d) kehutanan

Luas kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Tenggara tahun 2023 sebesar 3.714.214,18 hektar. Dari kawasan hutan tersebut, tercatat produksi kayu bulat Tahun 2023 sebanyak 64.963,56 m³.

e) peternakan

Produksi daging dari hewan ternak di Sulawesi Tenggara tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Kenaikan produksi daging tersebut, termasuk produksi kenaikan untuk daging sapi potong, yaitu dari 4.983.394,10 kg menjadi 5.213.813,55 Kg.

f) perikanan

Produksi perikanan budidaya di Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 didominasi oleh budidaya rumput laut, dengan produksi sebesar 313.145 ton dan nilai sebesar 1.297.505.000 (000 rupiah). Produksi tersebut paling banyak di supply oleh kabupaten Muna sebanyak 89.589 ton dengan nilai 390.102.000 (000 rupiah).

g) pertambangan

Sumber daya alam yang sangat potensial terdapat di beberapa wilayah Provinsi Sultra antara lain:

- (1) Aspal terdapat di Kabupaten Buton dengan jumlah cadangan potensi/deposit mencapai 3,8 miliar ton;
- (2) Marmer, lokasi penyebarannya di Kab. Buton, Kab. Muna dan Kab. Kolaka dengan luas areal seluruhnya 189.082 ha dengan jumlah potensi/deposit mencapai 206.237.000.000 m³;
- (3) Nikel tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Bombana dan Baubau dengan luas lahan 480.032 ha depositnya diperkirakan mencapai 97,40 miliar ton;
- (4) Emas sumber emas ditemukan pada pertengahan tahun 2008 yaitu di Kabupaten Bombana jumlahnya diperkirakan mencapai 1,1 juta ton dengan luas lahan 205.400 ha.

4) Ideologi

Pada umumnya masyarakat Propinsi Sulawesi Tenggara masih menganggap Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. Kondisi ideologi masih dihadapkan pada belum diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara secara utuh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi, memunculkan keinginan kelompok masyarakat tertentu berupaya merubah Pancasila dengan ideologi lain yang berorientasi kepada agama, paham liberal dan paham sosialis/komunis. Di Wilayah Sultra terdapat kelompok/ aliran kepercayaan yang berpotensi menjadi kelompok radikal yaitu:

- a) kelompok Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dipimpin oleh Muslimin, SE., M.Si alamat Jl. MT. Haryono No. 98 Kel. Lalolara Kec. Kambi Kota Kendari dan Ibnu Abidin Razak, S.Pd alamat di Jl. Sao-sao Wua-Wua Kota Kendari. Ormas tersebut sering melakukan kegiatan dakwah berupa penegakan sariat Islam (Daulah Khilafah) dan sering melakukan aksi unras menentang masalah kapitalisme dan neoliberalisme;
- b) kelompok Syiah Sultra alamat Lorong Mata Air III Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari dipimpin oleh La ode Jumadil, M.si. Keberadaan kaum Syiah senantiasa memunculkan konflik melalui doktrinnya yang dianggap sesat antara lain keyakinan yang keji terhadap para sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, merusak tatanan hidup bermasyarakat dan berkeluarga melalui ajaran nikah mut'ah. Ajaran boleh berdusta melalui ajaran taqiyyah. Berkaca dari sejarah dunia, apabila kaum Syiah telah memiliki kekuatan maka tak segan melakukan perebutan kekuasaan seperti yang terjadi pada revolusi Iran 1979, konflik Suriah dan pemberontakan kaum Houthi di Yaman;
- c) kelompok Khilafatul Muslimin sebagai berikut :
 - (1) kelompok Khilafatul Muslimin di Kab. Buton Tengan yang dipimpin oleh La Ode Karimudin Alamat Lingkungan Gu Barat Kel. Lakudo Kec. Lakudo Kab. Buton Tengan;
 - (2) kelompok Khilafatul Muslimin di Kab. Kolaka yang dipimpin oleh Ustadz. Ahmad Akbar Alias Abu Ali Alamat Kel. Kowioha Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
 - (3) kelompok Khilafatul Muslimin di Kab. Wakatobi yang dipimpin oleh La Buka Alamat Lingkungan bante Kel. Waha Kec. Tomia Kab. Wakatobi.

5) Politik

a) penyelenggaraan Pilkada tahun 2024

Secara umum pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, mulai dari tahapan persiapan, tahapan Kampanye, pemungutan suara tanggal 14 Februari 20124 pada 4.588 TPS sampai dengan selesainya pelaksanaan pleno rekapitulasi dan perhitungan suara tingkat KPU Prov. Sultra berlangsung dalam keadaan aman, damai dan lancar. Peristiwa menonjol yang terjadi antara lain adanya kegiatan rekomendasi dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) di 28 (dua puluh delapan) TPS dan pemungutan suara lanjutan pada 2 (TPS), dari rekomendasi tersebut sebanyak 3 (tiga) TPS yaitu TPS 01 Desa Wacuala Kec. Batutas Kab. Buton Selatan, TPS 01 Desa Langkomu Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah dan TPS 06 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari, tidak dilaksanakan PSU karena rekomendasi diberikan menjelang batas waktu 10 hari usai pemungutan suara, sementara proses penyiapan logistik Pilkada membutuhkan waktu yang cukup. Adapun hasil perolehan suara Pemilu 2024 di Wilayah Sultra. Hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 untuk pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 1.113.334 suara atau 71,11 %, unggul diseluruh kabupaten/kota wilayah Sultra. Berikut perolehan suara masing-masing calon Presiden/Wakil Presiden berdasarkan hasil Pleno Tingkat KPU Prov. Sultra sebagai berikut:

NO	KAB / KOTA	JUMLAH DPT	SUARA PASLON		
			PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
1	KENDARI	238.510	58.226	130.738	11.553
2	BAUBAU	110.086	21.397	60.788	5.286
3	KOLAKA	170.377	43.122	94.482	6.432
4	KOLAKA TIMUR	90.676	17.001	55.532	4.659
5	KOLAKA UTARA	98.199	29.736	48.968	2.634
6	KONAWE	181.496	24.011	127.900	8.406
7	KONAWE UTARA	53.794	7.783	39.177	1.983
8	KONAWE SELATAN	220.940	30.391	148.821	12.967
9	KONAWE KEPULAUAN	29.374	6.100	19.416	1.005
10	BOMBANA	111.973	27.113	64.564	3.820
11	MUNA	158.177	29.736	89.316	6.141
12	MUNA BARAT	61.021	11.147	37.456	3.033
13	BUTON	79.792	12.568	45.917	5.853
14	BUTON UTARA	49.884	7.521	32.873	3.208
15	BUTON SELATAN	67.095	12.214	33.388	3.807
16	BUTON TENGAH	79.435	13.198	39.930	3.427
17	WAKATOBI	82.831	10.321	44.078	6.513
JUMLAH		1.883.660	361.585	1.113.334	90.727
PERSENTASE			23,09 %	71,11 %	5,79 %

Adapun

Adapun untuk hasil Pemilu Legislatif 2024 di wilayah Sultra sebagai berikut:

NO	PARTAI	DAPIL						TOTAL SUARA	JML KURSI
		SULTRA 1	SULTRA 2	SULTRA 3	SULTRA 4	SULTRA 5	SULTRA 6		
1	PKB	11.545	15.567	36.260	29.966	20.883	10.400	124.621	3
2	GERINDRA	12.941	50.094	20.039	25.726	35.364	13.498	157.662	5
3	PDIP	25.315	25.602	19.353	44.798	39.658	22.699	177.425	6
4	GOLKAR	22.228	47.373	27.010	20.025	22.879	20.546	160.061	6
5	NASDEM	28.024	24.124	34.208	27.664	46.858	18.645	179.523	6
6	BURUH	668	1.352	459	798	794	1.567	5.638	0
7	GELORA	970	2.375	1.034	6.626	1.171	757	12.933	0
8	PKS	12.933	22.569	10.693	18.123	23.845	3.362	107.818	4
9	PKN	187	899	2.547	12.091	833	522	17.079	0
10	HANURA	445	3.410	1.951	23.039	764	1.352	30.961	1
11	GARDA	249	900	126	194	587	156	2.212	0
12	PAN	12.857	16.135	16.401	33.134	13.931	27.178	119.636	3
13	PBB	9.146	21.527	12.773	18.730	27.248	54.633	144.057	4
14	DEMOKRAT	20.073	17.883	12.160	17.385	36.843	20.050	124.394	4
15	PSI	643	659	164	835	146	428	2.875	0
16	PERINDO	493	3.707	6.970	3.564	4.127	9.098	27.959	0
17	PPP	15.349	14.331	8.951	25.304	16.649	15.329	95.931	3
18	PKPI	1.899	566	231	3.156	1.103	258	7.213	0
TOTAL		175.965	269.073	211.330	311.158	293.683	220.478	1.353.9	45

b) penyelenggaraan Pemilu 2024

- (1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Berdasarkan PKPU tersebut, pelaksanaan tahapan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024;
- (2) menjelang Pemilu 2024, di wilayah Sultra telah beberapa kali dilaksanakan kegiatan deklarasi dukungan terhadap Capres oleh organisasi atau komunitas, beberapa relawan yang telah terbentuk antara lain Pospera Sultra (Komunitas Sekawan, Komunitas Alitopan, Perkumpulan Pemulung Kendari, Persatuan Becak Kendari, Forum Penjual Bensin Kendari, dan Perkumpulan Petani Merah Putih), Relawan Garuda Pancasila (RGP), Sahabat Ganjar Sultra, Desa untuk Ganjar, Jembatan Nasional Indonesia Baru, Jaringan Relawan Nasional (Jarnas) Haluoleo Anies Baswedan Sultra, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies) Sultra, Konsorsium Masyarakat Sultra Untuk Anies, Relawan Mileanies Anies Baswedan, Pemanis Gaul Sultra, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) Sultra, Relawan Prabowo (Repro) Sultra, Pro Jokowi Sultra, Rumah Juang Puan Maharani, Relawan Kerja (Raket) Merdeka Untuk Erick Thohir 2024, Kawan Gibran Sultra.

(3) saat

- (3) saat ini Bawaslu Prov. Kab/Kota melaksanakan tahapan pengawasan dan menerima masa sanggah Caleg TMS pasca penetapan DCT oleh KPU. Selain itu Bawaslu Kab/kota melaksanakan kegiatan penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK). Adapun jenis APK yang di tertibkan yakni APS yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditertibkan yaitu memuat unsur kampanye seperti ada kata ajakan, unsur citra diri berupa lambang dan nomor urut partai. kegiatan tersebut juga dilaksanakan dengan cara humanis dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat serta rapat mediasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas keputusan KPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD kabupaten /kota.
- (4) beberapa permasalahan menonjol jelang Pemilu 2024:
- (a) Minggu, 2 April 2023 Dugaan pengrusakan baliho milik Caleg DPR RI Partai PAN an. Fachry Pahlevi Konggoasa di papan reklame milik Pemda Konawe oleh sdr. Rusdianto, Se, MM (Wakil Ketua 2 DPRD Kab. Konawe Fraksi PDIP). saat ini kasusnya sedang dalam penanganan Polres Konawe;
 - (b) Selasa, 5 September 2023 Pembakaran baliho PDIP berukuran 2,5 X 4 meter bergambar Presiden Joko Widodo, Ketua DPP PDIP Megawati, Bacapres Ganjar Pranowo dan Ketua DPC PDIP Buton Tengah Samahuddin, yang terpasang di simpang pelabuhan dan pasar Desa Lanto Kec Mawasangka Tengah Kab Buton Tengah. Pelaku sebanyak 3 orang dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras. 2 (dua) pelaku telah di proses di Wilkum Polres Buton Tengah dan 1 (satu) pelaku lainnya merupakan pers Polres Buton Tengah dan telah menjalani penempatan khusus di Propam Polda Sultra selanjutnya penanganan lanjutan dikembalikan ke Propam Polres Buton tengah guna menunggu sidang kode etik;
 - (c) Kamis, 21 September 2023 Bawaslu Kab. Konawe meminta keterangan Lurah Konawe Kec. Konawe An. Mahmuddin terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN karena diketahui memiliki kartu tanda anggota Partai Gerindra dan terdaftar sebagai Bacaleg Dapil II Konawe No. urut 5 Bawaslu telah menyurat ke Bupati, Badan Kepegawaian Negara, dan Mendagri tentang kode etik dan netralitas ASN. Yang bersangkutan telah membuat surat pengunduran diri sebagai Bacaleg namun proses Gakkum tetap ditindaklanjuti Bawaslu Konawe;
 - (d) Selasa

11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

- (d) Selasa, 17 Oktober 2023 Staf pelaksana Panwaslu Tomia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan saat membawa surat klarifikasi ke sdr. Achri, SPD (Guru SMP Satap Tanawali Kec. Tomia Kab. Wakatobi) terkait tindakannya yang memberi like di platform medsos FB pada postingan foto seorang Bacaleg an. Ansar dari Partai Nasdem.

c) Akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2024

Masa jabatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Ali Mazi, SH - DR. Lukman Abunawas telah berakhir pada tanggal 5 September 2023. Pada tanggal 5 September 2023 bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Mendagri Tito Karnavian melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Keputusan Presiden nomor 74/P/2023 tentang pengangkatan Pj Gubernur. Adapun beberapa kepala daerah hasil Pilkada 2018 yang masa jabatannya berakhir ditahun 2023 dan awal 2024 adalah Kota Baubau dan Kab Konawe tanggal 24 September 2023 dan Kab Kolaka tanggal 15 Januari 2024.

Pilkada serentak yang akan digelar pada bulan November tahun 2024, memberikan konsekuensi pada terjadinya kekosongan jabatan beberapa kepala daerah sehingga akan diisi oleh pejabat kepala daerah. Sesuai amanat Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Pj Gubernur akan diajukan Kemendagri lalu dipilih langsung Presiden. Sementara untuk Pj Bupati dan Wali Kota diajukan Gubernur dan dipilih oleh Kemendagri. Jabatan kepala daerah akan diisi para penjabat dari jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat untuk Gubernur dan pemerintah provinsi untuk bupati/wali kota yang memenuhi syarat. Adanya kekhawatiran dari sejumlah pihak terkait penunjukan Pejabat Kepala Daerah akan sarat dengan kepentingan tertentu untuk pemenangan Pemilu 2024.

d) Pilkada serentak 2024

Pilkada serentak akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Ketentuan mengenai Pilkada serentak 2024 diatur dalam Pasal 201 Ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016. Jelang Pilkada serentak tahun 2024, dinamika politik di daerah sudah cenderung mengalami peningkatan yang ditandai dengan pemasangan baliho, sosialisasi kepada masyarakat, giat baksos untuk dapatkan simpati masyarakat serta survei / poling popularitas melalui media oleh tokoh / figur serta saling mengkritik lawan / rival politik melalui media social dan manstream.

Adanya beberapa lembaga survei yang melakukan survei terkait elektabilitas tokoh yang disebut-sebut menjadi calon Gubernur Sultra tahun 2024. Beberapa lembaga survei tersebut antara lain Charta Politika Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Lembaga Script Survei Indonesia (SSI), Media Survei Indonesia (MSI), The Haluoleo Institute. Beberapa nama tokoh yang berpotensi menjadi calon Gubernur Sultra antara lain Kery Saiful Konggoasa, Andi Sumangerukka, Lukman Abunawas, Laode Ida, Rusda Mahmud, Ridwan Bae, Tina Nur Alam, Samsu Umar Abdul Samiun, Ruksamin dan Abdurrahman Saleh.

e) pemekaran wilayah

Pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru masih belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilain pihak otonomi daerah sering dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk mencari dukungan bagi-bagi proyek dan jabatan di lingkup birokrasi. Meskipun belum masuk pembahasan dalam program legislatif nasional (Prolegnas) namun wacana pemekaran beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih diupayakan. Terdapat 5 (lima) wilayah usulan pembentukan daerah otonom baru yaitu:

- (1) Provinsi Kepulauan Buton (Kota Baubau, Kab. Buton, Kab. Wakatobi, Kab. Buton Utara, Kab. Buton Selatan dan Kab. Buton Tengah);
- (2) Kab. Kabaena (Kec. Kabaena, Kabaena Tengah, Kabaena Timur, Kabaena Barat, Kabaena Selatan dan Kabaena Utara);
- (3) Kab. Muna Timur (Kec. Maligano, Batukara, Wakorumba Selatan, Pasikolaga dan Pasir Putih);
- (4) Kab. Konawe Timur (Kec. Landono, Mowila, Ranomeeto Barat, Ranomeeto, Konda, Wolasi, Moramo Utara, Moramo, Kolono dan Laonti);
- (5) Kab. Pakue (Kec. Pakue, Pakue Utara, Pakue tengah, Batu Putih, Porehu dan Tolala).

Beberapa masalah dalam upaya percepatan pembangunan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai berikut:

- (1) terbatasnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan profesional;
- (2) keterbatasan anggaran;
- (3) perencanaan yang tidak maksimal sehingga berdampak pada timbulnya permasalahan baru;
- (4) belum tersusunnya kelembagaan yang efektif;
- (5) belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas;
- (6) kurangnya kreatifitas dan kreasi masyarakat secara kritis dan rasional;

(7) belum

- (7) belum jelasnya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berakibat pada tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah;
- (8) masih rendahnya kerjasama antara daerah dalam penyediaan pelayanan publik;
- (9) meningkatnya keinginan untuk membentuk daerah otonom baru yang belum tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (10) timbulnya konflik tapal batas dan perebutan aset daerah.

f) kebebasan pers.

Kebebasan pers tumbuh dan berkembang dalam kehidupan demokrasi, saat ini belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik, sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat pemberitaan, Media massa masih mengutamakan kepentingan keuntungan bisnis dibandingkan resiko sosial politik yang ditimbulkan.

g) permasalahan tapal batas

- (1) persoalan Tapal Batas antara Desa Waara dan Desa One Waara. Pada bulan Oktober 2023 masyarakat Desa One Waara berjumlah sekitar 30 orang mendatangi lokasi pekerjaan pondasi pagar Jalan Desa Waara dengan maksud agar pekerjaan tersebut dihentikan karena diklaim sudah masuk di wilayah desa One Waara sehingga terjadi gesekan perdebatan antara masyarakat kedua Desa tersebut;
- (2) antara Desa Tanjung Kec. Tongkuno Kab. Muna dengan Kel. Watulea Kec. Gu Kab. Buton. Masyarakat Desa Tanjung Kec. Tongkuno Kab. Muna merasa tidak puas atas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemda Muna dan ingin memisahkan diri dari Kab. Muna dan bergabung dengan Kel. Watulea Kec. Gu Kab. Buton;
- (3) antara desa Tabeku Kec Basala Kab Konawe Selatan dengan Desa Lani Jaya Kec Ladongi Kab Kolaka Timur yang memicu perseteruan masyarakat yang tinggal diperbatasan dikarenakan permasalahan lokasi persawahan;
- (4) antara Desa Wakaokili Kec. Pasarwajo Kab. Buton berbatasan dengan Desa Gondalama Kec. Sorawolio Kota Baubau;
- (5) batas antara Kec Betoambari Kota Bau Bau dengan Kel Lawela Kec Batauga Kab Buton. Pemerintah Kota Bau Bau dan Pemkab Buton saling klaim tapal batas KM 12 Jl. Poros Betoambari.

6) Sosial Ekonomi.

Perkembangan sektor perekonomian Provinsi Sultra yang saat ini sangat bergantung dari sektor pertambangan, perkebunan, perikanan/kelautan, pertanian, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemasukan daerah khususnya dari sektor pertambangan terutama nikel maupun emas, yang sudah dikelola secara industrial yaitu di Kab. Konawe, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Selatan dan Kab. Bombana.

a) pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi yang cukup konsisten. Terjadi peningkatan pertumbuhan 6,42 persen tahun 2018 menjadi 6,50 persen tahun 2019. Namun selanjutnya mengalami kontraksi -0,65 persen pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 pertumbuhan kembali meningkat 5,53 persen dan 5,35 persen di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 dicapai oleh kategori Industri Pengolahan sebesar 12,81 persen. Pertumbuhan terendah kategori Konstruksi sebesar 0,05 persen.

Faktor yang berperan penting pada pertumbuhan adalah perbaikan aktivitas masyarakat dan dunia usaha merespons momentum pemulihan yang masih berlangsung, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Industri berskala besar yang dimulai pada tahun 2023. Namun demikian diperkirakan tumbuh melambat disebabkan oleh menurunnya permintaan mitra dagang yang secara keseluruhan tahun diproyeksikan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 khususnya pada industri pengolahan. Tekanan inflasi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 diperkirakan menurun dari tahun sebelumnya sehingga berada di rentang sasaran inflasi nasional yaitu sebesar 3,0% + 1%.

Perkembangan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di wilayah Sulawesi Tenggara.

b) ekspor dan impor

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat, Nilai ekspor Sultra pada Mei 2023 mencapai US\$298,24 juta atau naik 62,69 persen dibanding ekspor April 2023 yang tercatat US\$183,32 juta. Sementara, volume ekspor Mei 2023 tercatat 167,21 ribu ton atau naik 76,77 persen dibanding volume ekspor April 2023 yang tercatat 94,60 ribu ton. Statistisi Ahli Madya BPS Sultra Muhammad Amin menjelaskan, Peningkatan terbesar Ekspor Sulawesi Tenggara

Mei 2023 terjadi pada komoditas Besi dan baja senilai US\$115,03 juta (naik 64,00 persen) dimana pada bulan April sebesar US\$179,75 juta naik menjadi US\$294,77 juta di bulan Mei. Menurut Sektor, Ekspor Sulawesi Tenggara Mei 2023 didominasi oleh sektor industry pengolahan sebesar US\$297,64 juta (99,80 persen). Adapun Ekspor Sulawesi Tenggara Mei 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US\$288,78 juta, disusul India senilai US\$4,07 juta, dan Amerika Serikat senilai US\$2,27 juta. Komoditi yang selama ini menjadi andalan Sulawesi Tenggara antara lain besi dan baja serta bermacam hasil laut, sedangkan negara tujuan ekspor tersebar di benua Asia hingga Amerika.

Selain melakukan ekspor, Sultra juga melakukan Impor selama Mei 2023. Untuk Nilai impor Sulawesi Tenggara Mei 2023 mencapai US\$151,05 juta, naik 16,17 % dibandingkan April 2023 atau turun 27,62 % dibandingkan Mei 2022. Volume impor Mei 2023 senilai 392,90 ribu ton, naik 51,30 persen dibandingkan April 2023 atau naik 24,15 persen dibandingkan Mei 2022. Peningkatan impor golongan barang terbesar Mei 2023 dibandingkan April 2023 adalah Garam, Belerang, Kapur senilai US\$3,94 juta (naik 152,77 persen). Tiga negara pemasok barang impor terbesar selama Mei 2023 adalah Tiongkok senilai US\$64,15 juta (turun 7,12 persen), Singapura senilai US\$39,74 juta.

Menurut golongan penggunaan barang, impor Mei 2023 dibanding bulan sebelumnya mengalami peningkatan 16,17 persen yakni nilai bahan baku/penolong mengalami peningkatan sebesar US\$8,14 juta atau naik 6,44 persen dan barang modal sebesar 367,87 persen atau naik senilai US\$13,06 juta. Di sisi lain golongan barang konsumsi turun 84,19 persen atau turun senilai US\$ 0,17.

c) **pertambangan**

Sultra dengan sumber daya alamnya yang melimpah untuk penghidupan masyarakat, juga dapat menjadi peluang investasi di berbagai sektor, Berbagai komoditas dari sektor pertambangan tersebar di seluruh kabupaten di Sulawesi Tenggara, baik yang telah dieksplorasi secara penuh maupun yang belum dimanfaatkan, Pulau Buton adalah wilayah yang paling terkenal sebagai penghasil aspal terbesar di Sulawesi Tenggara, Diperkirakan 3,8 miliar ton timbunan aspal curah berada di Kabupaten Buton dan Buton Utara.

Sultra juga memiliki pasokan bijih nikel yang sangat besar, sekitar 97,4 miliar ton, yang tersebar di Kab, Kolot, Kolaka, Konsele, Konawe, dan Bombana (Pulau Kabaena), Beberapa kegunaan bijih nikel antara lain sebagai bahan pembuatan koin, rangka otomotif, dan baterai isi ulang untuk kendaraan bermotor listrik (KBL), Selain nikel, Sultra diperkirakan memiliki 1,125 juta ton emas yang saat ini sedang dieksplorasi para peneliti di sekitar Kabupaten Bombana dan sekitarnya.

Komoditas potensial lainnya antara lain pasir kuarsa (lima miliar ton), marmer (206 miliar meter kubik), tanah liat (884 miliar meter kubik), oniks (547 ribu meter kubik), kapur (1,6 triliun meter kubik), mangan (enam ribu hektar), pasir besi, fosfat, kromit, dan magnesit.

- (1) tanggal 18 Agustus 2022, pemerintah meirilis 13 proyek baru berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), sebanyak 3 proyek berada di Sultra yakni:

(a) kawasan Industri Kendari

Berlokasi di Kec, Abeli dan Kec, Nambo luas mencapai 1,329 ha, Pemkot Kendari bekerja sama PT Kendari Kawasan Industri Terpadu (KKIT), Proyek telah dimulai sejak 2015 dan kini memasuki tahap pembebasan lahan yang ditargetkan rampung tahun 2023, Selanjutnya tahun 2024 fokus operasional proyek;

(b) kawasan Industri Pomala

Industri strategis tersebut adalah smelter nikel berbasis High-Pressure Acid - Leaching (HPAL) milik PT Vale Indonesia yang bekerja sama dengan Zhejiang Huayou Cobalt Company Limited melalui Kolaka Nikel Indonesia atau KNI, Pembangunan diresmikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (27/11/2022), Proyek tersebut bernilai investasi mencapai Rp 67,5 triliun dan ditargetkan rampung / mulai beroperasi pada tahun 2025, Dengan target produksi 120 ribu metrik ton nikel dan sekitar 15 ribu ton kobalt yang terkandung dalam produk MHP (bahan utama baterai mobil listrik);

(c) kawasan Industri Motui

Pada tahap awal, pembangunan smelter di atas lahan seluas 375 ha di Kec, Motui Kab, Konut, Kawasan industri tersebut dikembangkan oleh PT NIS/ Nusantara Industri Sejati, yang sudah mulai dilakukan sejak 19 Mei 2022 (dibuka oleh Wapres RI), Saat ini dalam tahap pembebasan lahan, Kawasan industri tersebut berbasis nikel dan smelter dengan teknologi Rotary Kiln-Electris Furnice (RKEF) itu berkapasitas 500,000 ton ferro nickel (Feni) per tahun dengan kadar nikel 10-12 %, Ferro nickel tersebut dalam bentuk produk turunan seperti Nickel Metal, Ni Powder, Batteries, industri otomotif, alat rumah tangga, dan peralatan kesehatan.

(2) wilayah

17 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

- (2) wilayah Sultra juga terdapat 3 (tiga) proyek strategis nasional pertambangan yang saat ini telah memasuki proses pembangunan (ditetapkan Berdasarkan Perpres No 109 Tahun 2020) yakni :
- (a) kawasan Industri Konawe
- (1)) PT, Virtue Dragon Nickel Industri (Vdni), Di Desa Morosi Kec Morosi Kab Konawe, Memiliki 3 Smelter Pengolahan Feronikel Yg Masing2 Dalam Tiap Smelternya Terdapat 5 Buah Tungku Pengolahan Dan Pemurnian Biji Nikel, Jumlah Karyawan 6,456 Orang, Terdiri Dari 5,746 Tenaga Lokal Dan 710 TKA.
- (2)) PT. Obsidian Stainless Steel (OSS), Di Desa Porara Kec Morosi Kab Konawe, Bidang Produksi Stainless Steel, Memiliki 3 Smelter yang masing-masing Smelternya Terdapat 5 Buah Tungku, Jumlah Karyawan 9.363 Orang, Terdiri Dari 8.859 Tenaga Lokal dan 504 TKA.
- (b) PT, Antam, Tbk UBPN Sultra, di Pomalaa Kab Kolaka, Bidang Produksi Ferronikel, Jumlah Karyawan 3,309 Orang, Terdiri Dari 1,174 Orang Karyawan Tetap Dan 2,135 Tenaga *Outsourcing*.
- (3) pertambangan dan penggalian memiliki peranan penting dalam perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Jenis Bahan Tambang terdapat 213 perusahaan pertambangan yang lokasinya terbagi di 14 Kab/Kota di Prov, Sultra, Jenis bahan tambang yang digali beragam macamnya seperti aspal, nikel, emas, kromit, pasir besi, tembaga, dan mangan.
- (4) dari 213 perusahaan, terdapat 143 perusahaan tambang nikel, 24 tambang aspal, 17 tambang batu gamping/batu kapur, 5 tambang batu andesit, 5 tambang pasir kuarsa, 4 tambang peridotit, 3 tambang emas, 3 tambang sirtu, 3 tambang tanah urug, 2 tambang kromit, serta masing-masing 1 perusahaan tambang batu gunung, batuan, mineral logam dan perusahaan tambang pasir.
- (5) daerah yang memiliki jumlah perusahaan tambang nikel terbanyak yaitu Kabupaten Konawe Utara sebanyak 70 perusahaan, sementara tambang aspal terbanyak berada di Kabupaten Buton yaitu 22 perusahaan, dan perusahaan tambang emas terbanyak berada di Kabupaten Bombana sebanyak 3 Perusahaan.

d) perkebunan

Potensi lahan mempunyai peluang cukup menjanjikan untuk dikembangkan di Sulawesi Tenggara, saat ini telah ada perkebunan yang cukup berkembang, antara lain adalah Kakao, Mete, Cengkeh, Kelapa, Kopi, Lada, Kemiri, Enau, Pinang, Kapuk dan Sagu. Komoditi Kakao dan Mete merupakan komoditi andalan yang cukup berperan dalam skala perekonomian nasional, namun dengan pesatnya investasi swasta di sektor perkebunan nampaknya komoditas Kelapa Sawit menjadi dominan khususnya di wilayah Kabupaten Konawe dan Konawe Utara. Beberapa perusahaan perkebunan di wilayah Sultra sebagai berikut:

- (1) PT. Sari Asri Rezki (Kab. Kolaka dan Kolaka Timur);
- (2) PT. Mulya Tani (Kab. Konawe);
- (3) PT. Haspram (Kab. Kolaka Timur);
- (4) PT. Damai Jaya Lestari (Kab. Konawe Utara dan Kab. Kolaka);
- (5) PT. Tani Prima Makmur (Kab. Konawe);
- (6) PT. Mega Utama Tani (Kab. Konawe);
- (7) PT. Kilau Indah Cemerlang (Kab. Konawe Selatan);
- (8) PT. Surya Jaya Agrindo Perkasa (Kab. Konawe);
- (9) PT. Sultra Prima Lestari (Kab. Konawe Utara);
- (10) PT. Merbau Jaya Indah Raya (Kab. Konawe Selatan);
- (11) PT. Sawitindo Lestari (Kab. Konawe Selatan);
- (12) PT. Cipta Agung Manis (Kab. Konawe Selatan);
- (13) PT. Tiran (Kab. Konawe Selatan dan Bombana);
- (14) PT. Jhonlin Batu Mandiri (Kab. Bombana);
- (15) PT. Selera Raya Agri (Kab. Muna);
- (16) PT. Selera Agro (Kab. Muna Barat);
- (17) PT. Sumagro Sawitara (Kab. Buton Utara);
- (18) PT. Bintang Nusa Pertiwi (Kab. Konawe Selatan);
- (19) PT. Marketindo Selaras (Kab. Konawe Selatan).

e) kelautan

Laut selain sebagai sumber mata pencaharian ikan dan budi daya laut lainnya, beberapa daerah kabupaten/kota telah memanfaatkan potensi laut sebagai obyek pariwisata pantai maupun biota bawah laut seperti Kab. Wakatobi, Kota Baubau, Kota Kendari dan Kab. Konawe. Luasnya wilayah perairan Prov. Sultra mengakibatkan beberapa wilayah kepulauan tidak bisa dijangkau dengan sarana transportasi darat sehingga perairan di Sultra bukan saja sebagai sumber mata pencaharian bagi nelayan, petani rumput laut dan produsen mutiara tetapi juga wilayah perairan, menjadi salah satu penopang ekonomi Sultra dibidang perhubungan (pelayaran) antar kabupaten seperti penyeberangan Ferry dan angkutan Kapal Cepat maupun kapal motor biasa. Di tahun 2016 pemerintah telah mengoperasikan Pelabuhan Bungkutoko Kendari sebagai pelabuhan bongkar muat barang (Pelabuhan Peti Kemas).

f) kehutanan

Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya memiliki wilayah perairan yang sangat luas juga masih memiliki hutan yang cukup memadai baik hutan industri maupun hutan lindung, sehingga kegiatan dibidang perkayuan juga masih menjadi primadona sumber penghasilan masyarakat dan daerah terutama dengan kayu jatinya. Hasil industri yang berbahan baku kayu jati menjadi unggulan industri pengrajin kayu di Sultra sehingga hasilnya sangat terkenal di seluruh Indonesia bahkan beberapa negara di dunia yaitu meubel/*furniture* terutama meja gembol dan kerajinan ukiran lainnya. Tingginya kebutuhan akan bahan baku kayu dipasaran berdampak pada meningkatnya aktivitas *illegal logging* pada beberapa daerah yang memiliki potensi kawasan hutan.

g) transportasi umum berbasis *online*

Transportasi berbasis *online* saat ini menjadi pilihan masyarakat karena keunggulannya yang tepat waktu dan ongkos yang terjangkau. Di lain pihak kehadiran aplikasi transportasi *online* menjadi jalan keluar bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan/penghasilan sebagai *driver* ditengah ketatnya persaingan mencari pekerjaan. Adapun beberapa aplikasi transportasi *online* yang ada di wilayah Sultra antara lain Grab, Gojek/Gocar dan Maxim.

h) *hypermarket*

Tingkat pertumbuhan *Hypermarket* di Wilayah Sultra khususnya Kota Kendari mengalami peningkatan yang signifikan, pada akhir tahun 2017 Indogrosir berekspansi di Kota Kendari, pusat perkulakan dengan format distribusi ke pedagang retail/eceran ini menyasar konsumen dari kalangan pedagang atau UKM. Selain itu juga pusat perkulakan ini tidak membatasi jika ada masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan bulanan. Kehadiran Indogrosir berdampak pada menjamurnya minimarket di Kota Kendari seperti Indomart dan Marina Mart. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap pendapatan dan keberadaan sentra ekonomi masyarakat kecil dan pasar tradisional.

i) ketenagakerjaan

i) **ketenagakerjaan**

Pemberlakuan perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN di akhir tahun 2015 yang memberikan kebebasan terhadap keluar masuknya orang dan barang ke suatu wilayah dalam kawasan ASEAN akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi Sultra, disisi lain kebebasan tersebut juga akan memberikan dampak negatif berupa timbulnya permasalahan sosial baru yang dapat berdampak pada terjadinya peningkatan gangguan Kamtibmas.

Sultra menjadi salah satu tujuan tenaga kerja asing (TKA), Keberadaan perusahaan tambang, menjadi pemicunya, Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra, saat ini, ada 2,193 TKA di Bumi Anoa, Mereka bekerja di beberapa perusahaan tambang, Diantaranya, di PT Virtue Dragon Nickel industry (VDNi) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS), Jumlah ini cukup fluktuatif, Mereka bekerja dalam kurun waktu enam bulan, Jumlah tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya mencapai 3,000-an TKA, TKA sebanyak 2,193 orang itu, tersebar di 19 perusahaan tambang yang ada di Sultra, Paling banyak bekerja pada perusahaan besar: VDNi dan OSS di Morosi, kedua perusahaan ini, mempekerjakan TKA sekira 1,900-san.

7) **sosial Budaya.**

Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk masyarakat yang heterogen namun demikian beberapa suku tertentu menjadi masyarakat mayoritas di Provinsi Sultra yaitu Suku Buton, Muna, Tolaki dan Bugis. Sedangkan kelompok masyarakat minoritas yang pada umumnya warga pendatang di dominasi suku Jawa, Madura dan Bali, sehingga masyarakat Prov. Sultra memiliki keanekaragaman etnis dan budaya yang berkembang di masyarakat. Namun demikian beberapa hal menjadi ciri khas atau karakter khusus masyarakat Provinsi Sultra misalnya:

- a) kebiasaan/tradisi masyarakat yang sampai saat ini masih terjaga dan terlaksana pada waktu momen-momen tertentu dimana pelaksanaannya selalu mengundang perhatian dan konsentrasi masyarakat dari berbagai kalangan kelompok massa seperti acara joged Kande-Kandea dan Lulo. Berbagai potensi kerawanan dapat muncul dari kegiatan tersebut antarlain seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan bahkan perkelahian antar kelompok/ warga;
- b) adanya kebiasaan dari kelompok masyarakat tertentu dalam mengkonsumsi minuman keras baik tradisional maupun minuman keras modern masih sangat membudaya khususnya pada masyarakat bawah sehingga selalu menjadi pangkal terjadinya berbagai tindak kriminal;
- c) rasa sukuisme dan premordialisme yang masih kental dikalangan masyarakat Sultra dalam berbagai kegiatan atau pemberian dukungan masyarakat masih sangat tinggi terutama menyangkut wilayah sehingga terbagi menjadi 2 (dua) wilayah besar yaitu masyarakat daratan dan masyarakat kepulauan;

d) kebiasaan

- d) kebiasaan masyarakat didalam menyambut dan merayakan tahun baru akan selalu diisi berbagai acara hiburan termasuk menggunakan mercon dan petasan hingga menggelar tari-tarian daerah yang sangat populer di Sultra yaitu Tari Lulo yang biasa digelar hingga larut malam oleh kaum muda-mudi;
- e) masih adanya di beberapa daerah di Sultra yang menjadi tempat pengungsian khususnya bagi masyarakat penganut Islam aliran Jamaah Ahmadiyah dari Prov. NTB mengungsi ke wilayah Kab. Konsel dan Kendari, meskipun jumlahnya masih relatif sangat sedikit namun sangat berpotensi terjadinya konflik horizontal antar sesama pemeluk agama;
- f) masih berlakunya hukum adat denda (Peohala), terhadap perbuatan asusila yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga beberapa kasus terhadap para pelaku yang dianggap melanggar aturan sekalipun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana murni kepada si pelanggar dikenai hukum adat berupa denda Peohala (si pelanggar diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak keluarga korban/pelapor);
- g) penyampaian pendapat dimuka umum dalam bentuk unjuk rasa dijamin oleh Undang-undang. Secara kuantitas jumlah aksi unjuk rasa di wilayah Sultra cukup tinggi, pada tahun 2023 terjadi sebanyak 760 aksi (bidang politik 87 aksi, Sosbud 253 aksi, ekonomi, 352 aksi, keamanan 68 aksi) unjuk rasa dengan mengangkat isu terkait permasalahan pertambangan, dugaan indikasi korupsi, penolakan kenaikan harga BBM, kinerja aparatur pemerintah, penegakan hukum, kebijakan pemerintah, pengelolaan dana desa, dll.

Diera globalisasi dewasa ini menjadikan dunia terasa sempit karena kita dengan mudah dapat mengetahui perkembangan informasi dan menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain dengan cepat. Kondisi tersebut disebabkan dengan perkembangan teknologi internet dan banyak bermunculan sosial media yang bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan sosial media berawal dari *Friendster*, kemudian *Facebook*, *Twitter*, *Skype*, *Foursquare*, *Line*, *What's App*, *Path*, *Instagram*, *Snapchat* dan masih banyak lainnya. Fenomena kebutuhan akan media sosial yang menjadi trend bukan hanya dikalangan masyarakat dewasa bahkan pelajar sekolah dan anak-anak yang belum cukup umur juga sudah akrab dengan sosial media. Hakekatnya Medsos dan internet dibuat untuk membantu manusia dalam rangka sarana penyebaran informasi dan memperluas hubungan pertemanan/ *networking* antara penggunanya, namun saat ini sering kali disalah gunakan sebagai sarana kegiatan kejahatan/kriminal (judi, prostitusi, kejahatan dunia maya, pornografi dan lain-lain), sarana penyebaran paham radikal, ataupun penyebaran berita hoax, ujaran kebencian dan provokasi SARA.

Kerukunan antar umat beragama di wilayah Sultra saat ini masih terjalin dengan harmonis, namun pada tahun 2017 hingga 2018 telah terjadi beberapa kasus yang dapat mengganggu kehidupan beragama di wilayah Sultra:

- a) Jumat, 07 Oktober 2022 sekitar Pukul 07,13 Wita bertempat di Gereja GPDI Yesus Gembala Jl, Saranani Kel, Lahundape Kec, Kendari Barat Kota Kendari telah terjadi tindak pidana Pengrusakan Kaca Jendela Rumah Tinggal Pendeta dan Mobil Toyota Inova DT 1302 CZ yang diparkir di halaman di depan Gereja, Pelaku yang berjumlah 1 (Satu) orang (lidik), Akibat dari kejadian tersebut 1 (Satu) buah kaca jendela Rumah tinggal Pendeta pecah, kaca depan mobil Innova warna Silver yang terparkir di halaman Gereja DT, 1302 CZ pecah, lampu depan kiri dan kanan mobil Innova warna Silver yang terparkir di halaman Gereja DT, 1302 CZ pecah dan tong sampah pecah;
- b) Minggu, 21 November 2021 sekitar pukul 08.30 Wita telah datang di Polsek Wawonii Tengah an. Sdr. Siprianus Mula, 41 tahun, alamat Desa Wawo Indah, melaporkan bahwa salah satu jendela Gereja Santo Matius Penginjil di Desa Wawo Indah Kec. Wawoni Tengah Kab. Konawe Kepulauan telah terbakar. Hasil olah TKP kejadian terbakarnya salah satu jendela gereja di duga dilakukan oleh pelaku dengan cara membakar bagian kayu penutup jendela dengan menyiramkan bahan bakar tetapi api tidak menyebar. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian tersebut kemungkinan terjadi pada malam hari;
- c) permasalahan yang terjadi di SMA 11 Konsel dimana Guru honorer an. I Wayan Suardiatmika alias I Wayan Miko selaku guru sejarah di kelas 10 diduga telah melakukan penghinaan agama pada tanggal 6 Februari 2018 saat mengajarkan sejarah kepada siswanya. I Wayan Suardiatmika, S.Pd. mengatakan bahwa Ka'bah yang disembah umat Islam terbuat dari batu, sajennya umat Hindu membuat kita sehat kalau Alqur'an dimakan membuat kita sakit;
- d) pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Mesjid Fastabikuhairat Kel. Masiri Kec. Batauga Kab. Buton Selatan telah terjadi penganiayaan terhadap salah seorang rombongan Jama'ah Tabligh yang berasal dari Sulawesi Selatan an. Edi Hardi alamat Desa Barania, Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai. Atas kejadian tersebut mendapat kecaman yang viral di media sosial (*facebook*);
- e) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 telah diamankan seorang lelaki an. Sukarno alias Karno, 25 Februari 1999, Islam, pelajar SMU, alamat Desa Oempu Kec. Tongkuno Kab. Muna terkait postingannya di akun media sosial *facebook* bernama "Inal" yang mengirim gambar seseorang sedang menginjak Kitab Suci Alquran;
- f) pada hari Senin tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kel. Lawama Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna telah terjadi pengrusakan pagar Gereja ST. Mikhael yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Kec. Tongkuno Selatan dengan kronologis yaitu pada saat masyarakat Muslim Tongkuno Selatan melintas di depan Gereja ST. Mikhael melihat masyarakat Katolik membangun pagar Gereja, kemudian beberapa orang masyarakat Muslim tersebut mencabut 3 (tiga) pohon pagar yang ditanam. Kejadian tersebut dilatar belakangi sengketa lahan antara masyarakat Tongkuno Selatan dengan pemilik Gereja ST. Mikhael;

g) pada

- g) pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kec. Katobu Kab. Muna telah terjadi pengrusakan kaca jendela Gereja GPIB Beth-EI Raha yang dilakukan oleh OTK dengan kronologis yaitu pelaku melakukan pelemparan ke Gereja GPIB Beth-EI Raha menggunakan batu, mengakibatkan kaca jendela Gereja pecah;
- h) pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Kel. Lawama Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna telah terjadi pengrusakan pagar gereja St. Mikhael yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Tongkuno Selatan. Kronologis yaitu pada saat masyarakat Tongkuno Selatan melintas di depan Gereja St. Mikhael sedang membangun pagar gereja, kemudian beberapa orang masyarakat tersebut mencabut 3 pohon pagar yang ditanam. Kejadian tersebut dilatar belakangi sengketa lahan;
- i) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 bertempat di Lorong Beringin Jl. HEA Mokodompit Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari Kota Kendari ditemukannya selebaran bernuansa SARA bertuliskan "Kepton tidak layak mekar, mahasiswa Buton itu bodoh".

Pada tanggal 30 Desember 2020, Pemerintah resmi menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang. Penetapan pelarangan FPI disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiarij. Pembubaran dan pelarangan FPI dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh enam pejabat kementerian dan lembaga. Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala BNPT Nomor 220-4780 Tahun 2020 nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020 nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Pasca dikeluarkannya SKB tersebut telah menimbulkan aksi protes dari pengurus dan simpatisan FPI di wilayah Indonesia termasuk di Prov. Sultra yang diwujudkan melalui aksi unjuk rasa dan komentar melalui media sosial. Kepengurusan FPI di wilayah Sultra yang aktif melaksanakan kegiatan sebelum dikeluarkannya SKB tersebut terdapat di wilayah Kota Kendari dan Kab. Kolaka.

Terjadi peningkatan yang besar terhadap pertumbuhan jumlah transportasi kendaraan bermotor roda empat dan roda dua di Wilayah Sultra khususnya Kota Kendari sebagai dampak dari perkembangan ekonomi/investasi, kemudahan yang diberikan oleh perusahaan otomotif untuk mendapatkan kendaraan dengan harga murah serta kehadiran aplikasi angkutan umum berbasis *online* sehingga sebagian orang berani untuk mengkredit mobil baru dengan mengharapkan penghasilan sebagai *driver* angkutan *online*. Aturan resmi terkait sistem angkutan umum berbasis *online* perlu segera diterbitkan untuk mencegah munculnya permasalahan-permasalahan baru. Terkait dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor apabila tidak diimbangi dengan sarana/prasarana jalan akan berakibat timbulnya masalah lalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta permasalahan sosial lainnya.

Permasalahan sengketa agraria akan terus menjadi permasalahan yang berkembang di wilayah Sulawesi Tenggara, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, di daerah pemukiman, di daerah pertanian/perkebunan maupun daerah industri. Kompleksitas dan kerumitan masalah pertanahan disebabkan oleh karena pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa masing-masing mengklaim memiliki alat bukti yang sah atas kepemilikan tanahnya.

Kasus pertanahan merupakan masalah kompleks yang timbul sebagai dampak dari pertumbuhan/perkembangan ekonomi suatu daerah sehingga memberikan nilai tambah terhadap harga lahan, disisi lain adanya kebijakan pemerintah yang memberi kesempatan kepada perusahaan besar untuk melakukan investasi juga melatarbelakangi beberapa kasus sengketa lahan yang terjadi di Sultra. Ada dorongan-dorongan khusus dan kemudahan-kemudahan untuk perusahaan tersebut, yang kini berakibat adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi itu dengan distribusi kepemilikan tanah. Pada awalnya kasus pertanahan hanyalah merupakan persoalan hukum sederhana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat setempat. Namun dalam perkembangannya permasalahan pertanahan menjadi berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas, yang penanganannya harus diselesaikan secara hukum positif.

8) keamanan.

Kondisi keamanan sangat dipengaruhi oleh cara penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul. Secara umum situasi keamanan di wilayah hukum Polda Sultra masih relatif aman dan kondusif, gangguan keamanan dapat dilihat dari gangguan kriminalitas, gangguan Kamtibmas Lantas dan gangguan Kamtibmas non pidana. Namun di beberapa daerah tertentu masih terjadi kasus-kasus yang meresahkan masyarakat seperti perkelahian antara kelompok pemuda, perampokan/jambret, Curanmor, penipuan dan lain-lain. Jenis-jenis kejahatan yang terjadi masih didominasi oleh tindak pidana yang bersifat konvensional seperti Anirat, Curat, Curas, judi, penipuan, penggelapan, pengeroyokan, Miras, KDRT dan lain sebagainya.

a) data jenis kejahatan dan gangguan Kamtibmas tahun 2020 s.d. 2023

NO.	PENGKOLONGAN KEJAHATAN	PERIODE			
		2020	2021	2022	2023
1.	Konvensional	3,874	3,079	3,587	4045
2.	Trans Nasional	468	359	365	393
3.	Kekayaan Negara	29	38	19	28
4.	Kontinjensi	42	42	34	32
5.	Lain-lain	198	170	230	326
JUMLAH		4,611	3,688	4,235	4824

Sumber : Roops Polda Sultra

25 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO.	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
I.	KONVENSIONAL				
1.	Tibum	0	1	0	1
2.	Pembunuhan	30	18	17	19
3.	Anirat	12	12	12	20
4.	Penculikan	1	0	0	1
5.	Curas	43	25	24	32
6.	Curat	81	85	101	112
7.	Curanmor	258	119	52	89
8.	pemeriksaan	20	16	14	31
9.	Pemerasan	8	1	4	0
10.	Lalai akibat MD	2	3	6	3
11.	Lalai akibat LB	2	7	6	0
12.	Perjudian	40	25	37	18
13.	Perzinahan	37	33	32	36
14.	Penadahan	9	8	5	4
15.	Pengrusakan	135	88	81	119
16.	Penipuan	252	217	267	330
17.	Penggelapan	114	91	89	145
18.	Curi ringan	7	1	3	4
19.	Curi biasa	422	319	341	427
20.	Kej kesopanan	3	7	3	4
21.	Aniaya ringan	18	11	10	8
22.	Aniaya biasa	1056	916	1097	1181
23.	Palsu surat	34	40	60	41
24.	Serobot tanah	32	43	29	29
25.	Curi hewan	20	10	15	14
26.	Penemuan mayat	30	25	31	19
27.	Penghinaan	38	17	20	26
28.	Pengeroyokan	356	257	351	422
29.	Bunuh diri	0	0	0	0
30.	Lahgun Sajam	77	48	135	92
31.	Pengancaman	139	118	123	142
32.	Prbt tidak senang	2	3	2	2
33.	Migas	14	1	14	26
34.	Kawin tidak izin	18	8	3	14
35.	Aniaya dalam keluarga	198	169	215	241
36.	Keterangan palsu	3	4	1	2
37.	Setubuhi anak bawah umur	143	147	122	157
38.	Percobaan curi biasa	4	3	1	9
39.	Cemar nama baik	27	9	18	13
40.	Kej terhadap kedudukan warga	0	1	0	1
41.	Bawa lari perempuan	8	5	6	6
42.	Aniaya hewan	1	0	0	0
43.	Bawa lari anak orang	10	5	3	2
44.	Perkelahian 1 lawan 1	0	0	0	1
45.	Curi dalam keluarga	1	0	5	2
46.	Percobaan pemeriksaan	14	3	9	4
47.	Pencabulan	109	130	153	137
48.	Plecehan anak bawah umur	7	0	6	21

26 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
 NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
 TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO.	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
49.	Percobaan pembunuhan	1	3	0	1
50.	Masuk pekarangan tanpa izin	20	18	27	16
51.	Percobaan pencabulan	0	0	0	4
52.	Percobaan bunuh diri	0	0	1	0
53.	Kejahatan dalam jabatan	12	9	36	17
	JUMLAH	3,874	3,079	3,587	4.045
II.	TRANS NAS CRIME				
	A. TERORISME				
54.	Radikal	0	0	0	0
55.	Separatis	0	0	0	0
56.	Politik	0	0	0	0
57.	Individu dll	0	0	0	0
	B. Senpi dan Handak				
58.	Lundup senpi	0	0	0	1
59.	Dagang sendak/bom ikan	2	3	6	4
60.	Kej Senpi/rakitan/petasan	2	2	1	1
	C. BAJAK LAUT				
61.	Perbatasan	0	0	0	0
62.	Teritorial	0	0	0	0
	D. Dagang Manusia				
63.	Dagang anak	1	1	0	0
64.	Dagang wanita	0	0	0	4
65.	Imigrasi	0	0	0	0
66.	TKI	0	0	0	0
	E. Narkoba				
67.	Narkotika	373	311	310	308
68.	Psikotropika	5	0	3	1
69.	Ganja	0	0	0	0
70.	Obat berbahaya/Miras	85	42	40	74
	F. Ekonomi				
71.	Perbankan	0	0	2	0
72.	Corporasi	0	0	0	0
73.	Asuransi	0	0	0	0
74.	Upal	0	0	3	0
	G. Money Laundering				
75.	Antar negara	0	0	0	0
76.	Internal RI	0	0	0	0
	JUMLAH	282	468	359	365
III.	Kej. Kayaan Negara				
77.	Illegal logging	11	10	4	4
78.	Curi listrik	0	0	0	0
79.	Illegal minning	9	8	6	10
80.	Illegal fishing	1	4	1	2
81.	Pencurian uang	1	0	0	1
82.	Korupsi	7	16	8	11
	JUMLAH	30	29	38	19
IV.	Kontinjensi				
83.	Rusuh masal	0	1	0	0

NO.	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
84.	Sara	0	0	0	0
85.	Bencana alam	4	0	0	0
86.	Perkelahian kelompok	0	0	0	0
87.	Kebakaran	30	24	26	27
88.	Perkelahian aparat	0	0	0	0
89.	Laka laut	0	1	0	0
90.	Laka udara	0	0	0	0
91.	Makar	0	0	0	0
92.	Pembakaran	8	16	8	5
	JUMLAH	91	42	42	34
V.	Lain-Lain				
93.	Tindak pidana ITE	14	3	8	15
94.	Aborsi	2	1	0	2
95.	Obat daftar G	0	0	0	0
96.	UU. sehat & lindung	2	5	0	0
97.	Tindak pidana pornografi	0	0	0	0
98.	Terlantarkan keluarga	6	3	0	0
99.	Penemuan bom	1	1	0	0
100.	Percobaan pembakaran	3	0	1	2
101.	TP dibidang perikanan	0	0	0	0
102.	Pengrusakan kuburan	0	0	0	0
103.	Penemuan bayi	0	0	0	0
104.	Kejahatan terhdp jiwa org	0	0	0	0
105.	Terlantarkan anak	1	1	1	1
106.	MD tertimpa pohon	0	0	0	0
107.	Kej thd kmrdkn orang	0	0	0	1
108.	MD kena sengatan listrik	0	0	0	0
109.	Laka kerja	3	0	0	0
110.	UU perlindungan anak	41	36	41	44
111.	Kekerasan trhdhp anak	87	85	138	164
112.	Prostitusi	1	3	0	4
113.	Msk pekarangan tanpa ijin	1	0	0	0
114.	Pemufaktan jahat	0	1	0	0
115.	Rusak tanaman	0	0	0	0
116.	Obat berbahaya	2	0	0	0
117.	Perkelahian 1 lawan 1	0	0	0	0
118.	Kej. datangkan bahaya	0	0	0	0
119.	Lalai timbulkan ledakan	10	0	0	0
120.	Menghasut orang	2	0	0	0
121.	Perampasan hak milik	0	0	2	2
122.	Aborsi	2	0	2	0
123.	Palsu tanda tangan	0	0	0	1
124.	UU lindungan konsumen	0	0	0	0
125.	Percobaan Curat	0	0	0	4
126.	Mucikari	0	0	0	0
127.	Suap	10	0	0	0
128.	MD karena sesak nafas	0	0	0	0
129.	ganggu usaha tambang	0	0	0	0
130.	Kej. thdp kesusilaan	0	0	1	2

28 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO.	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
131.	TP. perkebunan	2	0	0	74
132.	Kej. t. keamanan umum	0	1	0	0
133.	Memaksakan kehendak	5	0	5	0
134	TP. jaminan pidana	3	4	0	10
	JUMLAH	198	170	230	326
	JUMLAH TOTAL	4,395	4611	3,688	4,235

Sumber : Roops Polda Sultra

b) data Laka Lantas tahun 2020 s/d 2023 sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH LAKA	KORBAN			KERUGIAN MATERIIL
			MD	LB	LR	
1.	2020	765	198	77	966	Rp. 2.364.400.000
2.	2021	923	262	40	1.342	Rp. 2.553.390.000
3.	2022	1.341	266	120	1.777	Rp. 4,756,020,000
4.	2023	1.412	292	145	1.803	Rp. 5.446.013.000

Sumber : Roops Polda Sultra

c) data pelanggaran lalu lintas tahun 2017 s/d 2020 sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN	DENDA
1.	2020	27.642	Rp. 2.647.725.000
2.	2021	18.948	Rp. 1.911.175.600
3.	2022	17.739	Rp. 1,865,868,000
4.	2023	13.166	Rp. 1,177,972,539

Sumber: Roops Polda Sultra

b. analisis SWOT.

1) *strength* (kekuatan).

a) jumlah personel Polda Sulawesi Tenggara dan jajaran sampai dengan Juni 2024 sebanyak 8.312 orang dengan rincian sebagai berikut:

(1) Polri sebanyak: 8.080 orang;

(2) PNS sebanyak: 232 orang.

Dengan demikian rasio perbandingan jumlah Polri dengan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 2.749.010 sehingga ratio jumlah penduduk dibandingkan jumlah anggota Polri Polda Sulawesi Tenggara adalah 1:340;

b) sarana dan prasarana Polda Sulawesi Tenggara dari berbagai jenis yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Polda Sulawesi Tenggara guna melayani masyarakat telah digelar sampai dengan tingkat Polsek dan Polsubsektor walaupun masih perlu dilakukan peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya;

c) komitmen pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Polda Sulawesi Tenggara dengan mencanangkan zona integritas untuk seluruh Satker maupun pelaksanaan program prioritas Kapolri;

d) postur

- d) postur kekuatan Polda Sulawesi Tenggara dengan struktur Polda Cukup, Polres Besar dan Polsek Kuat diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan Polri tergelar mulai tingkat Polda sampai tingkat kecamatan dengan struktur 1 (satu) Mapolda, 14 (empat belas) Polres, 134 (seratus tiga puluh empat) Polsek dan 25 (dua puluh lima) Polsubsektor;
 - e) meningkatnya dukungan anggaran termasuk anggaran operasional kepolisian telah terdistribusi sampai tingkat Polsek dan diterima pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga para pimpinan satuan (Kasatker) mampu mengelola kegiatan dan anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker;
 - f) kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan tertentu semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya penanganan *transnational crime* (terorisme dan Narkoba), kejahatan terhadap kekayaan negara (*illegal logging*, *illegal minning* dan *illegal fishing*) dan kejahatan berimplikasi kontinjensi (kerusuhan massa) sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
 - g) terisnya jabatan dan unit-unit baru dari mulai tingkat Mapolda sampai dengan tingkat Polsek sesuai dengan Perpol Nomor 14 Tahun 2018 maupun Perpol Nomor 2 Tahun 2021 yang bertujuan semakin meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat;
 - h) adanya tunjangan kinerja/remunerasi kepada personel Polri telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.
- 2) *weakness* (kelemahan).
- a) masih belum terdukung sepenuhnya peralatan khusus (Alsus) untuk beberapa penugasan khusus oleh satuan-satuan operasional;
 - b) anggaran Polda Sulawesi Tenggara belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggaran prioritas Polda Sulawesi Tenggara apalagi untuk pemenuhan anggaran ideal, sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai serta mendukung belanja barang guna kegiatan operasional kepolisian, sedangkan untuk pemenuhan belanja modal masih kurang sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan materiil yang dibutuhkan dalam pelayanan prima dan penerapan teknologi informasi *online* dari Polsek ke Polres langsung ke Polda dan sebaliknya;
 - c) masih kurangnya kualitas sumber daya manusia Polda Sulawesi Tenggara yang profesional dan ahli dibidangnya serta penempatan personel tidak sesuai dengan keahliannya;
 - d) penggelaran personel belum sesuai dengan postur Polda cukup, Polres besar dan Polsek kuat;
 - e) belum terpenuhi sarana perumahan dinas (Pamen, Pama dan Bintara) sehingga personel dalam melaksanakan tugas tidak optimal;

f) masih

- f) masih terbatasnya Penyidik/Penyidik Pembantu Polri yang berlatar belakang pendidikan S-1 atau yang setara, berdampak kepada kurangnya kualitas dan kemampuan dalam menghadapi kejahatan seperti *cyber crime*, *money laundering*, terorisme, perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba.
- 3) *opportunities* (peluang).
 - a) sistem desentralisasi/otonomi daerah yang mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat saling menunjang terhadap pelaksanaan Tupoksi Polri di daerah;
 - b) partisipasi publik dalam konteks perpolisian masyarakat termasuk kesediaan mengungkap perkara;
 - c) kesadaran masyarakat tentang pemahaman tugas–tugas kepolisian;
 - d) program reformasi birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memberikan peluang bagi Polri untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek struktural, instrumental dan khususnya aspek kultural.
- 4) *threatness* (ancaman).
 - a) Geografi.
 - (1) berdasarkan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kedudukan perairan Sultra berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang menghubungkan antara Samudra Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda menuju Timor Leste dan Benua Australia melalui Laut Banda pada wilayah Sultra bagian timur serta perairan Sultra yang juga merupakan jalur nasional sekunder menjadi salah satu alternatif pelabuhan hubungan internasional komoditas berskala ekspor. Akan ramai dilewati oleh lalu lintas kapal-kapal dari kawasan Asia Tenggara kondisi tersebut rentan terhadap:
 - (a) dijadikan jalur lintas/transit penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang hendak mencari suaka di Australia;
 - (b) penyelundupan barang (bahan tambang, hasil hutan, hasil pertanian dan perkebunan dan lain-lain);
 - (c) penangkapan ikan di perairan Sultra secara ilegal;
 - (d) masuknya pelaku teror dari Mindanau Selatan dan barang terlarang (Senpi, Handak dan Narkoba);
 - (e) masuknya kapal asing yang berasal dari luar kawasan Asean secara ilegal.
 - (2) beberapa wilayah yaitu Kab. Konawe Utara berbatasan langsung dengan daerah rawan terorisme yaitu Sulawesi Tengah (Poso) yang saat ini lagi melaksanakan operasi perburuan pelaku teror, sehingga Provinsi Sultra berpotensi sebagai tempat pelarian/persembunyian pelaku teror dan penyebaran paham radikal untuk membentuk sel-sel jaringan baru;

- (3) Sultra terdiri dari wilayah daratan dan wilayah Kepulauan memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, iklim dengan curah hujan yang cukup tinggi di wilayah tertentu berpotensi menimbulkan ancaman banjir, tanah longsor, sementara pada musim kemarau yang berkepanjangan berpotensi pada terjadinya bencana kekeringan dan kebakaran hutan / lahan, Perkiraan terjadi anomali cuaca yang ekstrem akan kembali berlangsung di tahun 2024 yang menyebabkan badai siklon tropis (93S, Tiffany dan Cody) yang menyebabkan terjadinya bencana hydrometeorologi (bencana alam yang disebabkan faktor cuaca) seperti angin puting beliung;
- (4) selain itu wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah kepulauan yang masih mengandalkan transportasi laut dalam mobilisasi masyarakat. Pada musim tertentu yaitu musim angin barat dan angin timur, wilayah laut/perairan Sulawesi Tenggara memiliki gelombang laut yang cukup tinggi mencapai 3 (tiga) hingga 6 (enam) meter rawan terjadi di Perairan Wakatobi, Laut Banda Timur Sultra, Perairan Manui Kendari dan Teluk Bone. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerawanan terjadinya kecelakaan laut khususnya pada daerah-daerah kepulauan;
- (5) kondisi geografis wilayah Indonesia masuk dalam *Ring of Fire Pasifik* (sabuk api Pasifik) dikelilingi oleh lempengan bumi antara lain lempeng Pasifik, lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Sulawesi Tenggara juga tidak terlepas dari ancaman bencana gempa bumi Tektonik yang disebabkan karena pergeseran, patahan atau tumbukan lempengan kerak bumi, yang apabila terjadi di wilayah perairan berpotensi menyebabkan Tsunami;
- (6) beberapa wilayah Sulawesi Tenggara memiliki sungai-sungai yaitu Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Buton Utara dan Kab. Buton yang dimanfaatkan oleh masyarakat pedalaman/pedesaan sebagai jalur transportasi air, namun dalam perkembangannya dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan khususnya *illegal logging* dengan mengangsur kayu melalui sungai dengan cara dijadikan rakit.

b) Demografi.

- (1) perkembangan jumlah penduduk yang cepat, penyebaran dan kepadatan yang tidak merata, serta tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya, merupakan potensi terhadap terjadinya berbagai masalah sosial dan keamanan dengan dimensi yang kompleks dan luas, antara lain meningkatnya premanisme, gelandangan dan pengemis, WTS, *street crime* dan lain-lain;
- (2) periode tahun 2025 Indonesia akan memperoleh bonus demografi begitu pula di Sulawesi Tenggara, mengingat jumlah usia produktif mengalami peningkatan. Kondisi ini merupakan suatu peluang sekaligus dapat menjadi ancaman ketika usia produktif tersebut tidak

memperoleh

memperoleh kesempatan lapangan pekerjaan yang layak, terlebih dengan perkembangan globalisasi mengakibatkan ketatnya persaingan kerja, bahkan beberapa negara mengalami kegagalan dalam mengoptimalkan bonus demografi, oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya secara optimal;

- (3) penyebaran penduduk di wilayah/daerah tertentu masyarakat pendatang lebih dominan atau cenderung seimbang dengan tingkat kesejahteraan antara masyarakat pendatang tidak seimbang maka sangat berpotensi terjadinya kecemburuan sosial yang dapat berujung pada terjadinya konflik horizontal berlatar belakang SARA;
- (4) keberagaman budaya, etnis, agama dan suku disatu sisi merupakan aset bangsa, namun dapat dijadikan celah oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan provokasi untuk memicu munculnya konflik komunal bernuansa SARA.

c) Sumber Daya Alam.

Kondisi sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Tenggara selain merupakan potensi bagi pemasukan devisa negara dan daerah serta peningkatan perekonomian rakyat, apabila tidak dikelola dan diamankan dengan baik, juga merupakan potensi kerawanan, berupa:

- (1) terjadinya eksploitasi secara ilegal, baik berupa *illegal logging*, *illegal mining* dan *illegal fishing* yang dapat merugikan kekayaan negara serta menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
- (2) penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menimbulkan kerugian negara;
- (3) kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam;
- (4) persengketaan pengelolaan lahan yang dapat menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal;
- (5) akan menjadi incaran negara asing untuk melakukan investasi/pengolahan, berupaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga akan berimplikasi pada situasi dalam negeri.

d) Ideologi.

- (1) Penyebaran paham / ideologi lain selain Pancasila (liberalisme, komunisme gaya baru, Syariat Islam dan ideologi lain) dalam bentuk pertemuan terbuka maupun memanfaatkan kemajuan teknologi internet, media sosial dan media massa, Kondisi tersebut mengandung kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta akan mengundang reaksi masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya konflik horizontal;

- (2) rongrongan terhadap ideologi Pancasila bersumber dari pemikiran luar (barat maupun timur) yang dibawa dan disebar oleh warga Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Teknologi informasi yang berkembang pesat dewasa ini disalahgunakan sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi/merubah pola pikir masyarakat Indonesia menjadi individualistik, feodal, hedonisme, vandalisme atau menerima LGBT sebagai penghargaan terhadap HAM. Kondisi tersebut dapat menjadi sumber muncul perpecahan di masyarakat yang dapat berujung pada terjadinya aksi persekusi;
- (3) tantangan kedepan khususnya terhadap generasi muda dan kelompok usia pertengahan akan pengaruh masuknya budaya/pemikiran dari luar maupun dalam negeri yang bersifat negatif melalui penafsiran yang keliru terhadap paham keagamaan, kesukuan dan golongan yang berdampak pada menguatnya politik identitas yang akan mengancam kebhinekaan.

e) Sosial Politik.

- (1) terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran etika dalam penyelenggaraan sistem politik pemerintahan masih rawan terjadi di wilayah Sultra, antara lain :
 - (a) terjadinya tarik menarik kepentingan politik dalam lembaga legislatif;
 - (b) terjadinya manuver politik yang berdampak pada perebutan kekuasaan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan dan korup dalam penentuan kebijakan legislasi regulasi pemerintah;
 - (c) korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan;
 - (d) terjadinya pelanggaran kewenangan dan etika publik akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada kepentingan pribadi.
- (2) residu penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu tahun 2024 masih akan berdampak pada perkembangan situasi politik dan pemerintahan di tahun-tahun mendatang. Pihak-pihak yang menyatakan diri sebagai oposisi pemerintahan akan terus melakukan kritik dan koreksi terhadap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui jalur parlemen hingga pemanfaatan organisasi kemasyarakatan maupun mahasiswa dalam bentuk unjuk rasa maupun kritik lewat media cetak elektronik ataupun media sosial;
- (3) Pilkada serentak tahun 2024 merupakan proses pemilihan terakhir menuju pemilihan serentak nasional tahun 2024. Pada tahun 2025 masih terdapat tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan yaitu tahapan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, penetapan pasangan calon terpilih oleh KPUD dan pelantikan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Sultra sehingga hal tersebut masih rentan terjadinya gangguan Kamtibmas sebagai bentuk ketidakpuasan atas proses dan hasil Pilkada serentak tahun 2024;

(4) potensi

- (4) potensi terjadinya disharmonisasi hubungan kepala daerah yang berdampak pada meningkatnya situasi politik maupun Kamtibmas yang ditandai dengan unjuk rasa atau aksi kekerasan lainnya;
- (5) dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah, dimungkinkan akan kembali adanya kasus hukum yang menjerat kepala daerah akibat perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan kewenangan, suap maupun korupsi;
- (6) peran media massa baik cetak maupun elektronik serta kebebasan pers yang terus tumbuh dan berkembang namun belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik, sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat pemberitaan;
- (7) upaya pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru sarat dengan kepentingan politik dari kelompok atau individu tertentu sehingga terkesan dipaksakan dan mengabaikan pentahapan serta prinsip-prinsip daerah otonom seperti tapal batas wilayah, letak ibukota, partisipasi masyarakat dan sumber daya yang dimiliki sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal dan vertikal yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas;
- (8) pelaksanaan kegiatan pembangunan Pembangunan infrastruktur dan geliat investasi rentan menggelincirkan pejabat daerah dalam pusaran kasus korupsi berupa suap dan penyalahgunaan kewenangan;
- (9) isu degradasi terhadap kinerja Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah oleh elemen pergerakan aksi dan tokoh politik oposisi dengan mengkritisi kinerja pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan serta kritik terhadap kinerja aparat penegak hukum;
- (10) dalam kondisi suprastruktur politik Indonesia kekuasaan eksekutif dan legislatif memberikan peran besar terhadap partai politik dalam penentuan pimpinan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah serta legislatif. Kondisi tersebut telah berpengaruh pada independensi dan netralitas pejabat pemerintahan sehingga cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan kelompok / partainya.

f) Sosial Ekonomi.

- (1) dampak ekonomi global terhadap stabilitas harga dalam negeri sehingga terjadi koreksi terhadap harga BBM dan tarif dasar listrik yang berujung pada aksi penolakan dari masyarakat yang memicu terjadinya unjuk rasa anarkhis, pengrusakan dan pembakaran;
- (2) dikeluarnya Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara tanpa didukung dengan pengawasan / pengamanan yang ketat dari Kementerian ESDM dan instansi / lembaga terkait diperkirakan berpotensi terjadi penyimpangan maupun penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya berdampak terhadap kerugian negara dan perekonomian nasional;

(3) dampak

- (3) dampak ekonomi global terhadap stabilitas harga dalam negeri sehingga terjadi koreksi terhadap harga BBM dan tarif dasar listrik yang berujung pada aksi penolakan dari masyarakat yang memicu terjadinya unjuk rasa anarkhis, pengrusakan dan pembakaran;
- (4) penyelewengan distribusi BBM akan kembali terjadi karena masih adanya perbedaan harga antara BBM bersubsidi dengan non subsidi terutama pada solar dan minyak tanah, sehingga bermunculan modus operandi baru untuk memperoleh BBM subsidi kemudian dijual kepada industri dimana keduanya memiliki hubungan saling menguntungkan;
- (5) meningkatnya warga negara asing yang masuk ke Wilayah Sultra akan menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan akibat keterbatasan personil dan peralatan yang dimiliki. Masuknya masyarakat luar negeri kedaerah dapat memberikan dampak negatif berupa timbulnya permasalahan sosial baru yang dapat berdampak pada terjadinya peningkatan gangguan Kamtibmas baik konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, yang berimplikasi pada kontijensi dan pelanggaran keimigrasian;
- (6) banyaknya sumber kekayaan alam yang terdapat di wilayah Sulawesi Tenggara seperti emas, nikel, aspal dan marmer tidak menutup kemungkinan adanya oknum atau kelompok tertentu yang menggunakan kesempatan untuk melakukan penambangan liar;
- (7) lemahnya pengawasan terhadap kegiatan penambangan akan mendorong terjadinya penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat dan didukung oleh para pengusaha;
- (8) luasnya kawasan hutan yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, meningkatnya permintaan kayu terutama untuk keperluan industri serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat, mengakibatkan masih tingginya kerawanan bagi terjadinya pencurian dan penebangan kayu illegal. Kasus ini tidak jarang melibatkan oknum pegawai Dinas Kehutanan terutama berkaitan pengeluaran surat-surat perizinan, dilain pihak kegiatan illegal logging seringkali dibekingi oleh oknum aparat TNI/Polri;
- (9) Illegal Fishing kemungkinan terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara mengingat wilayah Sultra memiliki laut yang luas, disamping itu pula lemahnya pengawasan dan pengamanan perairan laut akan dimanfaatkan oleh pelaku dalam melakukan aksinya;
- (10) munculnya persoalan sengketa agraria sebagian besar adalah dampak dari kemajuan dan perkembangan pembangunan wilayah kabupaten/kota dari segi ekonomi maupun timbul karena adanya pengetahuan akan kandungan mineral di suatu wilayah sehingga membuat masyarakat berlomba mengklaim kepemilikan lahan;

- (11) kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro masyarakat menuai pro kontra khususnya terkait bidang energi, TDL, penertiban PKL, kenaikan tarif retribusi, dll. Terjadinya krisis ekonomi dan keuangan global diperkirakan masih akan mempengaruhi iklim investasi dan situasi perekonomian di wilayah Sultra, yang mana para investor akan mengalami beberapa permasalahan seperti terbatasnya kredit, sehingga akan berpotensi bagi munculnya konflik sosial;
- (12) pemberlakuan kebijakan perdagangan bebas negara-negara kawasan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan iklim investasi, peningkatan ekspor barang, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Disisi lain kebijakan tersebut juga mengancam/ memberikan dampak buruk terhadap perekonomian antara lain:
- (a) banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang lebih berkualitas;
 - (b) regulasi yang kurang dalam memproteksi kekayaan sumber daya alam, sehingga tindakan eksploitasi dalam skala besar oleh perusahaan asing dapat merusak ekosistem;
 - (c) persaingan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing, dimana kualitas kemampuan daya saing dan produktivitas tenaga kerja lokal masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri seperti China, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan disahkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing akan membuka peluang masuknya tenaga kerja kasar *unskilled worker* dari pihak asing yang mengancam keberlangsungan dari lapangan kerja untuk pekerja lokal sehingga berpotensi menimbulkan konflik ketenaga kerjaan;
 - (d) timbulnya permasalahan sosial baru sebagai dampak dari pemberlakuan pasar bebas, yang dapat berdampak pada timbulnya gangguan Kamtibmas;
 - (e) meningkatnya tenaga kerja asing dari luar khususnya China dan pekerja dari kawasan Asia Tenggara sehingga rentan terhadap terjadinya pelanggaran hukum dan tindak pidana.
- (13) fluktuasi harga bahan pokok setiap tahunnya akan berdampak pada memberatkan hidup masyarakat khususnya golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah berpotensi menimbulkan dampak bagi gangguan keamanan dengan mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pencurian, pemerasan, penipuan, perjudian, prostitusi dan lain-lain;
- (14) kurang ketatnya pengawasan di laut serta kurang tegasnya tindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum di laut menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di laut berupa penggunaan bom dalam menangkap ikan, penggunaan kapal trawl, akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal diantara nelayan;

(15) terbatasnya

- (15) terbatasnya lapangan pekerjaan ditambah dengan beragamnya masalah tenaga kerja yang belum teratasi, cenderung masih akan dihadapi serta berpotensi menimbulkan gangguan, antara lain permasalahan PHK, UMR, masalah pesangon dan kesejahteraan pekerja serta upaya penghapusan *out sourcing*, permasalahan TKI.

g) Sosial Budaya.

- (1) ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah menerbitkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas khususnya dari kader/ simpatisan eks HTI yang telah dibubarkan serta dikeluarkannya SK, akan diwujudkan dengan melakukan kritik terhadap pemerintah yang saat ini sedang berkuasa dengan tujuan untuk mendiskreditkan atau menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
- (2) masalah penanganan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat masih jauh dari harapan yang menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit di berbagai wilayah Sultra yang berimplikasi terhadap stabilitas Kamtibmas;
- (3) pengelolaan pembangunan sektor pendidikan yang kurang terencana dengan baik dan kurangnya pengawasan dapat menimbulkan berbagai kasus yang berkaitan dengan pendidikan antara lain : kasus ijazah palsu, masalah ujian akhir nasional, penyimpangan dana BOS, dan penyimpangan dana BOP;
- (4) aksi Unras dimana apabila tuntutan massa tidak kunjung terealisasi seringkali berdampak pada timbulnya giat anarkhis. Pada rentan waktu tahun 2024 pelaksanaan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polda Sultra diperkirakan akan mengalami peningkatan. Adapun agenda tuntutan antara lain : masalah penegakan supremasi hukum terutama yang berkaitan dengan korupsi melibatkan pejabat/elit politik, penolakan dan dukungan atas kebijakan/Program pemerintah, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum, permasalahan pertambangan dan sebagainya;
- (5) fenomena aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh Ormas Tamalaki membawa parang/sajam sebagai atribut aksi/lambang adat istiadat suku Tolaki (parang ta'awu), berpotensi menimbulkan masalah baru seperti konflik antar kelompok berlatar belakang SARA;
- (6) karakteristik dan kebiasaan penduduk Sultra menjadi potensi timbulnya kerawanan seperti gemar mengkonsumsi Miras, membawa Sajam di tempat keramaian dan lain-lain;
- (7) ujaran kebencian melalui Medsos dan internet. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dibarengi dengan sikap bijak pengguna sehingga memanfaatkan fasilitas internet dengan mengindahkan norma aturan yang berlaku. Kegiatan memposting/realise pendapat yang berisi ujaran kebencian, berita bohong dan provokasi melalui media sosial dan internet akan kembali marak terjadi di tahun 2024;

(8) potensi

- (8) potensi kerawanan pada setiap agenda-agenda penting seperti hari besar umat beragama, hari libur nasional, HUT Kabupaten, HUT Parpol, peringatan hari Buruh, Kunker Presiden, hari anti Korupsi, Pemilihan BEM mahasiswa, peringatan meninggalnya 2 mahasiswa UHO an. Randy dan Yusuf, Pilkades serentak dan lain-lain. Pada momen tersebut terjadi peningkatan mobilitas masyarakat sehingga berpotensi terjadi kerawanan yang perlu di antisipasi;
- (9) pemanfaatan media sosial maupun media daring oleh masyarakat tanpa memperhatikan kaidah maupun norma pemanfaatan informasi dengan terlebih dahulu menyaring dan menelaah informasi yang diperoleh menyebabkan terjadinya distorsi informasi dengan maraknya berita *hoax*, *hate speech*, *fake news* yang mengarah pada provokasi masyarakat yang bertujuan memicu instabilitas politik dan keamanan akan kembali terjadi di tahun 2021;
- (10) keragaman etnis, agama, suku dan ras merupakan aset bangsa, yang telah sejak lama terpelihara dalam bingkai kebhinekaan. Ancaman terhadap kebhinekaan akhir-akhir ini kerap kali disuarakan mengatas namakan agama dalam bentuk ujaran kebencian melalui situs internet dan media sosial. Apabila pemerintah kurang merespon fenomena ancaman tersebut, sewaktu-waktu dapat memicu konflik horizontal yang bernuansa SARA;
- (11) beberapa aliran keagamaan yang menyesatkan masyarakat telah menimbulkan keresahan masyarakat antara lain aliran Jamaah Ahmadiyah, Syiah dan Aliran Annatsir. Keberadaan penganut aliran tersebut, telah mendapat perhatian dan menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga perlu penanganan khusus melibatkan seluruh *stakeholder*/komponen terkait guna mencegah terjadinya aksi anarkisme terhadap sesama umat yang memicu konflik berlatar belakang SARA;
- (12) penerbitan surat tanah/sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional, atau Pemerintah Daerah setempat kepada beberapa pemilik, sehingga menimbulkan sengketa tanah yang berdampak terjadinya konflik horizontal dan vertikal. Penyelesaian sengketa tanah yang berlarut - larut berpotensi terhadap terjadinya gangguan Kamtibmas berupa pendudukan tanah oleh massa, penjarahan hasil kebun milik perusahaan pada saat panen oleh masyarakat, pembakaran/ pengrusakan asset perusahaan, sampai dengan terjadinya penganiayaan atau pembunuhan.

h) Keamanan.

- (1) berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik permasalahan yang bersumber dari kondisi sosial politik, sosial ekonomi maupun kondisi sosial budaya, berpotensi terhadap terjadinya gangguan keamanan serta kerawanan lain (non pidana) seperti potensi terjadinya bencana alam seperti Banjir, Tanah Longsor, Puting beliung, gempa bumi dan Karhutla;

(2) tingkat

- (2) tingkat pemahaman/kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan, masyarakat bertindak main hakim sendiri;
- (3) sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah keamanan segalanya dapat diatur dan ditentukan adat setempat, sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal;
- (4) potensi Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik permasalahan yang bersumber dari kondisi sosial politik, maupun budaya;
- (5) permasalahan perkelahian antar kelompok pemuda yang terjadi di beberapa wilayah di Sultra dengan berbagai macam latar belakang seperti permasalahan suku, dendam pribadi/kelompok, pengaruh kmiras dll, kemungkinan akan kembali terjadi apabila akar permasalahan tidak ditangani secara profesional dan maksimal oleh seluruh *stakeholder*;
- (6) rendahnya sanksi hukuman terhadap pelaku kejahatan/ pelanggaran sehingga tidak menimbulkan efek jera para pelaku;
- (7) masih berkembangnya pemahaman ditengah tengah masyarakat bahwa tanggung jawab keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan di lingkungannya;
- (8) kecenderungan masyarakat Sultra mengkonsumsi minuman keras sehingga berakibat mudah emosional, mudah tersinggung, dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah sehingga mengakibatkan sering terjadinya tindak kekerasan seperti penganiayaan, pengeroyokan, KDRT dan tindakan asusila;
- (9) terbatasnya lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi terbatas beban biaya hidup yang semakin tinggi serta minimnya keterampilan, membuat orang atau kelompok tertentu berpikiran pendek mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang melalui cara-cara yang melawan hukum;
- (10) menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap wibawa penegakan hukum yang disebabkan karena tindakan aparat Gakum yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku yang ditandai dengan pengungkapan kasus suap beberapa aparat penegak hukum. Kondisi tersebut telah membuat stigma negatif bahwa hukum menjadi tajam hanya ketika berhadapan dengan masyarakat kalangan bawah;
- (11) sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah keamanan segalanya dapat diatur dan ditentukan adat setempat, sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal;
- (12) dalam kaitan penegakan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sultra, beberapa hal yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, antara lain:

(a) masih

- (a) masih adanya subtansi hukum yang tumpang tindih dan terjadinya inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut dapat berakibat pada terjadinya ketidakpastian hukum sehingga berimplikasi terhadap kehidupan politik, ekonomi (investor dan pelaku usaha), sosial budaya dan keamanan;
 - (b) masih kurang ketegasan dari lembaga penegak hukum, selain itu kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas serta masih kurang transparannya sistem peradilan sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan keamanan, akibat masih lemahnya penegakan hukum. Hal ini terlihat dari masih adanya komersialisasi yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, masih adanya intervensi kekuatan politik dan kekuatan massa, sarana dan prasarana hukum yang belum memadai dan masih kurangnya budaya kesadaran hukum baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat;
 - (c) penegakan hukum masih akan dihadapkan pada belum optimalnya kinerja aparaturnya penegak hukum, adanya praktek mafia peradilan dan diskrimasi dalam penegakan hukum, Faktor lainnya yang dapat menghambat penegakan hukum disebabkan integritas, moralitas dan profesionalisme aparat penegak hukum yang sampai saat ini belum mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- i) Kegiatan yang berkaitan dengan kalender Kamtibmas.
- (1) peringatan hari-hari besar internasional.
 - (a) Hari Lingkungan Hidup Indonesia (10 Januari);
 - (b) Hari kasih sayang / Valentine Day (14 Februari);
 - (c) Peringatan Keruntuhan Khilafah (3 Maret);
 - (d) Hari Wanita Internasional (8 Maret);
 - (e) HUT Bank Dunia (1 April);
 - (f) Hari Kesehatan Dunia (7 April);
 - (g) Hari Air Internasional (22 Maret);
 - (h) Hari Bumi (22 April);
 - (i) Hari Buruh Internasional (1 Mei);
 - (j) Hari Lingkungan Hidup Internasional (5 Juni);
 - (k) Hari Anti Narkoba Sedunia (26 Juni);
 - (l) Hari Batik Dunia (2 Oktober);
 - (m) Hari Pangan (16 Oktober);
 - (n) Hari Dokter Sedunia (24 Oktober);
 - (o) Hari Anak Universal UNICEF (20 November)
 - (p) Hari Trans Gender (21 Nopember);

(q) Hari

- (q) Hari Anti Aids Internasional (1 Desember);
- (r) Hari Anti Korupsi Sedunia (9 Desember);
- (s) Hari HAM Sedunia (10 Desember);
- (t) Migrant Care Internasional (20 Desember)
- (2) peringatan hari besar nasional
 - (a) hari-hari besar keagamaan:
 - (1)) Hari Imlek tahun baru Cina 2574 (22 Januari);
 - (2)) Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW (18 Februari);
 - (3)) Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1944 (22 Maret);
 - (4)) Puasa Ramadhan (21 Maret – 21 April);
 - (5)) Wafatnya Isa Almasih (7 April);
 - (6)) Hari Raya Idul Fitri (22 April);
 - (7)) Hari Raya Waisak 2567 (6 Mei);
 - (8)) Kenaikan Isa Almasih (18 Mei);
 - (9)) Hari Idul Adha 1444 H (29 Juni);
 - (10)) Tahun Baru Islam (19 Juli);
 - (11)) Hari Asyura/Peringatan 10 Muharram oleh Kelompok Syiah (28 Juli);
 - (12)) Maulid Nabi Muhammad SAW (27 September);
 - (13)) Hari Raya Natal (25 Desember);
 - (14)) Malam Perayaan Natal dan Tahun baru (31 Desember).
 - (b) HUT Kostrad (6 Maret);
 - (c) Hari Supersemar (11 Maret);
 - (d) Hari Nelayan Nasional (6 April);
 - (e) HUT TNI AU (9 April);
 - (f) Hari Konsumen Nasional (20 April);
 - (g) Hari Kartini tanggal (21 April);
 - (h) Hari Peringatan Pembebasan Irian Barat (1 Mei);
 - (i) Hari Pendidikan Nasional tanggal (2 Mei);
 - (j) Hari Kebangkitan Nasional tanggal (20 Mei);
 - (k) Hari berdirinya Ahmadiyah (27 Mei);
 - (l) Hari lahir Pancasila (1 Juni);
 - (m) HUT Polri ke 78 (1 Juli);
 - (n) Hari Koperasi (1 Juli);
 - (o) HUT Kejaksaan (22 Juli);
 - (p) Hari anak Nasional (23 Juli);
 - (q) Hari Pramuka (14 Agustus);
 - (r) Pidato kenegaraan Presiden RI (16 Agustus);
 - (s) Hari

- (s) Hari Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus);
 - (t) HUT Polwan (1 September);
 - (u) HUT Palang Merah Indonesia/PMI (17 September);
 - (v) Hari Tani (24 September);
 - (w) Pemberontakan G 30 S/PKI (30 September);
 - (x) Hari Kesaktian Pancasila (1 Oktober);
 - (y) HUT TNI (5 Oktober);
 - (z) Hari Santri (22 Oktober);
 - (aa) Hari Sumpah Pemuda (28 Oktober);
 - (bb) Hari Pahlawan (10 November);
 - (cc) HUT Brimob (14 November);
 - (dd) Hari Pohon Nasional (21 November);
 - (ee) HUT PGRI (25 November);
 - (ff) HUT Korpri (29 November);
 - (gg) Hari Penderita Cacat (3 Desember);
 - (hh) Hari Nusantara (13 Desember);
 - (ii) HUT BRI (16 Desember);
 - (jj) Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (20 Desember);
 - (kk) Hari Ibu (22 Desember).
- 3) agenda kegiatan pemerintah daerah
- (a) hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (27 April);
 - (b) hari ulang tahun kabupaten/kota se Sultra.
 - (1)) Kab. Konawe Utara (2 Januari);
 - (2)) Kab. Kolaka Utara (7 Januari);
 - (3)) Kab. Kolaka (28 Februari);
 - (4)) Kab. Konawe (3 Maret);
 - (5)) Kab. Konawe Kepulauan (12 April);
 - (6)) Kab. Kolaka Timur (22 April);
 - (7)) Kab. Konawe (2 Mei);
 - (8)) Kota Kendari (9 Mei);
 - (9)) Kab. Buton (10 Juni);
 - (10)) Kab. Buton Utara (2 Juli);
 - (11)) Kab. Muna (4 Juli);
 - (12)) Kab. Buton Tengah (23 Juli);
 - (13)) Kab. Buton Selatan (23 Juli);
 - (14)) Kab. Muna Barat (5 Oktober);
 - (15)) Kota Baubau (17 Oktober);
 - (16)) Kab. Bombana (18 Desember);
 - (17)) Kab. Wakatobi (18 Desember).
 - (c) kunjungan

- (c) kunjungan pejabat negara;
 - (d) sidang DPRD Prov/Kab/Kota;
 - (e) even pariwisata nasional Wakatobi Wave, Sail to Indonesia, festival Kesultanan Buton.
- 4) agenda kegiatan Partai Politik dan Ormas
- (a) HUT Partai Persatuan Pembangunan (5 Januari);
 - (b) Hari jadi Nahdatul Ulama tanggal (31 Januari);
 - (c) Musda MUI Prov. Sultra (22 s.d 24 Januari);
 - (d) Hari jadi Partai Nasdem (1 Februari);
 - (e) HUT Himpunan Mahasiswa Islam (5 Februari);
 - (f) HUT PWI dan Hari Pers Nasional (9 Februari);
 - (g) HUT PDIP tanggal (14 Februari);
 - (h) HUT Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (20 Februari);
 - (i) Musda DPD HIMPI Sultra 2022-2025 (26 Februari);
 - (j) Hari jadi PKS tanggal (20 April);
 - (k) Hari jadi PAN tanggal (23 April);
 - (l) HUT PBB (17 Juli);
 - (m) Hari jadi PKB (23 Juli);
 - (n) HUT KNPI (23 Juli);
 - (o) HUT Partai Demokrat (9 September);
 - (p) HUT Partai Golkar (20 Oktober);
 - (q) Hari jadi Muhammadiyah (18 November);
 - (r) Muswil dan Musda Parpol;
 - (s) Musyida IMM DPD Sultra di Baubau.
- 5) agenda kegiatan LSM/Mahasiswa.
- a) seminar/loka karya/dialog;
 - b) unjuk rasa;
 - c) pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan (BEM dan MPM Perguruan Tinggi/Universitas se Sultra);
 - d) Peringatan 3 tahun tragedi Pawai Budaya Tolaki (16 Desember).
- 6) hari peringatan peristiwa pelanggaran HAM
- a) kasus Trisakti (12 Mei);
 - b) peristiwa Semanggi I (13 November);
 - c) peristiwa Semanggi II (24 September);
 - d) peristiwa Tanjung Priok (12 September);
 - e) Bentrok Polri dan Mahasiswa Unhalu (27 Maret);
 - f) peringatan tahunan meninggalnya mahasiswa UHO pada aksi Unras anakhir (26 September).

2. Identifikasi masalah

- a. dampak ekonomi global terhadap stabilitas harga dalam negeri sehingga terjadi koreksi terhadap harga BBM dan tarif dasar listrik yang berujung pada aksi penolakan dari masyarakat yang memicu terjadinya unjuk rasa anarkhis, pengrusakan dan pembakaran;
- b. tingginya angka kejahatan konvensional, bila tidak diikuti dengan peningkatan penyelesaian tindak pidana tidak akan memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana;
- c. 3 (tiga) kabupaten belum memiliki Polres yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Selatan, sehingga mengakibatkan mobilitas personel tidak lancar terutama dalam memberikan bantuan pengamanan;
- d. kemampuan menyelesaikan perkara yang masih rendah dibandingkan dengan jumlah tindak pidana yang terjadi;
- e. terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polda Sulawesi Tenggara dalam mendukung tugas-tugas operasional dan pembinaan;
- f. terbatasnya sarana yang dimiliki Ditpolairud dalam melaksanakan pengamanan di wilayah perairan Sulawesi Tenggara;
- g. kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat yang relatif belum optimal karena kondisi geografis wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara yang terdiri dari kepulauan dimana sebagian masyarakatnya bermukim di daerah pesisir pantai dan pegunungan;
- h. partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif masih belum maksimal;
- i. tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan masih sangat rendah;
- j. konflik SARA terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki setiap kelompok yang dipengaruhi oleh rendahnya toleransi di masyarakat. Adanya kelompok identitas mengatasnamakan suku maupun golongan tertentu menjadi pemicu munculnya konflik antar etnis/suku, paham politik saat ini juga berperan dalam menciptakan kebencian antar suku/etnis dan umat beragama sehingga memicu timbulnya tindakan kekerasan yang berujung terjadinya konflik SARA;
- k. transformasi digital dan kesenjangan digital masyarakat akan menimbulkan informasi asimetris yang berakibat pada segregasi, konflik dan kekerasan.

II TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan peran Polri dalam pemerintahan, maka tujuan dan sasaran Polda Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Polda Sultra Tahun 2025-2029. Adapun Tahapan kebijakan yang ingin dicapai pada tahun 2025 yaitu *“Polda Sultra Siap mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*.

1. visi dan misi.

a. visi dan misi Polri.

1) visi Polri.

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat.”.

2) misi Polri.

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat”.

b. visi dan misi Polda Sulawesi Tenggara.

1) visi Polda Sulawesi Tenggara.

Mengacu pada visi Polri maka visi Polda Sulawesi Tenggara adalah “Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat”.

2) misi Polda Sulawesi Tenggara.

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat”.

2. Tujuan jangka menengah.

a. tujuan jangka menengah Polri.

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- 2) menegakkan hukum secara adil, transparan, legal, humanis dan setara;
- 3) mewujudkan SDM Polri yang cerdas, profesional dan berintegritas;
- 4) membangun sarana dan prasarana Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan;
- 5) mentransformasi Polri menuju organisasi sipil yang rasional, modern, profesional dan akuntabel.

b. tujuan jangka menengah Polda Sulawesi Tenggara.

- 1) memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara;
- 2) menegakkan hukum secara adil, transparan, legal, humanis dan setara;
- 3) mewujudkan SDM Polda Sultra yang cerdas, profesional dan berintegritas;
- 4) mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana Polda Sultra yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan;
- 5) mentransformasi Polri menuju organisasi sipil yang rasional, modern, profesional dan akuntabel.

3. Sasaran

3. Sasaran prioritas.

a. sasaran prioritas Polri tahun 2025

- 1) memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia Secara Proaktif;
- 2) mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Semakin Inovatif Berbasis Digital;
- 3) menegakan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara;
- 4) mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Cerdas, Berintegritas dan Profesional;
- 5) mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)*;
- 6) meningkatkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian.

b. sasaran prioritas Polda Sultra tahun 2025

- 1) memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Sulawsesi Tenggara Secara Proaktif;
- 2) mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polda Sultra yang Semakin Inovatif Berbasis Digital;
- 3) menegakan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara;
- 4) mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Cerdas, Berintegritas dan Profesional;
- 5) mengusulkan Pengembangan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan berdasarkan skala prioritas;
- 6) meningkatkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian.

III ARAH KEBIJAKAN

1. Kebijakan Polri Tahun 2025.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri tahun 2025, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Sasaran Prioritas I “Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia Secara Proaktif”, terdiri dari 12 (dua belas) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kinerja Polri dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- 2) menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;
- 3) mengoptimalkan kegiatan “*Pemolisian Prediktif*” dalam rangka *Harkamtibmas* guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;

4) mengedepankan

- 4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis;
- 5) meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;
- 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan “*Slum Area*”;
- 7) melaksanakan kegiatan pengamanan *event* nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2025;
- 8) melaksanakan “*back up*” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan;
- 9) meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;
- 10) melaksanakan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut;
- 11) mendukung kegiatan tahapan pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2025;
- 12) meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polri dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polri melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial ditengah masyarakat; (*Giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) melakukan penyelidikan dengan fokus pada potensi terjadinya T.P Terorisme, ancaman aksi radikalisme dan pemetaannya; (*Giat 3143/Prog Lidik Sidik/SP1/SS2/IKUa*);
 - c) penguatan program Polmas guna mengoptimalkan penggelaran satu Bhabinkamtibmas untuk satu desa/kelurahan dalam mendukung harkamtibmas; (*Giat 3128, 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - d) meningkatkan kualitas hasil penelitian dan survei yang akuntabel dalam rangka mendukung pengukuran Indeks Kamtibmas Polri; (*Giat 5067/Prog Dukma/SP1/SS5/IKPe*);

2) arah

2) arah bijak: menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan sambang serta optimal dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat; (*Giat 3114, 3128, 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- b) melakukan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media *online* maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme; *giat 3143/Prog Lidik Sidik/giat 3128, 5076/Prog Harkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa*);
- c) meningkatkan pelibatan peran *civil society* dan tokoh agama yang lgaras (Ideologi Garis Keras) dan yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme; (*Giat 3143/Prog Lidik Sidik/giat 3128, 5076/ Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- d) melaksanakan sosialisasi dan kolaborasi dengan “*stakeholder*” dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap eks napi terorisme beserta keluarganya; (*Giat 3143/Prog Lidik Sidik,5076/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*)
- e) menetralsir informasi negatif ditengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; (*Giat 3149/Prog Dukma/SP1/SS5/IKPc*);
- f) melaksanakan “*edukasi*” dan himbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan melalui produksi konten kreatif, melaksanakan *press release* tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri; (*Giat 3070, 3149/Prog Dukma/SP1/SS5/IKPg*);
- g) meningkatkan kegiatan Patroli di wilayah rawan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan penyelundupan barang ilegal serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan ditempat obvit/ obvitnas dan destinasi pariwisata; (*Giat 3130, 3131, 5081/Prog Harkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa*);

3) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan “*Pemolisian Prediktif*” dalam rangka *Harkamtibmas* guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya; *giat 5076/Prog Harkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa*);

b) peningkatan

- b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus; (*Giat 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - c) pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP; (*Giat 3133, 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada masyarakat pengguna jalan; (*Giat 3133/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 4) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik secara humanis; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengedepankan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; (*Giat 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) mengorganisasikan kegiatan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang positif. (*Giat 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - c) penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik dilakukan secara humanis pada saat dan pasca konflik; (*Giat 5087/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 5) arah bijak: meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;
- untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli ditengah masyarakat; (*Giat 3130, 3133/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan diwilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas; (*Giat 3130, 3133/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan diobvit/obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung “*Pertumbuhan Ekonomi*” serta berperan aktif ditengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas; (*Giat 3131/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 6) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan “*Slum Area*”;
- untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi “*ketanggapsegeraan*” dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan kriminalitas yang berintensitas tinggi, bencana serta wabah; (*Giat 5087/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) menyelenggarakan.....

- b) menyelenggarakan dan mendukung pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personil Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa; (*Giat 3130, 5081, 5087/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - c) memetakan Desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh “*Bhabinkamtibmas*” yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang terkena saat dan pasca bencana; (*Giat 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - d) bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan “*pelayanan Kesehatan*” dan “*trauma healling*” pada daerah rawan gempa dan bencana; (*Giat 3072, Prog Dukma, giat 3110, Prog Profesionalisme SDM/SP1/SS3/IKPa/SS5/IKPe*);
- 7) arah bijak: melaksanakan kegiatan pengamanan *event* nasional/ internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2025; untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Brimob Polri dan fungsi Kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pembangunan IKN serta saat *event* nasional/internasional berlangsung; (*Giat 5079, 5080, 5087/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) melaksanakan pengamanan *event* nasional PON XXI tahun 2025 di Propinsi Sumatera Selatan, Festival Olahraga Nasional (Fornas) di NTB, Pameran Dagang Nasional, Festival Budaya Nasional/Nusantara, Cap Go Meh; (*Giat 5079, 3130, 3133/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - c) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada *event* internasional meliputi: KTT, ASEAN, *Multilateral Naval Exercise (MNE)* Komodo, Sail Cendrawasih, Motto GP/WSBK Mandalika 2025, Kejuaraan Dunia Bola Voli 2025, Marathon Bali 2025, Piala Dunia U-20 2025, Pam F-1 H-20 Power Boat Sumut 2025 dan Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025; (*Giat 3130, 3133, 5079, 5087/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - d) melaksanakan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur; (*Giat 3130, 3133, 5079, 5087/Prog Harkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa*);
- 8) arah bijak: melaksanakan “*back up*” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan;
- untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengkoordinasikan kesiapan personel Polri agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka *back up* pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah rawan konflik; (*Giat 3130, 5076, 5087/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

b) membangun.....

- b) membangun kerja sama dan sinergitas dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif; (*Giat 5076, 5087, 5080/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - c) melaksanakan *back up* pengamanan kegiatan ditengah masyarakat yang sedang beraktivitas; (*Giat 3130, 3131, 3133/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - d) melaksanakan *back up* kegiatan pengamanan di kawasan Obvitnas dan objek tertentu; (*Giat 3131/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - e) melaksanakan kegiatan *back up* pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya Narkoba; (*Giat 5081/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 9) arah bijak: meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;
- untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan kerja sama dalam negeri antara Polri dan Kementrian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi dengan "*stakeholder*" terkait; (*Giat 3120/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) meningkatkan kerja sama internasional guna mendukung kerja sama Kepolisian Internasional, Organisasi Internasional dan kerja sama bilateral serta multilateral dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dunia untuk meningkatkan citra positif Polri/ Indonesia di mata internasional; (*Giat 3122/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - c) meningkatkan kerja sama keamanan dan ketertiban internasional di wilayah perbatasan NKRI; (*Giat 3122/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 10) arah bijak: melaksanakan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut; untuk mewujudkan arah bijak 10, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan kegiatan patroli kapal Polri dan "*back up*" di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum; (*Giat 3134, 4342/Prog Harkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa*);
 - b) melaksanakan "*back up*" patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan yang rawan kejahatan; (*Giat 3135/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 11) arah bijak: mendukung kegiatan tahapan pengamanan *event* nasional/ internasional tahun 2025;
- untuk mewujudkan arah bijak 11, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melaksanakan

- a) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/internasional tahun 2025 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan; (*Giat, 3130/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) menyelenggarakan pengamanan objek vital dilokasi *event*; (*Giat 3130, 3131, 3135/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - c) melaksanakan pengamanan *event* nasional tahun 2025 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi; (*Giat 5087/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - d) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2025; (*Giat 5079/Prog Harkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa*);
- 12) arah bijak: meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;
untuk mewujudkan arah bijak 12, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) membangun kolaborasi operasional Polri bersama K/L terkait dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (*pre-emptif, preventif* dan Melakukan *penegakan hukum*) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut; (*Giat, 3130, 5087, 3134/Prog Harkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa*);
 - b) melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan patroli, penjagaan dan pelacakan di wilayah rawan kejahatan serta obvit/obvitnas serta penguatan Polri di perbatasan dan pulau berpenghuni; (*Giat 3130, 3131, 3135, 5081/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- b. Sasaran Prioritas II “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Semakin Inovatif Berbasis Digital”, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:
- 1) mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polri yang berbasis TIK;
 - 2) meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
 - 3) mengoptimalkan “*ketanggapsegeraan*” dalam melayani masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:
- 1) arah bijak: mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polri yang berbasis TIK;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) peningkatan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian; (*Giat 3133/Prog Harkamtibmas/SP2/SS1/IKUa*);
 - b).mengoptimalkan

- b). mengoptimalkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor; (*Giat 3133/Prog Harkamtibmas/giat 3071, 5055/Prog Dukma/SP2/ SS1/IKU1*);
 - c). melakukan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi *afirmatif* (menguatkan) di kawasan perbatasan; (*Giat 3133, 3071, 3084, 5055/Prog Harkamtibmas, Prog Dukma/SP2/ SS4/IKP4b*);
 - d). melakukan update informasi dan dokumentasi pada layanan/ laman *website humaspolri.go.id* secara berkala; (*Giat 3149/Prog Harkamtibmas/Prog Dukma/SP2/SS1/IKPg*);
- 2) arah bijak: meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
- untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a). meningkatkan inovasi dan perbaikan pelayanan Intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK *online*; (*Giat 3112/Prog Harkamtibmas/SP2/SS1/IKUa*);
 - b). melaksanakan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran; (*Giat 3072/Prog Dukma/SP2/SS5/IKP5e*);
 - c). mengoptimalkan proses integrasi *Binmas Online System (BOS) V2* dengan *Online Single Submission (OSS)* dalam penerbitan surat ijin operasional BUJP; (*Giat 5076/Prog Harkamtibmas/SP2/SS4/IKP4d*);
- 3) arah bijak: mengoptimalkan “ketanggapsegeraan” dalam melayani masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a). melanjutkan, melaksanakan monev dan terus mengkaji guna merespon aturan/SOP dipelayanan publik yang berbelit-belit; (*Giat 4340/Prog Dukma/SP2/SS5/IKP5g*);
 - b). mengoptimalkan “*Respon Time*” dalam memberikan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban; (*Giat 5081/Prog Harkamtibmas/SP2/SS1/IKU1*);
 - c). meningkatkan dan merespon pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit; (*Giat 3130, 3131/Prog Harkamtibmas/SP2/SS1/IKU1*);
- c. Sasaran Prioritas III “Menegakan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara” terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:
- 1) mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;

2) melaksanakan.....

- 2) melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di era digital dan kemajuan teknologi;
- 3) mewujudkan proses penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum;
- 4) mengoptimalkan peran pusat data dan informasi kriminal nasional;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) Arah bijak: mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 11 (sebelas) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Indonesia; (*Giat 3134, 4342/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - b) melakukan penyelidikan terhadap ancaman tindak pidana terorisme, dan penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (*Giat 3143/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - c) meningkatkan pengungkapan tindak pidana dengan prioritas pada tindak pidana korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba, segala bentuk jenis perjudian, penyeludupan, terorisme, lingkungan hidup, siber serta kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (*Giat 3140, 3142, 3143, 3144, 3151, 3145, 3146, 5083, Prog Lidik Sidik/ SP3/SS2/IKUb*);
 - d) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian dibidang pangan, pertanahan, energi, investasi, perbankan dan sektor keuangan; (*Giat 3142, 3145, 5083/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - e) melaksanakan penindakan tindak pidana di perairan dalam mendukung kegiatan keamanan laut dan perairan Indonesia; (*Giat 4342/Prog Sidik Lidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - f) melaksanakan penanganan terhadap tindak pidana di bidang lalu lintas (kejahatan dan pelanggaran) dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas; (*Giat 3133, Prog Harkamtibmas; Giat 4343, Prog Sidik Lidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - g) melanjutkan pelaksanaan penyelesaian perkara melalui “*Restorative Justice*” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan; (*Giat 3142/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - h) mengoptimalkan penanganan kejahatan siber (*cyber crime*) termasuk edukasi masyarakat tentang bahaya kejahatan siber; (*Giat 3151, Prog Lidik Sidik; giat 5076, Pog Harkamtibmas/SP3/SS2/IKUb*);
 - i) melaksanakan penindakan hukum terbatas/tipiring dalam Harkamtibmas; (*Giat 3130/Prog Harkamtibmas/SP3/SS2/IKUb*);
 - j) mempercepat penyelesaian perkara-perkara yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat; (*Giat 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3151/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - k) memberikan.....

- k) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti. (*Giat 3140,3141/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUb*);
- 2) arah bijak: melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di era digital dan kemajuan teknologi;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri; (*Giat 3100/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP3/SS3/IKPa*);
 - b) meningkatkan kualitas dan kemampuan pemeriksa baik *Labfor* dan *Inafis* dalam mengungkap tindak pidana; (*Giat 3100/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP3/SS3/IKPa*);
- 3) arah bijak: mewujudkan proses penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) senantiasa memberikan *SP2HP2* kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir *komplain* dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan hukum dan menjunjung tinggi HAM sebagai bentuk pelayanan kepada pelapor/korban dan tersangka; (*Giat 3137, 5086/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUa*);
 - b) mengoptimalkan peran “*Waskat*” atasan penyidik dan peran dari wassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (*Giat 5086/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUa*);
 - c) mengoptimalkan penggunaan *e-MP* (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi; (*Giat 5086/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUa*);
- 4) arah bijak: mengoptimalkan peran pusat data dan informasi kriminal nasional;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan mengintegrasikan seluruh “*database*” pelayanan dan penyajian informasi kriminal dari seluruh satker di lingkungan Polri dan institusi penegak hukum lainnya; (*Giat 5084/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUa*);
 - b) melanjutkan pelaksanaan standarisasi data kriminal nasional (melalui *Integrated Smart Criminal Information System*); (*Giat 5084/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUa*);
- d. Sasaran Prioritas IV “Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Cerdas, Berintegritas dan Profesional” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era digital dan kemajuan teknologi;
 - 2). mengoptimalkan

- 2) mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Polri yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- 3) meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul dan humanis di era digital dan kemajuan teknologi;
- 4) melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;
- 5) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
- 6) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era digital dan kemajuan teknologi;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 9 (sembilan) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan mutu dari lulusan Diklat Polri agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas Polri kedepan; (*Giat 5068, 5069/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPb*);
 - b) melaksanakan sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/instruktur dan pengasuh; (*Giat 3100/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPb*);
 - c) meningkatkan pelaksanaan latihan dan harkatpuan fungsi “*Dalmas dan Negosiator*” yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka menghadapi pengamanan *event* nasional/ internasional tahun 2025; (*Giat 3100/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPb*);
 - d) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang “*Menjunjung Tinggi HAM*” dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas; (*Giat 3100, 5076, 3130, 5087/Prog Profesionalisme SDM Polri, Prog Harkamtibmas/SP4/SS3/IKPb*);
 - e) meningkatkan kapasitas SDM Polri di bidang Siber dan forensik dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas dan pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2025; (*Giat 3100, Prog Profesionalisme SDM Polri; Giat 3141, 3151, Prog Lidik Sidik/SP4/SS3/IKPb*);
 - f) meningkatkan jumlah peserta sertifikasi profesi bagi anggota penyidik Reskrim, Polair Korpolaairud Baharkam Polri serta Korlantas Polri dalam rangka mengantisipasi penerapan KUHP baru; (*Giat 3100/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPb*);
 - g) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah bagi anggota Polri dan ASN Polri; (*Giat 3100, 4341/Prog Profesionalisme SDM, Prog Modernisasi Almtsus Sarpras Polri/SP4/SS3/IKPb*);

h) meningkatkan

- h) meningkatkan kapasitas personel kedokteran kepolisian guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta personel Polri dan keluarganya; (*Giat 3072, Prog Dukma; Giat 3100 Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/ SS3/IKPb*);
 - i) meningkatkan kualitas dan kapabilitas para Verifikator dan APIP dilingkungan Polri dalam upaya tertib administrasi keuangan serta mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi; (*Giat 3068, 3091/Prog Dukma/SP4/SS3/IKPb*);
- 2) arah bijak: mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayan publik di lingkungan Polri yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri antara lain melalui optimalisasi penggunaan SPBE; (*Giat 5052/Prog Dukma/SP4/SS5/IKPe*);
 - b) mewujudkan pelayanan publik Polri yang berkualitas dan terpercaya berbasis digital; (*Giat 5053/Prog Dukma SP4/SS5/IKPe*);
- 3) arah bijak: meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul dan humanis di era digital dan kemajuan teknologi;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 8 (delapan) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan pemantapan program rekrutmen proaktif guna memperoleh anggota Polri yang berkualitas secara terpadu dan berbasis T.I (*Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward*); (*Giat 3107/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
 - b) melanjutkan persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif melalui program manajemen talenta; (*Giat 3108/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
 - c) mempersiapkan kader pimpinan Polri melalui pembinaan karier yang berbasis meritokrasi, bersih dan bebas dari praktik KKN; (*Giat 3108, Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
 - d) melaksanakan rekrutmen bagi pegawai negeri pada Polri sesuai kebutuhan organisasi secara Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus berbasis teknologi informasi untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas berdasarkan kebijakan *zero growth*, dengan target pemenuhan personel (rekrutmen) tahun 2025 sebanyak 7.000 orang untuk pendidikan pembentukan Polri meliputi: Akpol, SIPSS, Bintara Polri, Tamtama Polri dan ASN; (*Giat 3107, Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
 - e) melaksanakan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri untuk meningkatkan kompetensinya tahun 2025 sebanyak 19.381 orang terdiri dari: Lemhanas 60 orang, Sespimti 75 orang, Sespimmen 200 orang, S-2 KIK-UI 20 Orang, S-3 STIK-PTIK 20 orang, S-2 STIK-PTIK 30 orang, S-1

STIK-PTIK 200 orang, S-2 MSDM-UI 20 orang, Sespimma 300 orang, Sekolah Inspektur Polisi (SIP) 2.500 orang, Pendidikan Alih Golongan (PAG) 1.500 orang, Sekolah Bintara Polisi (SBP) 300 orang, Intel LN 60 orang, UDKP/I PNS 400 orang, PKN I 30 orang, PKN II 70 orang, PKA 120 orang, PKP 120 orang, Kermadik Gassus 300 Orang, SPPK 70 Orang, Dikbangspers 12.986 orang; (*Giat 3107, Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);

- f) melaksanakan seleksi Dikbangsum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif; (*Giat 3107/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
 - g) melaksanakan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif; (*Giat 3104/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
 - h) menyiapkan dan mengelola personel Polri sebanyak 1.667 Pers yang akan ditugaskan di IKN secara bertahap; (*Giat 3108/Profesionalisme SDM/ SP4/SS3/IKPa*);
- 4) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan rintisan dan perpanjangan MoU Kermadik Dagri dan Lugri; (*Giat 3100/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
 - b) melanjutkan kerja sama dengan Lembaga/Asosiasi sertifikasi dalam dan luar negeri; (*Giat 3100, 3120, 3122/Prog Profesionalisme SDM Polri, Prog Harkamtibmas/SP4/SS3/IKPa*);
 - c) menyelenggarakan kerja sama dengan *stakeholder*, terkait penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT)* di tingkat Polda; (*Giat 3108/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
- 5) arah bijak: melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja; untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan penyempurnakan standar penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan "*sistem reward and punishment*" serta sistem *reward* terhadap kualifikasi personil Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat; (*Giat 3108/Prog Profesionalisme SDM Polri/ SP4/SS3/IKPa*);
 - b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung "*program manajemen talenta*"; (*Giat 3108/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);

c) optimalisasi.....

- c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP guna menerapkan *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya; (*Giat 3108/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
- d) meningkatkan jumlah assesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus; (*Giat 3100, 3108, 5076/Prog Profesionalisme SDM Polri, Harkamtibmas/ SP4/SS3/IKPa*);
- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja;
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada anggota Polri dan keluarganya serta pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polri dan masyarakat; (*Giat 3072, Prog Dukma/SP4/SS5/IKPe*);
 - b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan *user friendly*; (*Giat 3072, 3105/Prog Dukma, Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/ SS5/IKPe*);
 - c) meningkatkan pelayanan administrasi pegawai bagi anggota Polri, menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan *user friendly* termasuk berkaitan dengan ASABRI; (*Giat 3105/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS5/IKPe*);
 - d) melanjutkan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS); (*Giat 3072, 5062/Prog Dukma/SP4/SS5/IKPe*);
- e. Sasaran Prioritas V “Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)*” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) mendorong peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri;
 - 3) pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan mendorong pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan;
 - 4) melanjutkan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap;
 - 5) melanjutkan pembangunan dan pengembangan Almatsus *Scientific Criminal Investigation (SCI)*;
 - 6) membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;

Dengan.....

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: memenuhi sarana dan prasarana dan Almitsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 13 (tiga belas) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terintegrasi secara *online*; (Giat 5062, 3071/Prog Modernisasi Almitsus Sarpras Polri/SP5/SS4/ IKPb);
 - b) pemenuhan Almitsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insurjensi dan pemeliharaan keamanan; (Giat 5060, 3084/Prog Modernisasi Almitsus Sarpras Polri/SP5/SS4/ IKPb);
 - c) melanjutkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi fungsi lalu lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan gedung BPKB *prototype* dan gedung Satpas *prototype*; (Giat 3071, Prog Dukma; Giat 3133, Prog Harkamtibmas; Hiat 3084, 5060, Prog Modernisasi Almitsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb);
 - d) melanjutkan pengembangan Pembangunan Indonesia Safety Driving Center; (Giat 5060, 5062, 3133/Prog Modernisasi Almitsus Sarpras Polri, Prog Harkamtibmas/SP5/SS4/IKPb);
 - e) melanjutkan dan meningkatkan pembangunan RTMC/TMC; (Giat 5060, 5062 ,3133/Prog Modernisasi Almitsus Sarpras Polri2, Prog Harkamtibmas/SP5/SS4/IKPb);
 - f) melanjutkan pembangunan/pemasangan ETLE guna menegakkan hukum secara transparan di jalan raya; (Giat 5060, 3084, 3133/Prog Modernisasi Almitsus Sarpras Polri, Prog Harkamtibmas/SP5/SS4/IKPb);
 - g) pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum; (Giat 5060, 5062/Prog Modernisasi Almitsus Sarpras Polri/SP5/SS4/ IKPb);
 - h) melanjutkan Litbang guna pembuatan *prototype* peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini; (Giat 5067, 5060, 3084/Prog Dukma, Prog Modernisasi Almitsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb);
 - i) membangun dan mengembangkan sistem komunikasi di wilayah perbatasan, Pulau Terluar dan wilayah rawan bencana; (Giat 5055, 5060, 3084,/Prog Dukma, Prog Modernisasi Almitsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb);
 - j) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpkam dan Almitsus Polri terkini (Min dan Maks); (Giat 5060, 5051/Prog Modernisasi Almitsus Sarpras Polri/SP5/SS4/ IKPb);
 - k) pemenuhan.....

- k) pemenuhan peralatan penanganan awal Bencana, Karhutla dan Banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka pertolongan pertama; (*Giat 5060, 3084/Prog Modernisasi Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);
 - l) pemenuhan kendaraan listrik guna mendukung program pemerintah di bidang energi terbarukan; (*Giat 3084, Prog Modernisasi Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);
 - m) pemenuhan Almatsus/Alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan nasional/internasional 2025, Perbatasan dan Destinasi Wisata; (*Giat 3084/Prog Modernisasi Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);
- 2) arah bijak: mendorong peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan kerja sama dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN) dalam pembuatan *prototype*, berikut melakukan Standarisasi dan Sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri; (*Giat 5060/Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*)
 - b) mendorong dan mensosialisasikan penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Almatsus dan Alsus Polri; (*Giat 4341/Prog Modernisasi Almasus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);
- 3) arah bijak: pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan mendorong pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan usulan pembangunan fasilitas Kantor Pusat Polri di IKN dan pembangunan Mako Polres/Polrestabes kawasan IKN; (*Giat 5062, Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*))
 - b) melanjutkan pembangunan fasilitas perkantoran, pergudangan, rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri di seluruh wilayah termasuk di wilayah perbatasan, terjauh dan terluar Indonesia; (*Giat 5062, Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*)
 - c) melanjutkan pembangunan dan meningkatkan Faskes (Rumah sakit, Poliklinik, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya) dalam rangka memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya serta guna mendukung "*Reformasi Sistem Kesehatan Nasional*"; (*Giat 5060, 5062, Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);;
- 4) arah bijak: melanjutkan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat strategi yang akan dilakukan yaitu:

melanjutkan

melanjutkan pembangunan pengembangan laboratorium forensik beserta rumah dinasnya di tingkat kewilayahan dalam rangka mendukung percepatan pengungkapan kasus tindak pidana; (*Giat 5062/Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);

- 5) arah bijak: melanjutkan pengembangan Almatsus *Scientific Criminal Investigation* SCI;

untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pembangunan dan pengembangan pemenuhan peralatan laboratorium forensik dengan teknologi terkini; (*Giat 3084, Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);
- b) melanjutkan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana identifikasi kepolisian terkini guna mendukung pengungkapan kasus tindak pidana serta pelayanan publik kepolisian; (*giat 3084, Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/ SS4/IKPb*);

- 6) arah bijak: membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi komunikasi dan informatika kepolisian modern yang terintegrasi secara bertahap; (*Giat 3071, 5055, Prog Dukma; Giat 3084, Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);
- b) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/*hotline* kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat; (*Giat 5055, 5062/Prog Dukma, Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);
- c) mengembangkan teknologi kepolisian dan sistem informasi berdasarkan hasil penelitian; (*Giat 3084, 5067/Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri, Prog Dukma/SP5/SS4/IKPb*);

- f. Sasaran Prioritas VI “Meningkatkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:

- 1) melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;
- 2) melanjutkan dan mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli, pencegahan bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal di lingkungan internal Polri;
- 3) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi dan gratifikasi di internal Polri;
- 4) meningkatkan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
- 5) melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;

6) meningkatkan

- 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu guna meningkatkan kepercayaan masyarakat; (*Giat 3089, 3091, Prog Dukma/SP6/SS5/IKPg*);
- b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*; (*Giat 3091, 3089/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPg*);
- c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal* dengan berbasis T.I; (*Giat 3091, 3089/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPg*);

- 2) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli, pencegahan bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal di lingkungan internal Polri;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan dan meningkatkan sinergitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli serta pelaporan yang terintegrasi; (*Giat 3091/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPg*);
- b) mendorong pelayanan publik secara *online* yang bersih transparan dan akuntabel berbasis *Medsos/Whatsapp*; (*Giat 3091, 3149/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPg*);
- c) mengoptimalkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli, bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal; (*Giat 3091, Prog Dukma/SP6/SS5/IKPg*);
- d) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan, Personel, Baket) terkait rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS dari segala bentuk Pungli; (*Giat 3089, 3090/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPg*);
- d) melanjutkan pelaksanaan pengamanan Kegiatan Personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/ PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1 dari segala bentuk Pungli; (*Giat 3089, 3090/ Prog Dukma/SP6/SS5/IKPg*);
- f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan "*operasi bersih*" diinternal dan di sentra pelayanan publik Polri baik terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK,BPKB, SKCK); (*Giat 3089, 3090/ Prog Dukma/SP6/SS5/IKPg*);

3) arah

- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan peran serta seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System (WBS)*. Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi; (*Giat 3089, 3090, 3091/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);
- b) melanjutkan sosialisasi “Perkap Nomor 8 Tahun 2017” tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Perkap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; (*Giat 3091/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);

- 4) arah bijak: meningkatkan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan, penganggaran, dan kinerja Satker agar lebih efektif dan efisien guna meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri; (*Giat 3068, 3091, 4339, Prog Dukma/SP6/SS5/IKPF*);
- b) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas penginputan kebutuhan Polri dalam *e-Jakstra* dalam penyusunan produk perencanaan dan penganggaran Polri yang berkualitas guna menyelaraskan pembangunan di lingkungan Polri; (*Giat 5051, Prog Dukma/SP6/SS5/IKPF*);
- c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tata kelola keuangan tingkat Satker; (*Giat 3068, 3091, 4339, 5054/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPF*);
- d) melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja dan anggaran di bidang pembinaan dan operasional; (*Giat 3068, 4339, 3091, 5054/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPF*);

- 5) arah bijak: melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;

untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan

- a) melanjutkan dan melaksanakan *movev* pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap; (*Giat 5052/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);
 - b) melanjutkan penguatan organisasi pada tingkat Mabes Polri dan Satuan Kewilayahan sesuai dengan dinamika perkembangan situasi Kantibmas dan daerah otonomi baru; (*Giat 5052, Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);
 - c) melaksanakan perubahan peraturan kepolisian tentang SOTK tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor; (*Giat 5052, Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);
- 6) arah bijak: meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk mempedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/*stakeholder* terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat; (*Giat 5053/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);
- b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/ Polrestabes dan Polres Metro, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (*Giat 5053/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);
- c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi aktif dalam pembinaan keberlanjutan dan replika inovasi pelayanan publik (PKRI); (*Giat 5053, Prog Dukma/SP6/ SS5/IKPd*);
- d) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Satker/ Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian satker/satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM; (*Giat 5053/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*).

2. Kebijakan Polda Sultra Tahun 2025.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Sultra tahun 2025, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Sasaran Prioritas I “Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara Secara Proaktif”, terdiri dari 10 (sepuluh) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kinerja Polda Sultra dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- 2) menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;
- 3) mengoptimalkan kegiatan “*Pemolisian Prediktif*” dalam rangka *Harkamtibmas* guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
- 4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis;
- 5) meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;
- 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan “*Slum Area*/daerah kumuh”;
- 7) melaksanakan “*back up*” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan;
- 8) melaksanakan penggelaran patroli kapal di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara guna mendukung kegiatan keamanan laut
- 9) mendukung kegiatan tahapan pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2025
- 10) meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan di wilayah pulau -pulau berpenghuni

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polda Sultra dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polri melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di tengah masyarakat; (*Giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

b) penguatan

- b) penguatan program Polmas guna mengoptimalkan penggelaran satu Bhabinkamtibmas untuk satu desa/kelurahan dalam mendukung harkamtibmas; (*Giat 3128, 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 2) arah bijak: menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan sambang serta optimal dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat; (*Giat 3114, 3128, 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) melakukan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media *online* maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme; (*Giat 3128, 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/ SS1/IKUa*);
 - c) meningkatkan pelibatan peran *civil society* dan tokoh agama yang lgaras (Ideologi Garis Keras) dan yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme; (*Giat 3128, 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/ SS1/IKUa*);
 - d) melaksanakan sosialisasi dan kolaborasi dengan “*stakeholder*” dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap eks nabi terorisme beserta keluarganya; (*Giat 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*)
 - e) menetralsir informasi negatif di tengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; (*Giat 3149/ Prog Dukma/SP1/SS5/IKPc*);
 - f) melaksanakan “*edukasi*” dan imbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan penyelundupan barang ilegal melalui produksi konten kreatif, melaksanakan *press release* tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri; (*Giat 3070, 3149/Prog Dukma/SP1/SS5/IKPc*);
 - g) meningkatkan kegiatan Patroli di wilayah rawan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan penyelundupan barang ilegal serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata; (*Giat 3130, 3131, 5081, Prog Harkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa*);
- 3) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan “*Pemolisian Prediktif*” dalam rangka *Harkamtibmas* guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melaksanakan

- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya termasuk dari bahaya perjudian, penyelundupan manusia dan barang ilegal; (*Giat 5076, Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus; (*Giat 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/ SS1/IKUa*);
 - c) pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP; (*Giat 3133, 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada masyarakat pengguna jalan; (*Giat 3133/Prog Harkamtibmas/SP1/ SS1/IKUa*);
- 4) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik secara humanis; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang dilakukan yaitu:
- a) mengedepankan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; (*Giat 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) mengorganisasikan kegiatan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang positif; (*Giat 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - c) penggelaran pasukan Satbrimob Polda Sultra dalam pengamanan konflik dilakukan secara humanis pada titik masalah baik sebelum, saat dan pasca konflik didukung sumber daya manusia yang profesional dan Sarpras yang modern; (*Giat 5087/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/ IKUa*);
- 5) arah bijak: meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;
- untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli ditengah masyarakat; (*Giat 3130, 3133/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/ IKUa*);
 - b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas; (*Giat 3130, 3133/Prog Harkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa*);
 - c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan Ditobvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung “Pertumbuhan Ekonomi” serta berperan aktif ditengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas; (*Giat 3131/Prog Harkamtibmas/SP1/ SS1/IKUa*);

6) arah

- 6) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan “Slum Area”;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) personel Brimob Polda Sultra yang mampu digerakkan dalam menghadapi “ketanggapsegeraan” dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan kriminalitas yang berintensitas tinggi, bencana serta wabah; (Giat 5087/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- b) menyelenggarakan dan mendukung pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personil Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa; (Giat 3130, 5081, 5087/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- c) memetakan Desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh “Bhabinkamtibmas” yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang terkena saat dan pasca bencana; (Giat 5076/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- d) bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan “pelayanan Kesehatan” dan “trauma healing” pada daerah rawan gempa dan bencana; (Giat 3072, Prog Dukma, Giat 3110, Prog Profesionalisme SDM/SP1/SS3/IKPa/SS5/IKPc);

- 7) arah bijak: melaksanakan “back up” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan stakeholder terkait penanganan gangguan keamanan;

untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan koordinasi kesiapan personel Polda Sultra agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka back up pengamanan di wilayah rawan konflik; (Giat 3130, 5076, 5087/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- b) membangun kerja sama dan sinergitas dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (stakeholder) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif; (Giat 5076, 5087, 5080/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- c) melaksanakan back up pengamanan kegiatan ditengah masyarakat yang sedang beraktivitas; (Giat 3130, 3131, 3133/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- d) melaksanakan back up kegiatan pengamanan di kawasan Obvitnas dan objek tertentu; (Giat 3131/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- e) melaksanakan kegiatan back up pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya narkoba; (Giat 5081/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- 8) arah bijak: meningkatkan kerja sama Kepolisian negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;
untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 2 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan kerja sama antara Polda Sultra dan Kementrian/ Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi dengan “*stakeholder*” terkait; (*Giat 3120/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) melaksanakan kerja sama antara Polda Sultra dan seluruh elemen masyarakat (Toga, Toda dan Tomas) dalam rangka meningkatkan keamanan di wilayah Sultra; (*Giat 3120/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 9) arah bijak: melaksanakan penggelaran patroli kapal di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara guna mendukung kegiatan keamanan laut; untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- meningkatkan kegiatan patroli di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum; (*Giat 3134/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 10) arah bijak: mendukung kegiatan tahapan pengamanan *event* nasional/ internasional tahun 2025;
untuk mewujudkan arah bijak 10, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/internasional tahun 2025 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan; (*Giat, 3130/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) menyelenggarakan pengamanan objek vital dilokasi *event*; (*Giat 3130, 3131/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - c) melaksanakan pengamanan *event* nasional tahun 2025 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi; (*Giat 5087/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - d) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2025; (*Giat 5079/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 11) arah bijak: meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan diwilayah pulau -pulau berpenghuni;
untuk mewujudkan arah bijak 11, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) membangun kolaborasi operasional Polri bersama K/L terkait dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pulau pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (*pre-emptif, preventif* dan Melakukan *penegakan hukum*) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut; (*Giat 3130, 5087, 3134/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) melaksanakan

- b) melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan patroli, penjagaan dan pelacakan di wilayah rawan kejahatan serta obvit/obvitnas serta penguatan Polri di wilayah pulau-pulau berpenghuni; (*Giat 3130, 3131, 5081/Prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- b. Sasaran Prioritas II “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polda Sultra yang Semakin Inovatif Berbasis Digital”, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:
- 1) mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polda Sultra yang berbasis TIK;
 - 2) meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polda Sultra;
 - 3) mengoptimalkan “*ketanggapsegeraan*” dalam melayani masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polda Sultra yang berbasis TIK;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) peningkatan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian; (*Giat 3133/Prog Harkamtibmas/SP2/SS1/IKUa*);
 - b) mengoptimalkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor; (*Giat 3133/Prog Harkamtibmas/Giat 3071, 5055/ Prog Dukma/SP2/ SS1/IKU1*);
- 2) arah bijak: meningkatkan profesionalisme anggota Polda Sultra dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan inovasi dan perbaikan pelayanan intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK *online*; (*Giat 3112/Prog Harkamtibmas/SP2/ SS1/IKUa*);
 - b) melaksanakan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan pada rumah sakit Bhayangkara dan poliklinik jajaran; (*Giat 3072/Prog Dukma/SP2/SS5/IKP5c*);
 - c) mengoptimalkan proses integrasi *Binmas Online System (BOS) V2* dengan *Online Single Submission (OSS)* dalam penerbitan surat ijin operasional BUJP; (*Giat 5076/Prog Harkamtibmas/SP2/SS4/IKP4c*);

3) arah

- 3) arah bijak: mengoptimalkan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi serta audit terhadap pelayanan publik;
- untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengoptimalkan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban; (*Giat 5081 Prog Harkamtibmas/ SP2/SS1/IKU1*);
 - b) meningkatkan pembinaan teknis (supervisi, asistensi dan verifikasi) dan audit terhadap sistem manajemen pengamanan objek vital nasional serta objek vital tertentu; (*Giat 3130, 3131, Prog Harkamtibmas/ SP2/SS1/IKU1*);
- c. Sasaran Prioritas III “Menegakan Hukum secara Adil, Transparan, Legal dan Humanis berdasarkan *Scientific Criminal Investigation (SCI)*” terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:
- 1) mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - 2) melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di era digital dan kemajuan teknologi;
 - 3) mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) Arah bijak: mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 10 (sepuluh) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Sulawesi Tenggara; (*Giat 4342/Prog Lidik Sidik/ SP3/SS2/IKUb*);
 - b) meningkatkan pengungkapan tindak pidana dengan prioritas pada tindak pidana korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba, segala bentuk jenis perjudian, penyeludupan, terorisme, lingkungan hidup, siber serta kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (*Giat 3142, 3144, 3151, 3145, 3146, 5083, Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - c) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian dibidang pangan, pertanahan, energi, investasi, perbankan dan sektor keuangan; (*Giat 3142, 3145, 5083/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - d) melaksanakan penindakan terhadap tindak pidana di perairan dalam menciptakan keamanan laut dan perairan Indonesia; (*Giat 4342/Prog Sidik Lidik/SP3/SS2/IKUb*);

f) melaksanakan.....

- e) melaksanakan penanganan terhadap tindak pidana di bidang Lalu Lintas (kejahatan dan pelanggaran) dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas; (*Giat 3133, Prog Harkamtibmas; Giat 4343, Prog Sidik Lidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - f) melanjutkan pelaksanaan penyelesaian perkara melalui “*Restorative Justice*” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan; (*Giat 3142/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - g) mengoptimalkan penanganan kejahatan siber (*cyber crime*) termasuk edukasi masyarakat tentang bahaya kejahatan siber; (*Giat 3151, Prog Lidik Sidik; Giat 5076, Pog Harkamtibmas/SP3/SS2/IKUb*);
 - h) melaksanakan penindakan hukum terbatas/Tipiring dalam Harkamtibmas; (*Giat 3130/Prog Harkamtibmas/SP3/SS2/IKUb*);
 - i) mempercepat penyelesaian perkara-perkara yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat; (*Giat 3142, 3144, 3145, 3146, 3151/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - j) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti. (*Giat 3140, 3141/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUb*);
- 2) arah bijak: melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di era digital dan kemajuan teknologi;
- untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengusulkan personel mengikuti sertifikasi bagi penyidik Polda Sultra; (*Giat 3100/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP3/SS3/IKPa*);
 - b) meningkatkan kualitas dan kemampuan pemeriksa baik *Labfor* dan *Inafis* dalam pengelolaan TKP dalam pengungkapan tindak pidana; (*Giat 3100/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP3/SS3/IKPa*);
- 3) arah bijak: mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
- untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) senantiasa memberikan *SP2HP2* kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir *komplain* dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan hukum dan menjunjung tinggi HAM sebagai bentuk pelayanan kepada pelapor/korban dan tersangka; (*Giat 3137, 5086/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUa*);
 - b) mengoptimalkan peran “*Waskat*” atasan penyidik dan peran dari wassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (*Giat 5086/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUa*);
 - c) mengoptimalkan penggunaan *e-MP* (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi; (*Giat 5086/Prog Lidik Sidik/SP3/SS2/IKUa*);

d. sasaran.....

d. Sasaran Prioritas IV “Mewujudkan Pengelolaan SDM Polda Sultra yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Cerdas, Berintegritas dan Profesional” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polda Sultra yang siap pakai di era digital dan kemajuan teknologi;
- 2) mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Polda Sultra yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;;
- 3) meningkatkan kualitas SDM Polda Sultra yang unggul dan humanis di era digital dan kemajuan teknologi;
- 4) melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Sultra;
- 5) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
- 6) meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Sultra melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polda Sultra yang siap pakai di era digital dan kemajuan teknologi;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 9 (sembilan) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan mutu dari lulusan Diklat Polri agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas Polri kedepan; (*Giat 3100, 3107/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPb*);
- b) mengusulkan sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/instruktur dan pengasuh; (*Giat 3100/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPb*);
- c) meningkatkan pelaksanaan latihan dan Harkatpuan fungsi “*Dalmas dan Negosiator*” yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka menghadapi pengamanan *event* nasional/ internasional tahun 2025; (*Giat 3100/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPb*);
- d) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang “*Menjunjung Tinggi HAM*” dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas dan tahapan pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2025; (*Giat 3100, 3108, 5076, 3130, 5087/Prog Profesionalisme SDM Polri, Prog Harkamtibmas/SP4/SS3/IKPb*);
- e) mengusulkan penambahan dan peningkatan kemampuan personel bidang digital forensik yang “*Profesional*” dalam rangka menghadapi tahapan pengamanan nasional/internasional tahun 2025; (*Giat 3100, 3151, 3141/Prog Profesionalisme SDM Polri, Lidik Sidik/SP4/SS3/IKPb*);

f) meningkatkan

- f) mengusulkan personel untuk mengikuti sertifikasi profesi bagi anggota penyidik Reskrim, Ditpolair Polda Sultra serta Ditlantas Polda Sultra dalam rangka mengantisipasi penerapan KUHP baru; (*Giat 3100/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPb*);
 - g) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah bagi anggota Polda Sultra dan ASN Polda Sultra; (*Giat 3100, 4341/Prog Profesionalisme SDM, Prog Modernisasi Almatasus Sarpras Polri/SP4/SS3/IKPb*);
 - h) meningkatkan kapasitas personel kedokteran kepolisian guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta personel Polda Sultra dan keluarganya; (*Giat 3072, Prog Dukma; Giat 3100 Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/ SS3/IKPb*);
 - i) meningkatkan kualitas dan kapabilitas para Verifikator dan APIP di lingkungan Polda Sultra dalam upaya tertib administrasi keuangan serta mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi; (*Giat 3068, 3091/Prog Dukma/SP4/SS3/IKPb*);
- 2) arah bijak: mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayan publik di lingkungan Polda Sultra yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri antara lain melalui optimalisasi penggunaan SPBE; (*Giat 5052, Prog Dukma/SP4/SS5/ IKPc*);
 - b) meningkatkan pelayanan publik Polri yang berkualitas dan terpercaya berbasis digital; (*Giat 5053, Prog Dukma SP4/SS5/IKPc*);
- 3) arah bijak: meningkatkan kualitas SDM Polda Sultra yang unggul dan humanis di era digital dan kemajuan teknologi;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan pemantapan program rekrutmen proaktif guna memperoleh anggota Polri yang berkualitas secara terpadu dan berbasis T.I (*Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward*); (*Giat 3107/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
 - b) melanjutkan persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif melalui program manajemen talenta; (*Giat 3108/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
 - c) melanjutkan penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN; (*Giat 3108/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/ SS3/IKPa*);

d) melaksanakan.....

- d) melaksanakan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif ; (*Giat 3107/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
 - e) melaksanakan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif; (*Giat 3104/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
- 4) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam negeri;
- untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan dan melaksanakan rintisan dan perpanjangan MoU kermadik Dagri dan Lugri; (*Giat3100/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
 - b) menyelenggarakan kerja sama dengan *stakeholder*, terkait penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT)* di tingkat Polda; (*Giat 3108/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
- 5) arah bijak: melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja; untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan standar penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan "*sistem reward and punishment*" serta sistem *reward* terhadap kualifikasi personil Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat; (*Giat 3108/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
 - b) melaksanakan sistem penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung "*program manajemen talenta*"; (*Giat 3108/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
 - c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP guna menerapkan *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya; (*Giat 3108/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa*);
 - d) meningkatkan jumlah assesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus; (*Giat 3100, 3108, 5076/Prog Profesionalisme SDM Polri, Harkamtibmas/ SP4/SS3/IKPa*);

6) arah

- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Sultra melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja;
- untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polda Sultra dan masyarakat; (*Giat 3072/Prog Dukma/SP4/SS5/IKPc*);
 - b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polda Sultra yang gugur/tebas dalam tugas menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan *user friendly*; (*Giat 3072, 3105/Prog Dukma, Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/ SS5/IKPc*);
 - c) meningkatkan pelayanan administrasi pegawai bagi anggota Polda Sultra, menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan *user friendly* termasuk berkaitan dengan ASABRI; (*Giat 3105/Prog Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS5/IKPc*);
 - d) melanjutkan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS); (*Giat 3072, 5062/Prog Dukma/SP4/SS5/IKPc*);
- e. Sasaran Prioritas V “Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polda Sultra yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)*” terdiri dari 2 (dua) arah bijak sebagai berikut:
- 1) mengusulkan pemenuhan sarana dan prasarana dan Almatsus Polda Sultra yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) mengusulkan pemenuhan rumah dinas bagi personel Polda Sultra serta pembangunan fasilitas perkantoran;
- Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:
- 1) arah bijak: mengusulkan pemenuhan sarana dan prasarana dan Almatsus Polda Sultra yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengusulkan pemenuhan Almatsus Polda Sultra yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penyelenggaraan operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insurjensi dan pemeliharaan keamanan; (*Giat 5060, 3084/Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/ IKPb*);
 - b) mengusulkan pembangunan/pemasangan *ETLE* guna menegakkan hukum secara transparan di jalan raya; (*Giat 5060, 3084, 3133/Prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri, Prog Harkamtibmas/SP5/SS4/ IKPb*);

c) pembangunan

- c) pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat Polda maupun Polres untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum; (*Giat 5060, 5062/Prog Modernisasi Alamsus Sarpras Polri/SP5/SS4/ IKPb*);
- d) mengusulkan pemenuhan Alamsus Polri berbasis kendaraan listrik guna mendukung program pemerintah dibidang energi terbarukan; (*Giat 3084/Prog Modernisasi Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);
- 2) arah bijak: mengusulkan pemenuhan rumah dinas bagi personel Polda Sultra serta pembangunan fasilitas perkantoran;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengusulkan pembangunan fasilitas Kantor dan pembangunan Mako Polres dan Polsek di wilayah Polda Sultra; (*Giat 5062, Prog Modernisasi Alamsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*)
 - b) mengusulkan pembangunan fasilitas pergudangan, rumah dinas, flat dan Rusun bagi personil Polda Sultra; (*Giat 5062/Prog Modernisasi Alamsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*)
 - c) melanjutkan pembangunan dan meningkatkan Faskes (Rumah sakit, Poliklinik, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya) dalam rangka memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya serta guna mendukung “Reformasi Sistem Kesehatan Nasional”, (*Giat 5060, 5062, Prog Modernisasi Alamsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb*);
- f. Sasaran Prioritas VI “Meningkatkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;
 - 2) melanjutkan dan mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli, pencegahan bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal di lingkungan internal Polri;
 - 3) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polda Sultra;
 - 4) meningkatkan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polda Sultra yang transparan dan akuntabel;
 - 5) melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;
 - 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Sultra melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polda Sultra guna meraih berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian satker/satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;

Dengan

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengoptimalkan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu yang berbasis T.I; (*Giat 3091, 3089/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPc*);
 - b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*; (*Giat 3091, 3089/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPc*);
 - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal* dengan berbasis T.I; (*Giat 3091, 3089/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPc*);
- 2) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli, pencegahan bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal di lingkungan internal Polda Sultra;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan dan meningkatkan sinergitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda Sulawesi Tenggara dalam memberantas pungli serta pelaporan yang terintegrasi; (*Giat 3091/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPc*);
 - b) mendorong pelayanan publik secara *online* yang bersih transparan dan akuntabel berbasis *Medsos/Whatsapp*; (*Giat 3091, 3149/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPc*);
 - c) mengoptimalkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli; (*Giat 3091/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPc*);
 - d) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan, Personel, Baket) terkait rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS dari segala bentuk Pungli; (*Giat 3089, 3090/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPc*);
 - e) melanjutkan pelaksanaan pengamanan Kegiatan Personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/ PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1 dari segala bentuk Pungli; (*Giat 3089, 3090/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPc*);
 - f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan "*operasi bersih*" diinternal dan di sentra pelayanan publik Polri baik terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK, BPKB, SKCK); (*Giat 3089, 3090/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPc*);
- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri;

Untuk

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan peran serta seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System (WBS)*. Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi; (*Giat 3089, 3090, 3091/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPc*);
 - b) melanjutkan sosialisasi “Perkap Nomor 8 Tahun 2017” tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Perkap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; (*Giat 3091/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPc*);
- 4) arah bijak: meningkatkan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran satker agar lebih efektif dan efisien; (*Giat 4339/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPb*);
 - b) melanjutkan, meningkatkan dan mengembangkan sinergitas dalam e-Jakstra guna menyusun produk perencanaan dan penganggaran Polda Sultra (Domren Kapolda Sultra, Rancangan Renja Polda Sultra dan Renja Polda Sultra) guna menyelaraskan pembangunan di lingkungan Polri agar semakin berkualitas; (*Giat 5051/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPb*);
 - c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tata kelola keuangan tingkat Satker; (*Giat 3068, 3091, 4339, 5054/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPb*);
 - d) melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja dan anggaran di bidang pembinaan dan operasional; (*Giat 3068, 4339, 3091, 5054/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPb*);
- 5) arah bijak: melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;

untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan dan melaksanakan *monev* pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap; (*Giat 5052/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);
- b) melanjutkan penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan daerah otonomi baru di Sulawesi Tenggara; (*Giat 5052/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPc*);

c) melanjutkan

- c) melanjutkan dan penyempurnaan peraturan tentang SOTK tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta menyusun kesiapan pembentukan Satwil baru; (*Giat 5052/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPc*);
- 6) arah bijak: meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian satker/satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk mempedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/*stakeholder* terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat; (*Giat 5053/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPd*);
- b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/ Polrestabes dan Polres Metro, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (*Giat 5053/Prog DukmaSP6/SS5/IKPc*);
- c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi aktif dalam pembinaan keberlanjutan dan replika inovasi pelayanan publik (PKRI); (*Giat 5053, Prog Dukma/SP6/SS5/IKPc*);
- d) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian satker/satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian satker/satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM; (*Giat 5053/Prog Dukma/SP6/SS5/IKPc*);

IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF

1. Program dan kegiatan Polda Sultra T.A. 2025.

a. Program Profesionalisme SDM Polri.

1) tujuan:

Terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas *di era 5.0*, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggungjawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan *value* organisasi.

2) kegiatan:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
060.01.BD	Program Profesionalisme SDM Polri			
3096	Dukungan Manajemen dan Teknis Profesionalisme SDM Polri			
001	Gaji dan Tunjangan			
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1	TAHUN	26.086.937.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
BW	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor			
	ATK Rutin Satker	1	TAHUN	167.200.000
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
AJ	Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang			
	Pengepakan dan Pengiriman Surat	152	KG	3.040.000
BI	Peningkatan Kemampuan Personel Satker			
	Katpuan kepemimpinan dan kepribadian Polwan jajaran Polda Sultra	1	GIAT	50.000.000
BO	Kegiatan Pembinaan			
	Kegiatan Pembinaan PNS Polda Sultra	2	GIAT	53.456.000
D	Honorarium SAI/Sakpa/Simak/Smapi/Pengelola Keuangan			
	Honor Pengurus/Penyimpanan BMN	24	BULAN	3.600.000
	Honor Operator SAI dan Sakpa	24	BULAN	3.600.000
	Honor Operator E Monev	24	BULAN	7.200.000
	Honor Operator Sirena	24	BULAN	7.200.000
EW	Pembinaan Fungsi-Fungsi			
	Assesment Center dan Promosi Jabatan Terbuka di Lingkungan Polri	4	GIAT	166.311.000
	Dukungan Perjalanan Dinas Tim Uji BDP UKP Personel Polri	1	GIAT	48.700.000
HX	Supervisi			
	Supervisi	1	GIAT	20.000.000

JF. Dukungan

83 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
JF	Dukungan Operasional Satker			
	Dukops Satker	2	SATKER	795.036.000
JW	ULP Non Organik / Jaga Fungsi			
	Jaga Piket	2.928	OH	184.464.000
KN	Evaluasi Laporan Kegiatan			
	Rapat Evaluasi penyerapan Anggaran dan Kinerja	4	GIAT	3.000.000
KP	Penyusunan Program, Anggaran dan Rencana Kerja			
	Sun Pagu Minus	1	GIAT	20.000.000
	Reviu RKA Satker	1	GIAT	20.000.000
	Sun Pagu Anggaran di Jakarta	1	GIAT	20.000.000
	Perjalanan Dinas dalam Kota	60	GIAT	6.600.000
KQ	Penyusunan Program, Anggaran dan Rencana Kerja			
	Kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif	1	GIAT	600.000
	Kegiatan Penyusunan Pagu Anggaran	1	GIAT	600.000
	Kegiatan Revisi Anggaran	4	GIAT	1.100.000
	Penyusunan Rancangan Renja	1	GIAT	950.000
	Penyusunan Renja	1	GIAT	950.000
	Pemutakhiran Pagu Indikatif	1	GIAT	950.000
	Pemutakhiran Pagu Anggaran	1	GIAT	950.000
	Penyusunan Pra Rendisgar Sub Satker	1	GIAT	950.000
	Penyusunan Rencana Kebutuhan	1	GIAT	950.000
KS	Penyusunan Evaluasi LKIP			
	Penyusunan Evaluasi LKIP 2025	1	GIAT	1.694.000
KV	Penyusunan Perjanjian Kinerja			
	Penyusunan Perjanjian Kinerja	1	GIAT	1.000.000
3105	Peyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
BH	Pelatihan			
	Pembekalan Pelatihan Keterampilan	58	GIAT	55.100.000
BP	Pembinaan Tradisi Polri			
	Wisuda Purna Bhakti	1	GIAT	75.000.000
	Pembinaan Personel Polri Guna Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi	1	GIAT	50.000.000
I	Jaldis Mutasi			
	Biaya Transportasi Pegawai	250	ORANG	75.000.000
	Biaya Transportasi Keluarga	750	ORANG	225.000.000
	Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang	25	KOLI	1.500.000
	Uang Harian	1.000	OH	140.000.000

84 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
3108	Pembinaan Karier Personel Polri			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
BI	Peningkatan Kemampuan Personel Satker			
	Post Assesment	1	GIAT	165.000.000
	Talent Bintara Polri	1	GIAT	40.000.000
Z	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian			
	ADM Kepangkatan	1	GIAT	25.000.000
	Asistensi Pembinaan Karier	1	GIAT	60.000.000
3110	Pelayanan Psikologi Anggota Polri			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
BO	Kegiatan Pembinaan			
	Pelatihan Asesor	1	GIAT	60.000.000
V	Pelayanan Psikotest			
	Pelayanan Pendamping Psikologi dan Pegawai Negeri Pada Polri	1	GIAT	25.000.000
W	Pelayanan Konseling			
	Pelayanan Konseling Psikologi Berkala	144	ORANG	36.000.000
	Pelayanan Profil Klinis Kepolisian	288	ORANG	72.000.000
	Mapping Psikologi dan Test Psikologi Pemegang Senpi	300	ORANG	45.000.000

b. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

1) tujuan:

terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) kegiatan:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
060.01.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana			
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana			
001	Gaji dan Tunjangan			
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan gaji dan tunjangan	1	TAHUN	32.450.369.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
OC	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor			
	ATK Rutin Satker	1	TAHUN	375.440.000

003 Dukungan

85 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
AF	Penyusunan Naskah Buku Lainnya			
	Penyusunan Laporan Keuangan	3	GIAT	2.884.000
AJ	Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang			
	Pengepakan/Pengiriman Surat / Kawat	943	KG	18.860.000
D	Honorarium SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/ Pengelola Keuangan			
	Honor Operator SIMAK-BMN (Pengurus / Penyimpan BMN)	24	OB	3.600.000
	Honor Operator SAKPA	24	OB	3.600.000
	Honor Operator E-M0nev	24	OB	7.200.000
	Honor Operator Sirena	36	OB	10.800.000
	Honor Pengelola Keuangan			
	Kuasa Pengguna Anggaran	12	OB	27.360.000
	Pejabat Pembuat Komitmen	12	OB	9.600.000
	PPSPM	36	OB	25.800.000
	Bendahara Pengeluaran	36	OB	23.400.000
	Staf Pengelola Keuangan	84	OB	33.960.000
EW	Pembinaan Fungsi-Fungsi			
	Kegiatan Anev Tahunan	1	GIAT	2.479.000
	Giat Penginputan E-Manajemen Penyidikan	12	GIAT	24.975.000
	Giat Penyusunan Dokumentasi Anev Lidik Sidik Tindak Pidana	12	GIAT	17.828.000
HX	Supervisi			
	Supervisi	1	GIAT	14.280.000
IW	Kerjasama, Pembinaan Dan Pengawasan Teknis Penyelidikan			
	Kerjasama Penyelidikan	6	GIAT	18.198.000
	Pembinaan dan Pengawasan Teknik Penyelidikan	6	GIAT	18.231.000
JF	Dukopsnal Satker			
	Dukopsnal Satker	3	SATKER	405.996.000
JW	ULP Non Organik / Jaga Fungsi			
	Jaga Piket	5.840	OH	367.920.000
KQ	Penyusunan Program, Anggaran dan Rencana Kerja			
	Penyusunan Rancangan Kerja Satker	3	GIAT	2.075.000
	Penyusunan Rencana Kerja Satker	3	GIAT	2.075.000
KR	Penyusunan RKA-KL dan DIPA			
	Penyusunan Kebutuhan Anggaran	2	GIAT	1.615.000
	Kegiatan Sun Pagu Indikatif	1	GIAT	700.000
	Kegiatan Sun Pagu Anggaran	1	GIAT	700.000
	Kegiatan Sun Alokasi Pagu	1	GIAT	700.000
	Kegiatan Sun Pagu Minus	1	GIAT	700.000
	kegiatan sun Rengiat/Rendisgar	1	GIAT	700.000

KS Penyusunan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
KS	Penyusunan Evaluasi LKIP			
	Penyusunan LKIP	3	GIAT	2.703.000
KV	Penyusunan Perjanjian Kinerja			
	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi	3	GIAT	2.200.000
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
	Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana			
BT	Supervisi Dittahiti Ke Polres Jajaran	2	GIAT	71.764.000
	Penyusunan Dokumen Anev Lidik Sidik Tindak Pidana	12	GIAT	45.900.000
	Giat Penginputan E-Manajemen Penyidikan	12	GIAT	43.170.000
	Binopsnal fungsi Ditreskrimum ke Polres jajaran	2	GIAT	118.528.000
	Bin perencanaan dan administrasi ke Polres jajaran	1	GIAT	19.467.000
	Giat ke Mabes Polri dalam rangka klarifikasi penanganan kasus/Dumas dan gelar perkara khusus, Rakernis dan Sosialisasi Fungsi Resk	4	GIAT	277.736.000
	Rakernis Fungsi Reskrim	1	GIAT	48.675.000
	Pelatihan fungsi Reskrim	2	GIAT	88.500.000
BU	Bantuan Teknik Penyelidikan dan Penyidikan TP			
	Identifikasi Polres	10	GIAT	54.050.000
BV	Tindak Pidana Umum			
	Perkara Sangat Sulit	26	PERKARA	819.182.000
	Perkara Sulit	34	PERKARA	918.850.000
	Perkara Sedang	44	PERKARA	559.240.000
	Perkara Mudah	30	PERKARA	228.300.000
BW	Tindak Pidana Umum (Polres)			
	Perkara Sulit	43	PERKARA	879.766.000
	Perkara Sedang	198	PERKARA	2.239.490.000
	Perkara Mudah	340	PERKARA	2.096.840.000
	tambahan perkara mudah	1	PERKARA	615.000
BX	Tindak Pidana Umum (Polsek)			
	Perkara Sedang	274	PERKARA	2.874.831.000
	Perkara Mudah	644	PERKARA	3.986.373.000
CC	Tindak Pidana yang Melibatkan Perempuan dan Anak			
	Perkara Sulit	2	PERKARA	114.050.000
	Perkara sedang	58	PERKARA	691.959.000
	Perkara Mudah	73	PERKARA	474.401.000
CE	Tindak Pidana Ringan			
	Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Sat Sabhara Polres)	174	PERKARA	33.886.000
	Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Polsek (Unit Sabhara Polsek)	285	PERKARA	59.850.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
CH	Koordinasi dan Pengawasan PPNS			
	Melaksanakan Kerjasama dan Binwas Teknis Penyelidikan	4	GIAT	2.242.000
CI	Pengawasan Penyidikan			
	Asistensi dan Supervisi Penanganan Kasus	4	GIAT	121.236.000
IW	Kerjasama, Pembinaan Dan Pengawasan Teknis Penyelidikan			
	Melaksanakan Kerjasama dan Binwas Teknis Penyelidikan	8	GIAT	21.261.000
KB	Pengadaan Konsumsi Tahanan			
	Konsumsi Tahanan	15.330	OH	551.880.000
KC	Pengadaan Konsumsi Tahanan (Polres)			
	Biaya Konsumsi Tahanan	99.655	OH	3.587.580.000
KD	Pengadaan Konsumsi Tahanan (Polsek)			
	Biaya Konsumsi Tahanan	13.203	OH	475.308.000
LC	Visum Luar			
	Visum Luar	116	PERKARA	34.280.000
LS	Pemeliharaan Tahanan			
	Perawatan Tahanan	15.330	OH	91.980.000
LT	Pemeliharaan Tahanan (Polres)			
	Biaya Perawatan Tahanan	99.655	OH	498.275.000
LU	Pemeliharaan Tahanan (Polsek)			
	Biaya Perawatan Tahanan	13.307	OH	66.535.000
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
BY	Tindak Pidana Narkoba			
	Penyelidikan Kasus Narkoba	241	PERKARA	6.193.320.000
	Penyidikan Kasus Narkoba	224	PERKARA	3.273.684.000
	Pengembangan Kasus Narkoba	23	PERKARA	549.674.000
	Penyidikan - Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (PN)	5	PERKARA	476.500.000
EV	Pembinaan Keamanan			
	Kegiatan Rasia Narkoba	8	GIAT	110.714.000
GA	Penyuluhan Hukum			
	Kampanye Langsung / Penyuluhan Narkoba	16	GIAT	158.321.000
3145	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
BZ	Tindak Pidana Ekonomi Khusus			
	Tindak Pidana Indaksi			
	Perkara sangat Sulit	8	PERKARA	248.000.000
	Perkara Sedang	1	PERKARA	10.500.000

Tindak

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Tindak Pidana Eksus			
	Perkara Sangat Sulit	8	PERKARA	248.000.000
	Perkara Sedang	1	PERKARA	10.500.000
	Giat Koordinasi dgn Instansi Terkait			
	Kegiatan Koordinasi dengan instansi Terkait	1	PERKARA	7.060.000
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
CA	Tindak Pidana Korupsi			
	Tindak Pidana Korupsi	20	PERKARA	3.319.613.000
3151	Penindakan Tindak Pidana Siber			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
CD	Cyber Crime			
	Perkara Sangat Sulit	35	PERKARA	980.000.000
	Tambahan Perkara Sulit	1	PERKARA	29.789.000
	Perkara Sangat Sulit (PN)	4	PERKARA	126.028.000
4342	Penindakan Tindak Pidana Perairan			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
BW	Tindak Pidana Umum			
	Perkara Sulit	10	PERKARA	205.872.000
	Perkara Sedang	7	PERKARA	87.672.000
	Perkara Mudah	5	PERKARA	43.073.000
4343	Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
EY	Penyelidikan dan Penyidikan Laka Lintas			
	Tabrak Lari	2	PERKARA	5.242.000
	Laka Ringan	477	PERKARA	464.681.000
	Laka Sedang	28	PERKARA	85.393.000
	Laka Berat	28	PERKARA	146.113.000
	Laka Tidak Menonjol	5	PERKARA	18.805.000
	Laka Menonjol	19	PERKARA	21.375.000
	Derek Besar	12	UNIT	11.500.000
	Derek Kecil	37	UNIT	18.191.000
	Gelar Perkara Linsek (Laka Menonjol)	24	PERKARA	27.000.000
	Kejahatan Lalu Lintas	14	PERKARA	54.372.000
	Biaya Pulsa dan data laka lintas	3	UNIT	270.000
EZ	Penyelidikan dan Penyidikan Laka Lintas di Polsek			
	Laka Ringan Polsek	11	PERKARA	10.186.000
5082	Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
CC	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana			
	Fungsi Identifikasi	9	GIAT	40.707.000
	Fungsi Labfor	7	GIAT	50.820.000
	Coaching Clinic Fungsi Identifikasi	5	GIAT	20.659.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
CB	TINDAK PIDANA TERTENTU			
	Kegiatan Sangat Sulit	28	PERKARA	790.140.000
	Perkara Sulit	45	PERKARA	907.025.000
	Perkara Sedang	5	PERKARA	91.105.000
5086	Pengawasan Penyidikan			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
CI	Pengawasan Penyidikan	8		4.160.000
	Giat gelar perkara khusus	64		110.700.000
	Supervisi dan Asistensi	6		78.460.000
	Pengawasan Penyidikan	53		49.278.000

c. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri.

1) tujuan:

Mendukung terpeliharanya Harkamtibmas dan Penegakkan Hukum melalui tata kelola dan modernisasi almatsus serta sarana prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi Polri dibidang pembinaan dan operasional.

2) kegiatan:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
060.01.BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri			
3084	Pengembangan Peralatan Polri			
065	Peralatan Kesehatan			
WS	Pengadaan Alkes			
	Nurse Kit FKTP Jajaran	16	UNIT	20.000.000
	Dental Unit FKTP SPN Polda Sultra	1	UNIT	60.000.000
	Dental Unit FKTP Polres Buton Utara	1	UNIT	60.000.000
	Dental Unit FKTP Polres Konawe Utara	1	UNIT	60.000.000
	DC Shock	1	UNIT	65.000.000
	Laringoskop	2	UNIT	5.100.000
	Suction Pump	3	UNIT	14.400.000
	Monitor Pasien	6	UNIT	63.000.000
	Infus Pump	8	UNIT	14.400.000
	Syringe Pump	8	UNIT	39.200.000
	Stetoscope Lithman Anak	6	UNIT	12.300.000
	Stetoscope Lithman Dewasa	6	UNIT	12.300.000
	Oxymetri Anak	5	UNIT	10.000.000
	Oxymetri Dewasa	6	UNIT	11.700.000
	Bed Elektrik	15	UNIT	225.000.000
	Transfer Strecher	6	UNIT	72.000.000
	Autoclik	3	UNIT	5.700.000
	Mikroskop Binokuler	1	UNIT	37.000.000
	Alat Urine Lengkap	1	UNIT	12.000.000
	RN Vena Detector Vein Finder	2	UNIT	187.290.000
	Centrifuge	1	UNIT	34.410.000

90 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Tensimeter Roda	11	UNIT	33.000.000
	Otoscope	6	UNIT	9.000.000
	Rosture	7	UNIT	10.500.000
	Trolley Tindakan	10	UNIT	15.000.000
	Oksigen Tranport	4	UNIT	7.200.000
	Alat Pengukur TB BB	4	UNIT	6.000.000
	Bedah Set Mata	1	UNIT	3.500.000
	Kursi Tht Elektrik	1	UNIT	25.000.000
	Autoclave Steam 280 L	1	UNIT	25.000.000
	CTG (Cardiotografi)	1	UNIT	16.500.000
	Pulse Oxymetri Bayi	1	UNIT	4.500.000
	Trolley Emergency	2	UNIT	24.000.000
	USG 4 D	1	UNIT	224.215.000
069	Peralatan Kantor			
BW	Pengadaan Perlatan Perlengkapan Kantor (PNBP)			
	Laptop Core i3			
WT	Pengadaan Nonalkes			
	Lemari Susun Tempat Berkas	1	UNIT	2.200.000
	Mesin Pengering Linen Modena	2	UNIT	17.000.000
	Kulkas Buah	1	UNIT	5.500.000
	Laptop Windows i9	2	UNIT	40.000.000
	Kursi Tunggu Pasien 4 Dudukan	10	UNIT	85.000.000
	Lensa Sony Telephoto Full Frame	1	UNIT	12.000.000
	Gimbal Dji	1	UNIT	6.000.000
	Mikrophone Wireless	1	UNIT	5.200.000
	Pintu Server Biometrik	1	UNIT	5.000.000
	UPS 3000 VA	1	UNIT	3.000.000
	Stavolt 3000 VA	1	UNIT	7.000.000
	SSD M2 1 TB	1	UNIT	3.500.000
	Optical Time Domain Reflectometer	1	UNIT	6.200.000
	PC AIO i5	4	UNIT	54.400.000
	PC Tablet	4	UNIT	92.000.000
	Wifi Mash	4	UNIT	9.200.000
	Switch Manage	8	UNIT	10.400.000
	Switch Manageable Poe	3	UNIT	24.600.000
	Router Cloud	5	UNIT	9.275.000
	Constan Curent Regulator (CCR) 12 Port	1	UNIT	23.000.000
	Mikrotik 5 Port	1	UNIT	1.250.000
	TV Display 32 Inch	9	UNIT	37.800.000
	Handphone Android Ruang Perawatan	2	UNIT	9.000.000
	Daun Pintu Utama	1	UNIT	2.500.000
	Printer	5	UNIT	17.000.000
	Mini PC	4	UNIT	41.800.000
	PC AIO	7	UNIT	95.200.000
	Wastafel	1	UNIT	2.500.000
	TV LED 45 Inch	4	UNIT	17.400.000
	Kamera Sony A7 III	1	UNIT	33.210.000
	AC 2 PK	7	UNIT	26.950.000
	Dispenser Galon Bawah	12	UNIT	46.800.000
	Mesin Cuci	2	UNIT	9.600.000
	Meja 1/2 Biro	6	UNIT	7.800.000
	Freezer Besar	1	UNIT	6.500.000

91 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras			
001	Gaji dan Tunjangan			
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1	TAHUN	3.345.867.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
D	Honorarium Sai/Sakpa/Simak/Smapi/Pengelola Keuangan			
	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	12	OB	21.600.000
	Pejabat Pembuat Komitmen	12	OB	12.000.000
	Bendahara Pengeluaran	12	OB	12.000.000
	Staf Bendahara Pengeluaran	36	OB	25.200.000
LN	Pemeliharaan Gedung Negara			
	Kuasa Pengguna Anggaran	12	OB	7.200.000
	Pejabat Pembuat Komitmen	12	OB	6.300.000
	Bendahara Pengeluaran	12	OB	6.000.000
	Staf Bendahara Pengeluaran	12	OB	6.000.000
	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3	OB	2.730.000
	Tim Pendukung Teknis Pekerjaan	3	OB	2.310.000
	Perawatan Gudang Senpi Polda Sultra	200	M2	25.000.000
	Perawatan Gudang Amunisi Polda Sultra	200	M2	25.000.000
	Perawatan Gedung Kantor SPBP Polda Sultra (SPBP Lama)	70	M2	8.750.000
	Perawatan Gedung Kantor Spbp Polda Sultra (SPBP Baru)	130	M2	16.250.000
	Har Gedung Kantor	7.025	M2	812.705.000
	Har Halaman dan Taman	7.207	M2	72.070.000
	Pemeliharaan Gedung Utama	5.078	M2	1.000.366.000
	Pemeliharaan Halaman	20.000	M2	200.000.000
	Pemeliharaan Gedung Reskrim	864	M2	170.208.000
	Pemeliharaan Gedung Reskrimsus / Ruang Tahanan	864	M2	170.208.000
	Pemeliharaan Gedung Ditlantas	864	M2	170.208.000
	Pemeliharaan Gedung Ditsnarkoba / Ditsabha	864	M2	170.208.000
	Pemeliharaan Kantor PJR	170	M2	24.480.000
	Pemeliharaan Gudang Arsip Lintas	200	M2	28.800.000
	Pemeliharaan Gedung Barak Dalmas I	360	M2	51.840.000
	Pemeliharaan Gedung Barak Dalmas II	360	M2	51.840.000
	Pemeliharaan Pos Jaga Provost	90	M2	12.960.000
	Pemeliharaan Gedung Hanggar	195	M2	28.080.000
	Pemeliharaan Gedung Penjagaan Masuk	70	M2	10.080.000
	Pemeliharaan Gedung Auditorium	500	M2	72.000.000
	Makosat (Seksi Yanma)			
	Har Gedung Kantor Utama	1.100	M2	165.000.000
	Har Barak Bujang	750	M2	82.500.000
	Har Gedung Kantor Gegana	200	M2	22.000.000
	Har Bangunan Lapangan Tembak	250	M2	27.500.000
	Har Gudang Logistik	200	M2	22.000.000
	Har Gedung Garasi EOD Jibom	40	M2	4.400.000
	Har Ruang Makan	80	M2	8.800.000
	Har Poliklinik	96	M2	10.560.000
	Har Kantor Provos	50	M2	5.500.000
	Har Pos Penjagaan Gerbang	84	M2	9.240.000
	Har Bangunan Garasi R4 dan R6	110	M2	12.100.000

Har

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Har Gedung Shooting House	80	M2	8.800.000
	Har Gedung Bekum	217	M2	23.870.000
	Har Garasi Siaga	320	M2	16.000.000
	Har Lapangan Tembak 600 M2	2.840	M2	28.400.000
	Har Tower Latihan SAR dan Mountaineering	1	M2	15.000.000
	Har Taman dan Halaman Kantor	4.680	M2	46.800.000
	BATALYON C PELOPOR TOTALLANG			
	Harwat Gedung Kantor Batalyon	420	M2	46.200.000
	Harwat Halaman Kantor Batalyon	1.323	M2	13.230.000
	BATALYON B PELOPOR BATAUGA			
	Harwat Gedung Kantor Batalyon	500	M2	75.000.000
	Harwat Halaman Kantor Batalyon	1.500	M2	15.000.000
	Perawatan gedung Canel Satwa K-9	160	M2	20.000.000
LO	Pemeliharaan Gedung Kantor Polres			
	Honer PPK	2	OB	2.000.000
	Honor pejabat pengadaan	2	OB	1.360.000
	Administrasi	2	OB	670.000
	Har Gedung Kantor	13.396	M2	1.533.320.000
	Har Halaman	16.485	M2	164.850.000
LP	Pemeliharaan Gedung Kantor Polsek			
	Har Gedung Kantor	13.760	M2	1.646.865.000
	Har Halaman	24.399	M2	243.990.000
LV	Pemeliharaan Rumah Negara			
	Pemeliharaan Rujab Kapolda Sultra	450	M2	64.800.000
	Pemeliharaan Rusun Dalmas Polda Sultra	1.404	M2	276.588.000
MA	Pemeliharaan Peralatan Kantor (Polres)			
	Har AC	118	UNIT	53.570.000
	Har Komputer	217	UNIT	115.525.000
	Har Printer	114	UNIT	46.340.000
	Har Faximile	1	UNIT	150.000
	laptop	41	UNIT	24.660.000
	Har Kamera	2	UNIT	1.000.000
	Har HT	25	UNIT	12.600.000
	Har Inventaris Kantor	1	TAHUN	4.589.000
	Har Handphone Samsung	1	UNIT	500.000
	Har Camera Digital	2	UNIT	1.000.000
	Har Voice Recorder	2	UNIT	1.000.000
MB	Pemeliharaan Peralatan Kantor (Polsek)			
	Har Komputer	82	UNIT	43.900.000
	Har Printer	65	UNIT	32.500.000
	laptop	1	UNIT	630.000
	Har Senpi Genggam	1	UNIT	40.000
	Har Senpi Bahu / Laras Panjang	1	UNIT	60.000
	Har AC	1	UNIT	530.000
	Har Camera Digital	3	UNIT	1.500.000
	Har Voice Recorder	3	UNIT	1.500.000
	Har Handphone PDA	3	UNIT	1.500.000
MC	Pemeliharaan Kendaraan Khusus			
	Har Rantis AWC	3	UNIT	66.000.000
	Har Rantis SAR	1	UNIT	17.000.000

Har

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Har Ransus APC Baracuda	1	UNIT	18.000.000
	Har Rantis APC Wolf	1	UNIT	18.000.000
	Har Rantis EOD	3	UNIT	45.000.000
	Har Rantis Sound System	1	UNIT	18.000.000
	Har Rantis PHH (Public Address)	1	UNIT	18.000.000
	Har Rantis KBR	2	UNIT	30.000.000
	Har Ransus Water Treatment	2	UNIT	34.000.000
	Har Ransus Repeater	1	UNIT	18.000.000
	Har Ransus PJJ Remoeng	2	UNIT	36.000.000
	Har Ransus APC Multi Fungsi	2	UNIT	36.000.000
	Pemeliharaan peralatan Kendaraan Taktis (Komando)	1	UNIT	30.750.000
	Pemeliharaan Kendaraan Taktis Penindakan	1	UNIT	19.034.000
	Paket Data Alsus	12	UNIT	45.960.000
	Har Ranmor Khusus Roda 4 Ditsamapta	9	UNIT	216.000.000
	Har Ranmor Khusus Roda 6 Ditsamapta	5	UNIT	135.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Khusus Intelkam beserta Kelengkapannya	3	UNIT	21.785.000
ME	Pemeliharaan Alat Angkutan Air			
	Honor PPK	1	OB	1.000.000
	Pejabat Pengadaan	13	OB	8.840.000
	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	5	OB	4.000.000
	Administrasi	1	GIAT	320.000
	Har Kapal Patroli Klas C1 Mesin Luar	1	UNIT	280.000.000
	Har Kapal Patroli Klas C2 Mesin Luar	9	UNIT	1.287.463.000
	Har Kapal Patroli Klas C2 Mesin Dalam	1	UNIT	569.234.000
	Kapal Patroli C3	1	UNIT	79.793.000
	Har Rubber Boat	1	UNIT	20.240.000
	Perahu Karet Mesin Tempel	10	UNIT	52.000.000
	Har Rigid Inflatable Boat (RIB)	3	UNIT	15.000.000
	Perawatan Speed Boat Bhabinkamtibmas	4	UNIT	68.374.000
MH	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10			
	Roda 4	148	UNIT	3.689.027.000
	Ran Roda 6	46	UNIT	1.176.920.000
	Honor Pejabat Pembuat Komitmen	12	OB	22.800.000
	Honor Pejabat Pengadaan	12	OB	8.160.000
MI	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10 (Polres)			
	Honor PPK	2	OB	2.000.000
	Pejabat Pengadaan	2	OB	1.360.000
	Administrasi	2	GIAT	670.000
	Har Ranmor Roda 4	116	UNIT	1.838.270.000
	Har Ranmor Roda 6	50	UNIT	1.096.000.000
MJ	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10 (Polsek)			
	Har Ranmor Roda 4	40	UNIT	525.073.000
ML	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2			
	Honor PPK	2	OB	2.000.000
	Pejabat Pengadaan	2	OB	1.360.000
	Administrasi	2	GIAT	670.000
	Perawatan Kendaraan Roda 2	1.020	UNIT	2.286.514.000
	Har Ranmor Bhabinkamtibmas	45	UNIT	64.000.000

MM Pemeliharaan

94 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
MM	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 (Polsek)			
	Perawatan Kendaraan Roda 2	569	UNIT	1.057.900.000
	Har Ranmor Bhabinkamtibmas	238	UNIT	476.000.000
MP	Pemeliharaan Peralatan Fungsional			
	Har Komputer	498	UNIT	309.862.000
	Har laptop	109	UNIT	75.550.000
	Har printer	371	UNIT	220.458.000
	Har Scanner	13	UNIT	5.196.000
	Har HT	10	UNIT	4.800.000
	Har mesin foto copi	6	UNIT	30.727.000
	Har Genset	4	UNIT	41.000.000
	Harwat AC	217	UNIT	116.231.000
	Inventaris Kantor	1	TAHUN	30.990.000
	Har SGR Filling Recording Yanduan			
	Senpi V2 Sabhara			
	Har Perlengkapan Upacara, Kebersihan dan Piket Jaga	1	SET	5.000.000
	Har Jaringan Air	1	SET	20.350.000
	Har Jaringan Listrik	1	SET	20.000.000
	Har Note Book	1	UNIT	640.000
	Har Amplifair	3	UNIT	4.350.000
	Har LCD Proyektor/Infocus	11	UNIT	13.750.000
	Service Camera CCTV	1	UNIT	4.081.000
	Service Jaringan	1	UNIT	2.605.000
	Har Kamera	2	UNIT	1.200.000
	Har Sound System	2	UNIT	1.200.000
	Har Faxmili	1	UNIT	1.250.000
	Kulkas	10	UNIT	6.250.000
	Mesin Cuci	1	UNIT	500.000
	Televisi	10	UNIT	5.000.000
	Har Hydrant Pemadam Kebakaran	7	UNIT	875.000
	Har Hydrant Pemadam Kebakaran	15	UNIT	1.875.000
	Mesin Stationer Bahan Bakar MT-88 SPBP/Jaringan BBM Bensin	2	UNIT	8.222.000
	Mesin Stationer Bahan Bakar HSD SPBP/Jaringan BBM Solar	2	UNIT	8.222.000
	Pompa Air	2	UNIT	725.000
	Tera Ulang Mesin Stasioner Bahan Bakar	8	UNIT	12.120.000
	Tabung Pemadam Kebakaran 350 CT	4	UNIT	26.000.000
MQ	Pemeliharaan Peralatan Fungsional			
	Kegiatan Inventarisasi dan Pengiriman Senjata Api Rusak ke Slog Polri	1	GIAT	50.000.000
	Senpi Genggam/Senpi Bahu	475	PUCUK	23.540.000
	Senjata Mesin Ringan	1	PUCUK	7.697.000
	Har Laras Pendek	240	PUCUK	8.750.000
	Har Senapan Otomatis	308	PUCUK	7.700.000
	Har Senapan Otomatis	51	PUCUK	1.275.000
	Har Senpi Sigstauer	20	PUCUK	1.000.000
	Har Senpi Laras Panjang	73	PUCUK	2.482.000
	Harwat Celebrite Ufed	1	PUCUK	59.600.000
	Har HT	235	UNIT	156.310.000
	Har Radio Link	1	UNIT	1.200.000
	Har SGRS Filling Recording Yanduan	1	UNIT	1.500.000

Har

95 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Har Helm Tempur	26	UNIT	10.400.000
	Har Rompi Anti Peluru	20	UNIT	5.000.000
	Har Sound System	13	UNIT	6.180.000
	Har Helm Provos	7	UNIT	700.000
	Har Bandwitch Management	1	UNIT	9.350.000
	Har CCTV Camera	3	UNIT	6.900.000
	Har LCD Display CCTV	1	UNIT	8.000.000
	Har Swicth HUB	4	UNIT	12.000.000
	Repeater GTR - 8000	1	UNIT	14.500.000
	Har Server CCTV	1	UNIT	6.000.000
	Video Confrence	1	UNIT	8.000.000
	VIDEOTRON	5	UNIT	15.000.000
	Har Server Dual Prosesor	2	UNIT	35.762.000
	Har Kamera End Point	1	UNIT	3.350.000
	Har Audio System	2	UNIT	12.000.000
	Har Display Monitor	1	UNIT	2.000.000
	Har Mesin Pemotong Rumput	4	UNIT	4.000.000
	Har Peralatan Musik	1	UNIT	9.225.000
	Har Kamera DSLR/Mirrorless	4	UNIT	14.100.000
	Har Radio Mobile Digital Trunking	1	UNIT	1.727.000
	Har Handy Cam	18	UNIT	20.135.000
	Har Scanner	10	UNIT	1.500.000
	Har Jaringan Video Streaming Command Centre	1	UNIT	78.477.000
	Harwat GSM Interceptor Passive PI-2	1	UNIT	100.000.000
	TV Monitor	4	UNIT	4.000.000
	Proyektor	2	UNIT	3.000.000
	Hardisk	12	UNIT	7.500.000
	Komputer RTMC	3	UNIT	1.890.000
	AC Ruang RTMC	4	UNIT	2.120.000
	Sewa Jaringan CCTV Stainless	12	BULAN	36.000.000
	Sewa Jaringan CCTV Pasar Baru	12	BULAN	36.000.000
	Sewa Jaringan CCTV Sinar Mas	12	BULAN	36.000.000
	Sewa Jaringan CCTV Tapak Kuda	12	BULAN	36.000.000
	Sewa Jaringan CCTV Mall Mandonga	12	BULAN	36.000.000
	Sewa Jaringan CCTV Bundaran Tank	12	BULAN	36.000.000
	Sewa Jaringan Bandwith Internet	12	BULAN	38.436.000
	Har DF	2	UNIT	150.000.000
	Camera Digital	12	UNIT	10.400.000
	Tabung Pemadam Api	35	UNIT	17.500.000
	Toa/Megaphone	10	UNIT	850.000
	Flash Ball	35	UNIT	700.000
	Pemeliharaan Alkes			
	Timbangan badan	2	UNIT	1.000.000
	Tensimeter	2	UNIT	500.000
	Stetoskop	2	UNIT	500.000
	Brancar	1	UNIT	750.000
	Sterilisator	2	UNIT	2.200.000
	Mesin Anastesi	1	UNIT	6.900.000
	Lampu Operasi	2	UNIT	9.000.000
	Meja Operasi	2	UNIT	19.000.000
	Elektrik Couter	1	UNIT	4.494.000
	Sterilisator	4	UNIT	6.000.000
	Infus Pump	2	UNIT	5.600.000
	Centrifuge	1	UNIT	2.300.000
	ECG 12 Chanel	1	UNIT	6.000.000

Tensimeter

NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024

TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Tensimeter	16	UNIT	4.000.000
	Timbangan Bayi	8	UNIT	2.400.000
	Stetoskop	13	UNIT	3.250.000
	Timbangan Badan	2	UNIT	1.000.000
	Brancard	2	UNIT	1.500.000
	Kursi Dorong	1	UNIT	750.000
	Nebulizer	3	UNIT	4.500.000
	Suction Pump	3	UNIT	7.500.000
	Dental Unit	1	UNIT	10.000.000
	Dental X-Ray Unit	1	UNIT	11.500.000
	Autopsy Table	1	UNIT	10.000.000
	U S G	1	UNIT	14.193.000
	Baby Incubator	1	UNIT	2.900.000
	Motuary Refrigerator	1	UNIT	15.000.000
	SEKSI LOGISTIK			
	Senpi Genggam	110	PUCUK	5.500.000
	Senpi Pinggang	24	PUCUK	1.200.000
	Senpi Panjang	700	PUCUK	42.000.000
	Senpi Mesin Ringan	10	PUCUK	1.050.000
	HAR ALSUS PHH			
	Helm PHH	50	UNIT	1.500.000
	Rompi PHH	50	UNIT	2.300.000
	Gas Masker	100	UNIT	5.000.000
	Pemadam Api	10	UNIT	5.000.000
	Security Barrier	3	UNIT	4.500.000
	Har Alat Proteksi			
	Body Vest Level 4	75	UNIT	7.500.000
	Ballistic Helmet	75	UNIT	7.500.000
	HAR ALSUS SAR			
	Baju Selam	2	UNIT	460.000
	Fins Full Foot	4	UNIT	208.000
	Tabung Selam	2	UNIT	500.000
	Perahu Karet	2	UNIT	3.000.000
	Tali Statis 200 Meter	3	UNIT	1.800.000
	Tali Dynamic 50 Meter	3	UNIT	750.000
	Senter Air	1	UNIT	226.000
	Sarung Tangan	16	UNIT	800.000
	Regulator	2	UNIT	720.000
	Motor Tempel	2	UNIT	4.000.000
	Power Inflator	2	UNIT	1.000.000
	Catridge Coltri	4	UNIT	3.200.000
	Module Gauge Compressor	2	UNIT	2.400.000
	Oli Nabati	4	UNIT	2.400.000
	Batalyon A Pelopor			
	Har Alat Proteksi			
	Body Vest Level 4	60	UNIT	6.000.000
	Ballistic Helmet	60	UNIT	6.000.000
	Har Alsus PHH			
	Tameng PHH Transparan	150	UNIT	4.950.000
	Tameng Sekat	100	UNIT	7.700.000
	Helm PHH	200	UNIT	6.000.000
	Rompi PHH	200	UNIT	9.200.000
	Gas Masker	100	UNIT	5.000.000
	Tongkat PHH	168	UNIT	168.000
	Pemadam Api	10	UNIT	5.000.000

Batalyon

97 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
 NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
 TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Batalyon B Pelopor			
	Har Alat Proteksi			
	Body Vest Level 4	60	UNIT	6.000.000
	Ballistic Helmet	60	UNIT	6.000.000
	Har Alsus PHH			
	Tameng PHH Transparan	120	UNIT	3.960.000
	Tameng Sekat	75	UNIT	5.775.000
	Helm PHH	170	UNIT	5.100.000
	Rompi PHH	170	UNIT	7.820.000
	Gas Masker	100	UNIT	5.000.000
	Tongkat PHH	132	UNIT	132.000
	Pemadam Api	10	UNIT	5.000.000
	Batalyon C Pelopor			
	Har Alat Proteksi			
	Body Vest Level 4	60	UNIT	6.000.000
	Ballistic Helmet	60	UNIT	6.000.000
	HAR ALSUS PHH			
	Tameng PHH Transparan	120	UNIT	3.960.000
	Tameng Sekat	75	UNIT	5.775.000
	Helm PHH	170	UNIT	5.100.000
	Rompi PHH	170	UNIT	7.820.000
	Gas Masker	100	UNIT	5.000.000
	Tongkat PHH	132	UNIT	132.000
	Pemadam Api	10	UNIT	5.000.000
	Detasemen Gegana			
	Har Alsus Wantoror			
	Body Vest Level 4	70	UNIT	7.000.000
	Ballistic Helmet	70	UNIT	7.000.000
	Teropong Intai Biasa	5	UNIT	2.500.000
	Teropong Malam	5	UNIT	2.500.000
	Aimpoint Sighting	10	UNIT	2.000.000
	Senter Tembak	10	UNIT	2.000.000
	Senter Biasa	10	UNIT	1.000.000
	HAR ALSUS JIBOM			
	Hand Held Metal Detector	10	UNIT	3.500.000
	Mine Detector	3	UNIT	1.500.000
	Demolition Cable	3	UNIT	1.500.000
	Blasting Machine	3	UNIT	900.000
	Explosive Detector	1	UNIT	500.000
	Hand Held Mirror	5	UNIT	1.500.000
	Under Vehicle Mirror	3	UNIT	1.500.000
	Bomb Trailer	1	UNIT	2.000.000
	Body Armour	5	UNIT	2.500.000
	Seek and Search Suit	2	UNIT	600.000
	Dragon Search Light	6	UNIT	3.000.000
	Flood Light	3	UNIT	1.500.000
	X-RAY	3	UNIT	4.500.000
	Robot Vanguard	1	UNIT	2.000.000
	Kamera DSLR Canon	1	UNIT	450.000
	Har Alsus KBR			
	Sarung Tangan Radiasi	10	UNIT	1.500.000
	Sepatu Anti Radiasi	5	UNIT	1.500.000
	Kacamata Safety	10	UNIT	1.000.000
	Thermometer	3	UNIT	120.000
	Hazmat Sked	1	UNIT	792.000

Clipboard

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Clipboard-8	1	UNIT	24.000
	Aim Gas Detector	1	UNIT	1.000.000
	Bathroom Scale	1	UNIT	207.000
	Buckets 5 Gallon	10	UNIT	200.000
	Air Compressor SCBA	1	UNIT	1.900.000
	Radiation Pager	2	UNIT	700.000
	Radiation Meter	2	UNIT	800.000
	Reagent Chemical Detector 4 Gas	1	UNIT	1.162.000
	Smith Detection LCD 3,3	1	UNIT	1.100.000
	Kamera DSLR Canon	1	UNIT	450.000
	Seksi TIK			
	Har Alkomlek			
	HT Motorola SRX 2200	24	UNIT	8.400.000
	HT Motorola APX 1000	70	UNIT	35.000.000
	Batteray HT Motorola APX 1000	70	UNIT	21.000.000
	Mic Wireless	2	UNIT	1.400.000
	Handy Cam	10	UNIT	5.000.000
	Drone Dokumentasi Dji Mavic Enterprise II	2	UNIT	9.900.000
	Power Amplifier	2	UNIT	2.400.000
	Speaker	4	UNIT	2.400.000
	Overhead Projector	1	UNIT	1.000.000
	Radio Mobil (Rig)	2	UNIT	4.000.000
	Seksi Kesjas			
	Har Poliklinik Gigi			
	Har Dental Unit Low Speed	1	UNIT	2.000.000
	Har Kursi Gigi Mekanik	1	UNIT	500.000
	Har Kaca Mulut	1	UNIT	30.000
	Bein Lurus	1	UNIT	250.000
	Sonde Halfmoon	2	UNIT	50.000
	Plastic Filling Instruments	2	UNIT	50.000
	Pinset Gigi	1	UNIT	25.000
	Sterilisasi Kering	1	UNIT	2.000.000
	Kompresor	1	UNIT	2.000.000
	Har Poliklinik Umum			
	Tensimeter Manual	1	UNIT	400.000
	Stetoskop	1	UNIT	80.000
	Refleks Hammer	1	UNIT	60.000
	Neer Baken	1	UNIT	30.000
	Senter	1	UNIT	15.000
	Timbangan Badan	1	UNIT	1.500.000
	Resuscitator Set	1	UNIT	1.000.000
MR	Pemeliharaan Peralatan Fungsional (Polres)			
	Har HT	749	UNIT	349.100.000
	Radio Rik	26	UNIT	41.855.000
	Har Senpi Bahu	566	UNIT	19.988.000
	Har Senpi Genggam	1.413	UNIT	44.623.000
	Har Handy Cam	9	UNIT	4.800.000
	Har Mesin Pemotong Rumput	2	UNIT	500.000
	Har Repeater	9	UNIT	60.693.000
	Har Alsus Pengindraan Fungsi Intelkam			
	Har Camera Digital	6	UNIT	2.710.000
	Har Voice Recorder	5	UNIT	2.500.000
	Har Handphone PDA	8	UNIT	4.000.000
	Harwat Fixed Station	15	UNIT	29.200.000

Harwat

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Harwat Fixed Mobile	19	UNIT	23.500.000
	Har AC	11	UNIT	5.830.000
	Har Inventaris Kantor	114	UNIT	6.724.000
	Har Komputer atau PC Unit	71	UNIT	35.500.000
	Har Printer	35	UNIT	12.250.000
	Harwat Tranciver Portable	1	UNIT	750.000
	Harwat Tranciver Stationery	5	UNIT	3.750.000
MS	Pemeliharaan Peralatan Fungsional Polsek			
	Har Camera Digital (Alsus Pengindraan Fungsi Intelkam)	26	UNIT	13.000.000
	Har Voice Recorder (Alsus Pengindraan Fungsi Intelkam)	26	UNIT	13.000.000
	Har Handphone PDA (Alsus Pengindraan Fungsi Intelkam)	22	UNIT	11.000.000
	Har Senpi Genggam	14	UNIT	560.000
	Har Senpi Bahu / Laras Panjang	7	UNIT	420.000
	Har Komputer	87	UNIT	44.700.000
	Har Printer	47	UNIT	18.850.000
	Har Laptop	1	UNIT	200.000
	Har Handy Talky (HT)	5	UNIT	2.000.000
OC	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor (Polda)			
	ATK Rutin Satker	1	UNIT	60.440.000
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
AJ	Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang			
	Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang	25	KG	500.000
BO	Kegiatan Pembinaan			
	Penyerahan DIPA, Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Pendistribusian Anggaran serta Rengiat	1	GIAT	760.000
	Penyusunan Calk Keuangan Rolog	2	GIAT	1.000.000
	Kegiatan Penghapusan Ranmor Dinas dan Alsus	1	GIAT	51.090.000
	Kegiatan Pelatihan Barang dan Jasa	1	GIAT	103.904.000
	Kegiatan Penelitian dan Validasi Rkbmn Tingkat Polda	1	GIAT	19.000.000
	Kegiatan Penyusunan PSP	1	GIAT	19.000.000
	Kegiatan Penyusunan SIRUP	1	GIAT	27.704.000
	Kegiatan Rekon TW III	1	GIAT	19.000.000
	Kegiatan Rekonsiliasi Simak-Bmn Semester I dan II	2	GIAT	38.000.000
	Jaldis Rekon dan Penyusunan RKBMN	1	GIAT	186.554.000
	Transpor Dalam Kota	12	GIAT	7.200.000
D	Honorarium Sai/Sakpa/Simak/Smap/Pengelola Keuangan			
	Honor Penanggung Simak Wilayah	12	OB	3.600.000
	Honor Ketua Kegiatan Operator SIMAK/Persediaan/Siman	12	OB	2.400.000
	Honor Staf Kegiatan Operator E MONEV	12	OB	3.600.000

Honor

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Honor Staf Operator SIMAK (Pengurus/Penyimpan BMN)	24	OB	7.200.000
	Honor Staf Kegiatan Operator SAIBA	12	OB	1.800.000
	honor Operator SIRENA	12	OB	3.600.000
HX	Supervisi			
	Supervisi	1	GIAT	56.530.000
JF	Dukopsnal Satker			
	Dukops Satker	1	TAHUN	69.252.000
jw	ULP Non Organik / Jaga Fungsi			
	Jaga SPBP	730	OH	45.990.000
KQ	Penyusunan Program, Anggaran Dan Rencana Kerja			
	Kegiatan Rapat Penyusunan Rancangan Renja Satker	1	GIAT	748.000
	Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Satker	1	GIAT	748.000
KR	Penyusunan RKA-KL dan DIPA			
	Kegiatan Penyusunan Pagu Ideal	1	GIAT	600.000
	Kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif	1	GIAT	600.000
	Kegiatan Penyusunan Pagu Anggaran	1	GIAT	600.000
	Jaldis Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran T.A 2026 di Jakarta	1	GIAT	20.490.000
KS	Penyusunan Evaluasi LKIP			
	Penyusunan LKIP	1	GIAT	748.000
KV	Penyusunan Perjanjian Kinerja			
	Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Satker	1	GIAT	748.000
LN	Pemeliharaan Gedung Negara			
	Har Gedung Klinik FKTP Polda Sultra	96	M2	12.192.000
	Har Halaman Klinik FKTP Polda Sultra	8	M2	80.000
	Har Gedung Pelayanan SKCK	100	M2	17.100.000
LO	Pemeliharaan Gedung Kantor Polres			
	Harwat Ruang Pelayanan SKCK	530	M2	102.050.000
	Har halaman gedung SKCK	87	M2	7.310.000
LR	Pemeliharaan Gedung Kesehatan			
	Kebersihan Rumkit Bhayangkara TK.III Kendari	12	M2	2.400.000.000
	Perlengkapan Pemeliharaan IPAL	1	M2	250.000.000
	Pemeliharaan Gedung BLU	1	M2	1.138.886.000
MA	Pemeliharaan Peralatan Kantor (Polres)			
	Pemeliharaan Komputer Polres Fungsi Intelkam	14	UNIT	10.220.000
	Har AC Ruang Pelayanan SIM	25	UNIT	14.000.000
	Har peralatan pada ruang pada pelayanan SIM	1	UNIT	13.600.000

MB Pemeliharaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
MB	Pemeliharaan Peralatan Kantor (Polsek)			
	Pemeliharaan Komputer Polsek Fungsi Intelkam	55	UNIT	40.150.000
MH	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10			
	Pemeliharaan Ranmor BLU	3	UNIT	93.000.000
	Sedan Patroli/Patwal	9	UNIT	140.000.000
	mobil supervisi	3	UNIT	18.270.000
	Pick Up Double Cabin 2800 CC	7	UNIT	180.000.000
MI	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10 (Polres)			
	Honor PPK	1	GIAT	1.000.000
	Honor Pejabat Pengadaan	1	GIAT	680.000
	Administrasi	1	GIAT	320.000
	Double Cabin Patroli	15	UNIT	406.000.000
	Sedan Patroli / Patwal	18	UNIT	396.307.000
	R4 Uji SIM	6	UNIT	88.800.000
	R4 Patroli	8	UNIT	145.700.000
	Ran Laka Lintas	7	UNIT	169.424.000
	Penling	2	UNIT	32.000.000
	Yan SIM	3	UNIT	52.000.000
MK	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2			
	Pemeliharaan Ranmor Roda 2 BLU	2	UNIT	7.000.000
	Roda 2 (800 - 1250 CC)	15	UNIT	82.500.000
	Roda 2 (200 CC - 225 CC)	15	UNIT	51.960.000
	Roda 2 (115CC - 150 CC)	16	UNIT	36.160.000
ML	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 (Polres)			
	Roda 2 225 CC	91	UNIT	342.160.000
	Roda 2 125 CC	17	UNIT	55.780.000
	Har Ranmor Roda 2 patwal 900 CC	2	UNIT	27.820.000
	Har Ranmor Roda 2 uji sim	4	UNIT	15.720.000
	Har Ranmor Roda 2 patwal 150 cc	11	UNIT	43.140.000
MP	Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Har Komputer Ditintelkam	4	UNIT	2.920.000
MQ	Pemeliharaan Peralatan Fungsional			
	Pemeliharaan Alkes BLU			
	Har Alkes BLU			
	Diagnostik Set	1	UNIT	2.500.000
	Head Lamp	1	UNIT	1.000.000
	Timbangan Badan	2	UNIT	1.000.000
	Timbangan Bayi	1	UNIT	500.000
	Instrumen Kabinet	2	UNIT	800.000
	Autoclave Table	2	UNIT	5.000.000
	Brancard	6	UNIT	3.000.000
	Low pressure Continus	1	UNIT	1.000.000
	Kursi Dorong	3	UNIT	1.500.000
	Suction Pump	3	UNIT	1.500.000
	Syringe Pump	3	UNIT	1.500.000
	Tromol Hass	4	UNIT	400.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Utility Trolley	8	UNIT	800.000
	UV Sterilizer	1	UNIT	2.500.000
	Dental Unit	1	UNIT	5.000.000
	Cirto Jet	1	UNIT	2.000.000
	Light Curing Unit	1	UNIT	500.000
	Compressor gigi	1	UNIT	2.000.000
	Minor Surgeri Set	3	UNIT	750.000
	Mayor Surgeri Set	1	UNIT	230.000
	Opearating Table Bedah	1	UNIT	1.000.000
	Electro Surgery Unit	1	UNIT	2.500.000
	Emergency Trolley	2	UNIT	500.000
	Laparotomi Set	1	UNIT	800.000
	Gynecological Examining Table	1	UNIT	500.000
	Baby Incubator	1	UNIT	1.000.000
	Tonsilektomi Set	2	UNIT	1.600.000
	Othoscope	2	UNIT	1.000.000
	X-Ray Viewer	6	UNIT	600.000
	Ultrasonic Nebulizer	2	UNIT	1.000.000
	USG Internal Medicine	1	UNIT	5.000.000
	Defibrilator	2	UNIT	800.000
	Motuary Refrigerator	1	UNIT	500.000
	Autopsi Set	3	UNIT	2.250.000
	Suction Hand Pump	1	UNIT	500.000
	Premature Infant Incubator	1	UNIT	750.000
	Electric Sterilisator	1	UNIT	2.500.000
	Infant Incubator Mobile	2	UNIT	5.000.000
	Wheel Chair (Alkes Rehab Medik)	1	UNIT	300.000
	Electro Stimulation Analgesia	1	UNIT	550.000
	Infra Red dan ultraviolet	1	UNIT	100.000
	Traction Unit	1	UNIT	600.000
	Patient Monitor	3	UNIT	7.500.000
	Infant Ventilator	1	UNIT	2.500.000
	Bed electric 3 crank	1	UNIT	2.500.000
	Bed pasien 2 crank manual	5	UNIT	12.500.000
	Bronchscopy	1	UNIT	5.000.000
	X ray	1	UNIT	15.000.000
	ECG 12 Chanel	1	UNIT	10.000.000
	Endoscopy	1	UNIT	10.000.000
	Treadmil	1	UNIT	15.000.000
	Ginecology Examination Bed	1	UNIT	2.500.000
	Head Lamp	1	UNIT	400.000
	Holmium Laser	1	UNIT	2.500.000
	Infus Pump	1	UNIT	500.000
	LED Operasi	1	UNIT	1.000.000
	LED Vein Finder	1	UNIT	1.000.000
	Mobile Suction Pump	1	UNIT	500.000
	Meja Operasi	1	UNIT	7.500.000
	Pararel Bar Dewasa dan Anak	1	UNIT	1.000.000
	Pasien strecher	1	UNIT	2.000.000
	Spirometri	1	UNIT	4.000.000
	Siring Pump	1	UNIT	500.000
	Trans Cranial Agenitik	1	UNIT	10.000.000
	USG Echo Cardiac	1	UNIT	12.230.000
	USG 3 Dimensi	1	UNIT	500.000
	THT Set	1	UNIT	1.000.000

Ventilator

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Ventilator	5	UNIT	38.540.000
	Har Alkes Blu CR (Computer Radiografi)			
	CR Carestream	1	UNIT	21.500.000
	Pemeliharaan Peralatan BLU			
	Har Alat-Alat BLU			
	Mesin Pompa Air	4	UNIT	6.500.000
	Lemari Kayu	50	UNIT	10.000.000
	CCTV	6	UNIT	12.000.000
	Mesin Cuci	10	UNIT	10.290.000
	Lemari es	19	UNIT	14.250.000
	AC Split	75	UNIT	39.300.000
	Televisi	60	UNIT	15.000.000
	Dispenser	30	UNIT	14.691.000
	Genset Besar 450 KVA	1	UNIT	20.374.000
	Laptop/Komputer	30	UNIT	17.400.000
	Printer	20	UNIT	11.100.000
	Freezer 300 Liter	2	UNIT	4.662.000
	Kursi Tunggu Pasien 4 Seat	60	UNIT	15.000.000
	1. SATPAS P1			
	a. Jasa Harwat Hardware	5	UNIT	192.181.000
	b. Jasa Harwat Software	5	UNIT	14.625.000
	2. SATPAS P2			
	a. Jasa Harwat Hardware	3	UNIT	137.088.000
	b. Jasa Harwat Software	3	UNIT	17.925.000
	3. SATPAS P3			
	Jasa Harwat Hardware	1	UNIT	81.729.000
	4. SIM Keliling			
	a. Jasa Harwat Hardware	3	UNIT	82.616.000
	b. Jasa Harwat Software	3	UNIT	6.075.000
MR	Pemeliharaan Peralatan Fungsional (Polres)			
	Harwat Peralatan Ruang Pelayanan SIM	8	UNIT	95.930.000
	Har Komputer Fungsi Intelkam Polres	8	UNIT	18.710.000
MS	Pemeliharaan Peralatan Fungsional (Polsek)			
	Har Komputer Polsek	71	UNIT	51.830.000
NI	Pengadaan BMP			
	Pengadaan BMP	1	PAKET	200.000.000
5061	Pengembangan Perbekalan Umum			
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
NH	Pengadaan Kapor Polri			
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	10	OB	30.100.000
	Kuasa Pengguna Anggaran	10	OB	29.200.000
	Pejabat Pembuat Komitmen	10	OB	10.900.000
	Bendahara Pengeluaran	30	OB	24.300.000
	Staf Bendahara Pengeluaran	10	OB	12.500.000
	Pejabat PPSPM			
	Pengadaan Kapor Polri Paket I	1	PAKET	11.377.600.000
	Pengadaan Kapor Polri Paket II	1	PAKET	4.636.305.000
	Pengadaan Kapor Polri Paket III	1	PAKET	2.617.035.000
	Pengadaan Kapor Polri Paket IV	1	PAKET	5.130.148.000
	Jaldis Pengelolaan Barang dan Jasa	4	GIAT	396.737.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
NI	Pengadaan BMP			
	Pengadaan BMP Mapolda	1	PAKET	6.174.434.000
	Pengadaan BMP Genset Mapolda	1	PAKET	100.000.000
	Pengadaan BMP SPN	1	PAKET	292.538.000
	BMP Satuan Brimob	1	PAKET	2.203.532.000
	BMP Fungsi Lantas (PNBP)	1	PAKET	1.807.140.000
	Pengadaan BMP Obvit	1	PAKET	525.250.000
	Pengadaan BMP Ditpolair	1	PAKET	4.281.825.000
	Pengadaan BMP Ditsamapta	1	PAKET	1.170.935.000
	Pengadaan BMP Polres	14	PAKET	11.897.070.000
	Pengadaan BMP Sat Polair	3	PAKET	975.839.000
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
NE	BMP Fungsi Lantas (PNBP)			
	Pengadaan BMP Fungsi Lantas Polres	14	PAKET	5.340.824.000
5062	Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri			
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
MV	Biaya Listrik			
	Listrik	1	TAHUN	5.790.623.000
MW	Biaya Air			
	Air	1	TAHUN	457.191.000
VV	Pembangunan Poliklinik			
	Pembangunan Poliklinik Fktp Polres Buton Tengah	1	PAKET	100.000.000
	Pembangunan Poliklinik Fktp Polres Kolaka Timur	1	PAKET	100.000.000
078	Pembangunan Fasilitas Kesehatan			
WE	Pembangunan Gedung Khusus			
	Bangunan Gedung Perawatan	1	PAKET	500.000.000

d. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

1) tujuan:

terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional Polri dan informasi kepolisian serta melaksanakan kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi/dini, *preemptif* dan *preventif*.

2) kegiatan:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
060.01.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			
3112	Analisis Keamanan			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
CV	Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polres)			
	Giat Pulbaket	3.355	GIAT	322.590.000

CW Deteksi

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
CW	Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polsek)			
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi)	3.386	GIAT	253.270.000
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi Khusus)	2.164	GIAT	158.020.000
CZ	Deteksi / Deteksi Aksi (Polres)			
	Giat Pulbaket	400	GIAT	22.000.000
	Telaahan Mingguan	141	GIAT	26.100.000
	Telaahan Bulanan	24	GIAT	5.400.000
	Perkiraan Cepat (Kirpat)	16	GIAT	3.806.000
	Perkiraan Khusus Operasi Intelijen	18	GIAT	5.694.000
	Perkiraan Operasi Kepolisian	8	GIAT	2.000.000
	Laporan Atensia	12	GIAT	4.858.000
DA	Deteksi / Deteksi Aksi (Polsek)			
	Giat Pulbaket	2.760	GIAT	168.000.000
	Telaahan Bulanan Sek	216	GIAT	64.800.000
DY	Analisis Keamanan			
	Pulbaket Sumber Terbuka Intelijen Polres	92	GIAT	14.324.000
	Telming	562	GIAT	398.256.000
	Telbul	144	GIAT	144.228.000
	Telaahan Intelijen	107	GIAT	103.002.000
	Telaahan Singkat	189	GIAT	156.312.000
	Perkiraan Cepat	63	GIAT	49.218.000
	Perkiraan Singkat	173	GIAT	179.236.000
	Kir Ops Kepolisian	131	GIAT	144.134.000
	Perkiraan Khusus Intelijen (Kirsus Pam Presiden/Wapres/VVIP)	34	GIAT	28.912.000
	Laporan Atensia	78	GIAT	57.714.000
	Bahan Pimpinan	46	GIAT	75.244.000
	Nota Intelijen	48	GIAT	34.920.000
	Intel Dasar	3	GIAT	4.419.000
	Kir Kontinjensi	3	GIAT	6.381.000
	Memo Intelijen	11	GIAT	14.209.000
	Kirka Tahunan	5	GIAT	7.224.000
	Kirka 5 Tahunan	1	GIAT	1.604.000
	Pulbaket Sumber Terbuka	566	GIAT	113.200.000
	Perkiraan Bulanan	48	GIAT	68.928.000
	Laporan Informasi	300	GIAT	40.500.000
	Telaan Bulanan Sek	204	GIAT	37.200.000
3114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
CU	Deteksi / Deteksi Aksi			
	Pulbaket (Infosus) (PNBP)	27	GIAT	4.995.000
	Pulbaket (Laporan Informasi)	1.073	GIAT	76.090.000
	Laporan Informasi Khusus Polres	13	GIAT	2.405.000
CV	Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polres)			
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi Khusus) PNBP	63	GIAT	11.655.000
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi)	880	GIAT	119.150.000
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi Khusus)	294	GIAT	54.390.000
	Deteksi atau Penyelidikan dan Pengamanan Intelijen SatIntelkam	60	GIAT	60.000.000

NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024

TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
CW	Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polsek)			
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi)	1.925	GIAT	157.555.000
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi Khusus)	251	GIAT	46.435.000
CY	Deteksi / Deteksi Aksi			
	Deteksi / Penyelidikan Intelijen (PNBP)	216	GIAT	56.106.000
	Deteksi / Penyelidikan Intelijen	258	GIAT	203.695.000
	Dukungan Alsus Inteltek Bidang Politik	6	GIAT	42.480.000
CZ	Deteksi / Deteksi Aksi (Polres)			
	Deteksi / Penyelidikan dan Pengamanan Intelijen	162	GIAT	127.213.000
	Laporan Informasi	7	GIAT	1.295.000
DA	Deteksi / Deteksi Aksi (Polsek)			
	Deteksi Penyelidikan dan Pengamanan Intelijen	350	GIAT	126.720.000
	Laporan Informasi	80	GIAT	10.800.000
	Laporan Informasi Khusus	24	GIAT	4.440.000
DC	Lidik Taktis Intel (Polres)			
	Lidik Taktis Intel	41	GIAT	21.880.000
DE	Pembentukan Jaringan Intelijen			
	Pembentukan Jaringan Intelijen	10	GIAT	31.000.000
DF	Pembentukan Jaringan Intelijen (Polres)			
	Pembentukan Jaringan Intelijen	34	GIAT	62.517.000
DG	Pembentukan Jaringan Intelijen (Polsek)			
	Pembentukan Jaringan Intelijen	114	GIAT	133.650.000
DH	Pembentukan Jaringan Intelijen			
	Pembinaan Jaringan Intelijen	2	GIAT	7.655.000
DI	Pembinaan Intelijen (Polres)			
	Pembinaan Jaringan Intelijen	59	GIAT	102.221.000
	Pembentukan Jaringan Intelijen	13	GIAT	27.650.000
DJ	Pembinaan Intelijen (Polsek)			
	Pembinaan Jaringan Intelijen	198	GIAT	213.650.000
	Pembentukan Jaringan Intelijen Unit Intelkam Polsek Mandonga	116	GIAT	170.000.000
DL	Pengamanan Intelijen (Polres)			
	Pengamanan Intelijen	104	GIAT	35.000.000
DN	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan			
	Penggalangan Sasaran Perorangan (PNBP)	4	GIAT	88.000.000
	Penggalangan Sasaran Perorangan	2	GIAT	34.000.000
DO	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan (Polres)			
	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan	78	GIAT	511.651.000

DP Penggalangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
DP	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok			
	Penggalangan Sasaran Kelompok	2	GIAT	62.000.000
DQ	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok (Polres)			
	Penggalangan Intelijen (Sasaran kelompok	18	GIAT	89.690.000
DR	Tukjar Binjar Intelijen Khusus			
	Tukjar Dan Binjar Tingkat Polda			
	Spoting Personel (dalam bentuk lidik)	8	GIAT	8.312.000
	Latkatpuan kepada Jaringan	1	GIAT	57.564.000
	FGD	1	GIAT	62.080.000
	Pengerahan Massa	3	GIAT	33.000.000
	Anev Galsus dan Tukbinjarsus	4	GIAT	215.600.000
	Dana Pembinaan Jaringan			
	Jaringan Tahun 2018 - 2024	636	GIAT	318.000.000
	Jaringan Tahun 2025	32	GIAT	16.000.000
DS	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan Khusus			
	Penggalangan Intelijen sasaran perorangan khusus	5	GIAT	443.410.000
DT	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok Khusus			
	Penggalangan Intelijen sasaran kelompok khusus	3	GIAT	510.120.000
DU	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan Khusus Polres			
	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan Khusus	2	GIAT	45.912.000
DV	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok Khusus Polres			
	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok Khusus	2	GIAT	64.322.000
3115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
CU	Deteksi / Deteksi Aksi			
	Pulbaket (Infosus) (PNBP)	20	GIAT	3.700.000
	Pulbaket (Laporan Informasi)	809	GIAT	40.450.000
CV	Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polres)			
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi Khusus) (PNBP)	70	GIAT	12.950.000
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi)	834	GIAT	112.940.000
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi Khusus)	196	GIAT	36.260.000
	Deteksi atau Penyelidikan dan Pengamanan Intelijen	64	GIAT	64.000.000
CW	Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polsek)			
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi)	2.292	GIAT	206.860.000
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi Khusus)	316	GIAT	58.460.000

CY Deteksi

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
CY	Deteksi / Deteksi Aksi			
	Deteksi / Penyelidikan Intelijen (PNBP)	144	GIAT	37.404.000
	Deteksi / Penyelidikan Intelijen	240	GIAT	198.000.000
	Dukungan Alsus Inteltek Bidang Ekonomi	6	GIAT	42.480.000
CZ	Deteksi / Deteksi Aksi (Polres)			
	Deteksi / Penyelidikan dan Pengamanan Intelijen	186	GIAT	141.233.000
	Deteksi Penyelidikan dan Pengamanan Intelijen (PNBP)	19	GIAT	7.295.000
	Laporan Informasi	192	GIAT	25.920.000
	Laporan Informasi Khusus	40	GIAT	7.400.000
DA	Deteksi / Deteksi Aksi (Polsek)			
	Deteksi Penyelidikan dan Pengamanan Intelijen	355	GIAT	128.985.000
DC	Lidik Taktis Intel (Polres)			
	Lidik Taktis Intel	82	GIAT	27.060.000
DE	Pembentukan Jaringan Intelijen			
	Pembentukan Jaringan Intelijen	2	GIAT	15.000.000
DF	Pembentukan Jaringan Intelijen (Polres)			
	Pembentukan Jaringan Intelijen	69	GIAT	118.517.000
DG	Pembentukan Jaringan Intelijen (Polsek)			
	Pembentukan Jaringan Intelijen	109	GIAT	130.250.000
DH	Pembentukan Jaringan Intelijen			
	Pembinaan Jaringan Intelijen	2	GIAT	7.655.000
DI	Pembinaan Intelijen (Polres)			
	Pembinaan Jaringan Intelijen	88	GIAT	115.211.000
	Pembentukan Jaringan Intelijen	16	GIAT	34.104.000
DJ	Pembinaan Intelijen (Polres)			
	Pembinaan Jaringan Intelijen	234	GIAT	286.450.000
	Pembentukan Jaringan Intelijen	57	GIAT	85.500.000
DL	Pengamanan Intelijen (Polres)			
	Pengamanan Intelijen	104		35.000.000
DN	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan			
	Penggalangan Sasaran Perorangan (PNBP)	4	GIAT	88.000.000
	Penggalangan Sasaran Perorangan	2	GIAT	34.000.000
DO	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan (Polres)			
	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan	85	GIAT	497.127.000
DP	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok			
	Penggalangan Sasaran Kelompok	2	GIAT	62.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
DQ	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok (Polres)			
	Penggalangan Intelijen (Sasaran kelompok)	15	GIAT	72.137.000
DR	Tukjar Binjar Intelijen Khusus			
	Tukjar Dan Binjar Tingkat Polda			
	Spoting Personel (dalam bentuk liding)	8	GIAT	8.312.000
	FGD	1	GIAT	62.080.000
	Pengerahan Massa	2	GIAT	22.000.000
	Dana Pembinaan Jaringan			
	Jaringan Tahun 2018 - 2024	336	GIAT	168.000.000
	Jaringan Tahun 2025	32	GIAT	16.000.000
DS	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan Khusus			
	Penggalangan Intelijen sasaran perorangan khusus	4	GIAT	354.728.000
DT	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok Khusus			
	Penggalangan Intelijen sasaran kelompok khusus	3	GIAT	510.120.000
DU	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan Khusus Polres			
	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan Khusus	1	GIAT	22.956.000
DV	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok Khusus Polres			
	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok Khusus	1	GIAT	32.216.000
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
CU	Deteksi / Deteksi Aksi			
	Pulbaket (Infosus) (PNBP)	27	GIAT	4.995.000
	Pulbaket (Laporan Informasi)	824	GIAT	43.225.000
CV	Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polres)			
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi Khusus) (PNBP)	63	GIAT	11.655.000
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi)	1.478	GIAT	153.130.000
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi Khusus)	236	GIAT	43.660.000
	Penyelidikan Intelijen	112	GIAT	79.840.000
CW	Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polsek)			
	Giat Pulbaket	1.399	GIAT	132.865.000
	Giat Pulbaket khusus	211	GIAT	39.035.000
CY	Deteksi / Deteksi Aksi			
	Deteksi / Penyelidikan Intelijen (PNBP)	216	GIAT	56.106.000
	Deteksi / Penyelidikan Intelijen	240	GIAT	198.000.000
	Dukungan Alsus Inteltek Bidang Ekonomi	6	GIAT	42.480.000

CZ Deteksi

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
CZ	Deteksi / Deteksi Aksi (Polres)			
	Deteksi / Penyelidikan dan Pengamanan Intelijen	164	GIAT	115.208.000
	Laporan Informasi	7	GIAT	1.295.000
DA	Deteksi / Deteksi Aksi (Polsek)			
	Deteksi Penyelidikan dan Pengamanan Intelijen	347	GIAT	126.845.000
	Laporan Informasi	49	GIAT	6.615.000
	Laporan Informasi Khusus	21	GIAT	3.885.000
DE	Pembentukan Jaringan Intelijen			
	Pembentukan Jaringan Intelijen	6	GIAT	23.000.000
DF	Pembentukan Jaringan Intelijen (Polres)			
	Pembentukan Jaringan Intelijen	86	GIAT	142.417.000
DG	Pembentukan Jaringan Intelijen (Polsek)			
	Pembentukan Jaringan Intelijen	85	GIAT	92.450.000
DH	Pembentukan Jaringan Intelijen			
	Pembinaan Jaringan Intelijen	2	GIAT	9.260.000
DI	Pembinaan Intelijen (Polres)			
	Pembinaan Jaringan Intelijen	75	GIAT	122.121.000
	Pembentukan Jaringan Intelijen	13	GIAT	27.650.000
DJ	Pembinaan Intelijen (Polsek)			
	Pembinaan Jaringan Intelijen	204	GIAT	220.450.000
	Pembentukan Jaringan Intelijen	108	GIAT	162.000.000
DL	Pengamanan Intelijen (Polres)			
	Pengamanan Intelijen	34	GIAT	11.900.000
DM	Pengamanan Intelijen (Polsek)			
	Pengamanan Intelijen	80	GIAT	8.400.000
DN	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan			
	Penggalangan Sasaran Perorangan (PNBP)	4	GIAT	88.000.000
	Penggalangan Sasaran Perorangan	2	GIAT	34.000.000
DO	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan (Polres)			
	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan	65	GIAT	425.871.000
DP	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok			
	Penggalangan Sasaran Kelompok	4	GIAT	71.514.000
DQ	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok (Polres)			
	Penggalangan Intelijen sasaran	20	GIAT	96.704.000
DR	Tukjar Binjar Intelijen Khusus			
	Tukjar Dan Binjar Tingkat Polda			
	Spoting Personel (dalam bentuk lidik)	8	GIAT	8.312.000
	FGD	1	GIAT	62.080.000

Pengerahan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Pengerahan Massa	3	GIAT	33.000.000
	Dana Pembinaan Jaringan			
	Jaringan Tahun 2018 - 2024	636	GIAT	318.000.000
	Jaringan Tahun 2025	32	GIAT	16.000.000
DS	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan Khusus			
	Penggalangan Intelijen sasaran perorangan khusus	5	GIAT	443.410.000
DT	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok Khusus			
	Penggalangan Intelijen sasaran kelompok khusus	3	GIAT	510.120.000
DU	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan Khusus Polres			
	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan Khusus	3	GIAT	68.868.000
DV	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok Khusus Polres			
	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok Khusus	3	GIAT	90.378.000
DW	Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polsek)			
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi)	247	GIAT	33.345.000
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi Khusus)	103	GIAT	19.055.000
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
CU	Deteksi / Deteksi Aksi			
	Pulbaket (Infosus) (PNBP)	39	GIAT	7.215.000
	Pulbaket (Laporan Informasi)	816	GIAT	41.745.000
CV	Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polres)			
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi Khusus) (PNBP)	81	GIAT	14.985.000
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi)	930	GIAT	125.550.000
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi Khusus)	151	GIAT	27.935.000
	Deteksi atau Penyelidikan dan Pengamanan Intelijen	64	GIAT	64.000.000
CW	Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polsek)			
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi)	2.317	GIAT	210.315.000
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi Khusus)	316	GIAT	58.460.000
CY	Deteksi / Deteksi Aksi			
	Deteksi / Penyelidikan Intelijen (PNBP)	144	GIAT	37.404.000
	Deteksi / Penyelidikan Intelijen	240	GIAT	198.000.000
	Dukungan Alsus Inteltek Bidang Ekonomi	6	GIAT	42.480.000
CZ	Deteksi / Deteksi Aksi (Polres)			
	Deteksi / Penyelidikan dan Pengamanan Intelijen	169	GIAT	120.830.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Giat Pulbaket (Lap Infosus)	18	GIAT	3.330.000
DA	Deteksi / Deteksi Aksi (Polsek)			
	Deteksi Penyelidikan dan Pengamanan Intelijen	359	GIAT	132.985.000
	Laporan Informasi	144	GIAT	19.440.000
	Laporan Informasi Khusus	23	GIAT	4.255.000
DC	Lidik Taktis Intel (Polres)			
	Lidik Taktis Intel	30	GIAT	9.900.000
DE	Pembentukan Jaringan Intelijen			
	Pembentukan Jaringan Intelijen	7	GIAT	23.000.000
DF	Pembentukan Jaringan Intelijen (Polres)			
	Pembentukan Jaringan Intelijen	64	GIAT	111.917.000
DG	Pembentukan Jaringan Intelijen (Polsek)			
	Pembentukan Jaringan Intelijen	112	GIAT	132.850.000
DH	Pembentukan Jaringan Intelijen			
	Pembinaan Jaringan Intelijen	2	GIAT	7.740.000
DI	Pembinaan Intelijen (Polres)			
	Pembinaan Jaringan Intelijen	81	GIAT	130.072.000
	Pembentukan Jaringan Intelijen	16	GIAT	34.100.000
DJ	Pembinaan Intelijen (Polsek)			
	Pembinaan Jaringan Intelijen	204	GIAT	216.850.000
	Pembentukan Jaringan Intelijen	93	GIAT	139.500.000
DL	Pengamanan Intelijen (Polres)			
	Pengamanan Intelijen	100	GIAT	33.680.000
DN	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan			
	Penggalangan Sasaran Perorangan (PNBP)	4	GIAT	88.000.000
	Penggalangan Sasaran Perorangan	2	GIAT	34.000.000
DO	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan (Polres)			
	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan	74	GIAT	491.275.000
DP	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok			
	Penggalangan Sasaran Kelompok	2	GIAT	62.000.000
DQ	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok Polres			
	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok	11	GIAT	54.340.000
DR	Tukjar Binjar Intelijen Khusus			
	Tukjar Dan Binjar Tingkat Polda			
	Spoting Personel (dalam bentuk lidik)	8	GIAT	8.312.000
	FGD	1	GIAT	62.080.000
	Pengerahan Massa	2	GIAT	22.000.000
	Dana Pembinaan Jaringan			
	Jaringan Tahun 2018 - 2024	564	GIAT	282.000.000
	Jaringan Tahun 2025	32	GIAT	16.000.000

DS Penggalangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
DS	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan Khusus			
	Penggalangan Intelijen sasaran perorangan khusus	5	GIAT	443.410.000
DT	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok Khusus			
	Penggalangan Intelijen sasaran kelompok khusus	4	GIAT	680.160.000
DU	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan Khusus Polres			
	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan Khusus	1	GIAT	22.956.000
DV	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok Khusus Polres			
	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok Khusus	1	GIAT	31.811.000
LI	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok (Polres)			
	Penggalangan Intelijen (Sasaran kelompok)	10	GIAT	61.630.000
YB	Kegiatan 2 Prioritas Polri			
	Deteksi / Lidik Intelijen	600	GIAT	446.712.000
	Penggalangan Individu	7	GIAT	159.720.000
	Penggalangan Kelompok	11	GIAT	321.279.000
	Pembentukan Jaringan	4	GIAT	35.392.000
	Pembinaan Jaringan	4	GIAT	36.768.000
	Rapat Kasat Intelkam	1	GIAT	30.000.000
3120	Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban K/L			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
ER	Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait			
	Penandatanganan MoU	4	GIAT	17.884.000
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			
001	Gaji dan Tunjangan			
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
	Gaji Dan Tunjangan	1	TAHUN	157.401.128.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
OC	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor			
	ATK Rutin	1	TAHUN	658.348.000
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
AF	Penyusunan Naskah Buku Lainnya			
	Pokja Sun Target Penerimaan dan Penggunaan PNB	1	GIAT	127.040.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
AJ	Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang			
	Pengepakan dan barang	841	GIAT	35.346.000
BI	Peningkatan Kemampuan Personel Satker			
	Latihan SAR Perairan	1	GIAT	10.066.000
	Latihan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Perairan	1	GIAT	10.066.000
	Latihan Juru Mudi Kapal	1	GIAT	10.066.000
	Latihan Menembak	1	GIAT	11.530.000
BO	Kegiatan Pembinaan			
	Pembinaan	3	GIAT	20.273.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota	440	GIAT	66.000.000
	Rakernis Binmas Polda Sultra	1	GIAT	68.142.000
	Kegiatan Binmas Perairan dan Pantai	300	GIAT	15.000.000
CV	Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polsek)			
	Giat Pulbaket (Laporan Infosus)	228	GIAT	30.780.000
	Laporan Informasi	420	GIAT	56.700.000
CZ	Deteksi / Deteksi Aksi (Polsek)			
	Giat Intelijen (Pulbaket)	48	GIAT	6.480.000
D	Honorarium SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/Pengelola Keuangan			
	Honorarium pengelola keuangan			
	Honor Kuasa Pengguna Anggaran	36	OB	88.800.000
	Honor Pejabat Pembuat Komitmen	36	OB	64.800.000
	Honor Pejabat PPSPM	36	OB	36.600.000
	Honor Bendahara Pengeluaran	36	OB	29.880.000
	Honor Staf Bendahara Pengeluaran	108	OB	68.400.000
	Honorarium Operator			
	Honor Pengurus/Penyimpan BMN	84	OB	14.400.000
	Honor Operator SAKPA	96	OB	14.400.000
	Honor Operator E-Monev Bappenas	72	OB	19.800.000
	Honor Operator Sirena dan Monev	84	OB	25.200.000
DA	Deteksi / Deteksi Aksi (Polsek)			
	Giat Pulbaket (Laporan Informasi) Polsek (PNBP)	912	GIAT	123.120.000
DB	Lidik Taktis Intel			
	Deteksi/penyelidikan TP Perairan	60	GIAT	60.000.000
DK	Pengamanan Intelijen			
	Giat Pengamanan Intelijen	14	GIAT	63.000.000
E	Honor Benma/Pembantu Benma			
	Honor Bendahara Penerimaan Intelkam TK. Polda	24	OB	10.200.000
	Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK Intelkam TK. Polda	36	OB	12.600.000
	Honor Pembantu Bendahara Penerimaan Sendak Intelkam Tk. Polda	12	OB	4.200.000

Honor

NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024

TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Honor Pelaksana Sendak TK. Polda	12	OB	6.000.000
	Honor Pelaksana SKCK TK. Polda	12	OB	6.000.000
	Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK Polres	120	OB	42.000.000
	Honor Pelaksana SKCK Tingkat Polres	156	OB	62.400.000
	Honor Pelaksana SKCK Polsek Urban	24	OB	8.400.000
	Honor Pelaksana SKCK Polsek Rural	806	OB	241.800.000
	Honor Pelaksana SKCK Polsek Prarural	564	OB	112.800.000
ET	Pembinaan Lalu Lintas			
	Pembinaan Masyarakat Tak Terorganisir	24	GIAT	26.554.000
EW	Pembinaan Fungsi-Fungsi			
	Dukungan kegiatan fungsi	208	GIAT	9.450.048.000
F	Honor PNB			
	Honor Pengelolah PNB	60	OB	24.000.000
FH	Pengendalian Massa			
	Pengamanan Unjuk Rasa Polres	17.264	OG	639.587.000
FZ	ULP Non Organik / Jaga Fungsi			
	Jaga Piket	6.570	OH	413.910.000
GA	ULP Non Organik / Jaga Fungsi (Polsek)			
	Jaga Piket	8.395	OH	528.885.000
HR	Operasional & Pemeliharaan Jaringan Sistem informasi			
	Giat Pengecekan Repeater HT	3	GIAT	10.500.000
HX	Supervisi			
	Supervisi	6	GIAT	208.128.000
IQ	Kegiatan Pembinaan Provos			
	Dukungan Kegiatan Gaktibplin ke Polsek Jajaran	4	GIAT	10.560.000
	Dukungan Kegiatan di Polda	5	GIAT	12.950.000
	Giat Monitoring dan Evaluasi Sipropam ke Polsek Jajaran	1	GIAT	26.712.000
	Giat Binlihprof Rehab Personel Polres	12	GIAT	4.716.000
	Giat Gaktiplin Anggota Polresta	15	GIAT	75.900.000
	Giat Penyelidikan Paminal	17	GIAT	62.050.000
	Dukungan Kegiatan Lainnya	1	GIAT	212.583.000
JF	Dukopsnal Satker			
	Dukopsnal Satker	1	TAHUN	1.009.176.000
JG	Dukopsnal Polda			
	Dukungan Operasional Polda	1	TAHUN	1.771.000.000
JH	Dukopsnal Polres			
	Dukopsnal Polres	14	TAHUN	8.247.850.000

JI Dukops

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
JI	Dukopsnal Polsek			
	Dukopsnal Polsek	14	TAHUN	5.417.519.000
JS	Operasi Kepolisian Direktif Kapolda			
	Aman Nusa I	1	TAHUN	1.773.100.000
	Aman Nusa II	1	TAHUN	1.251.600.000
	Aman Nusa III	1	TAHUN	542.360.000
	Sispam Kota	1	TAHUN	609.440.000
	Supervisi	1	TAHUN	3.500.000
JW	ULP Non Organik / Jaga Fungsi			
	Piket Siaga Ops	1.095	OH	68.985.000
	Piket Siaga SPKT	1.460	OH	91.980.000
	Piket Call Center	365	OH	22.995.000
	Jaga Piket Makosat	14.235	OH	896.805.000
	Jaga Piket Batalyon C Pelopor (Totallang)	1.825	OH	114.975.000
	Jaga Piket Batalyon B Pelopor (Batauga	2.920	OH	183.960.000
	Jaga Fungsi	5.112	OH	322.056.000
	Piket Yanmin Polda	1.040	OH	13.000.000
JX	ULP Non Organik / Jaga Fungsi (Polres)			
	ULP Non Organik Polres	68.255	OH	4.300.065.000
	ULP Non Organik Sat Polairud	2.920	OH	183.960.000
JY	ULP Non Organik / Jaga Fungsi (Polsek)			
	ULP Non Organik Polsek	110.230	OH	6.944.490.000
JZ	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/Uang Makan PNS			
	Extra Fooding Latihan dan Pembinaan Jasmani Yon C pelopor	528	OH	4.752.000
	Extra Fooding Latihan dan Pembinaan Jasmani Yon B pelopor	1.392	OH	12.528.000
	Extra Fooding Latihan dan Pembinaan Jasmani Yon A Pelopor	4.560	OH	41.040.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh Operator Sakti	317	OH	6.023.000
KN	Evaluasi/Laporan Kegiatan			
	Kegiatan Gelar Operasi	1	GIAT	11.490.000
	Kegiatan Anev Sitkamtibmas	3	GIAT	29.700.000
	Kegiatan Latkatpuan Dalsitkamtibmas	2	GIAT	14.070.000
	Penyusunan Laporan Evaluasi Anggaran dan SMART	4	GIAT	1.320.000
KQ	Penyusunan Program, Anggaran dan Rencana Kerja			
	Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Satker	6	GIAT	4.096.000
	Kegiatan Penyusunan Renja Satker	6	GIAT	4.096.000
	Dukungan Kegiatan Subbag Strajemen Dan Reformasi Birokrasi	7	GIAT	96.916.000
	Dukungan Kegiatan Subbag Dalgar	8	GIAT	97.952.000
	Dukungan Kegiatan Subbag Renprogar	3	GIAT	107.351.000

KR Penyusunan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
KR	Penyusunan RKA-KL dan DIPA			
	Penyusunan Pagu Anggaran	3	GIAT	20.332.000
	Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran	2	GIAT	19.430.000
	Kebutuhan Anggaran	2	GIAT	1.201.000
	Penyusunan Pagu Indikatif	2	GIAT	1.796.000
	Perjalanan Dinas Biasa	5	GIAT	136.256.000
	Penyusunan Monev Anggaran	4	GIAT	840.000
	Penyusunan Rendisgar Satker	1	GIAT	305.000
	Kegiatan Penyusunan dan Reviu Pagu Indikatif di Mabes Polri	1	GIAT	46.600.000
	Kegiatan Penyusunan dan Reviu Pagu Anggaran di Mabes Polri	1	GIAT	46.600.000
	Kegiatan Penyusunan dan reviu Alokasi Anggaran di Mabes Polri	1	GIAT	46.600.000
	Kegiatan Penyusunan dan Reviu Pagu Minus di Mabes Polri	1	GIAT	46.600.000
	Kegiatan Supervisi ke Polsek Jajaran	3	GIAT	18.360.000
	Kegiatan Sun Rencana Aksi di Polda	1	GIAT	7.640.000
	Kegiatan Sun Pagu Indikatif di Polda Sultra	1	GIAT	10.100.000
	Dukungan Sun Pagu Anggaran di Polda Sultra	1	GIAT	10.100.000
	Dukungan Sun Pagu Ideal di Polda Sultra	1	GIAT	10.100.000
	Dukungan Kegiatan Sun TOR dan RAB di Polda Sultra	1	GIAT	10.100.000
	Dukungan Kegiatan Pembinaan Fungsi Perencanaan di Polda Sultra	8	GIAT	61.120.000
KS	Penyusunan Evaluasi LKIP			
	Kegiatan Penyusunan LKIP	6	GIAT	4.807.000
KU	Pembinaan Sistem Dan Manajemen			
	Giat Penyusunan RKBMN T.A. 2025 Terpusat	1	GIAT	15.000.000
	Giat Penyusunan Rekon Sakti Semester I TA. 2025 Terpusat	1	GIAT	15.200.000
	Giat Penyusunan Rekon Sakti Semester II TA. 2025 Terpusat	1	GIAT	25.200.000
	Giat Monev Pengecekan Senpi dan Ranmor di Polsek Jajaran	1	GIAT	10.368.000
	Giat Rekon Sakti Semester I	1	GIAT	1.500.000
	Giat Rekon Sakti Semester II	1	GIAT	1.500.000
	Giat Sun RKBMN	1	GIAT	1.500.000
	Giat Sun RUP	1	GIAT	1.500.000
KV	Penyusunan Perjanjian Kinerja			
	Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Ren Aksi Satker	7	GIAT	5.432.000
LE	Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan			
	Dukungan Kegiatan Visit Home	42	GIAT	107.400.000
	Dukungan Kegiatan di Polda Sultra	5	GIAT	15.300.000
	Giat Kesehatan Lapangan Unras	12	GIAT	115.200.000
	Giat Bakti Kesehatan Masyarakat	11	GIAT	22.880.000
	Giat Patroli Kesehatan Polsek Jajaran (Daratan)	6	GIAT	57.600.000
	Giat Patroli Kesehatan Polsek Jajaran (Kepulauan)	1	GIAT	3.520.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
M	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan			
	Dukungan Kegiatan di Polda Sultra	10	GIAT	89.191.000
	Kegiatan Monev Kinerja dan Anggaran Fungsi Keuangan tingkat wilayah Polda Sultra	25	GIAT	155.000.000
	Kegiatan Pelaporan Tutup Buku tingkat wilayah Polda Sultra	3	GIAT	40.140.000
	Kegiatan Pelaporan Tutup Buku di Jakarta	2	GIAT	55.080.000
	Dukungan Kegiatan Tutup Buku	3	GIAT	14.790.000
	Dukungan kegiatan Fungsi Logistik di Polda	6	GIAT	15.540.000
	Giat Pengajuan SPM dan Rekon di KPPN	12	GIAT	39.600.000
	Giat Koordinasi Pencairan dana Di Bank	12	GIAT	26.400.000
	Giat Koordinasi Laporan dan Rapat di Bidkeu	12	GIAT	26.400.000
	Giat Monev Sikeu ke Polsek Jajaran	2	GIAT	52.096.000
	Giat Sun Laporan Keuangan Triwulan III T.A. 2025 Terpusat	1	GIAT	21.020.000
	Giat Sun Laporan Keuangan Semester I T.A. 2025 Terpusat	1	GIAT	21.020.000
	Giat Sun Laporan Keuangan Semester II T.A. 2025 Terpusat	1	GIAT	21.020.000
	Giat Sun Pagu Minus T.A. 2024 Terpusat	1	GIAT	21.044.000
	Giat Pelaporan SPT Tahunan Personel Polresta Kendari	1	GIAT	21.400.000
MQ	Pemeliharaan Peralatan Fungsional			
	Pemeliharaan Jaringan SKCK Online	2	GIAT	7.200.000
MR	Pemeliharaan Peralatan Fungsional (Polres)			
	Har Jaringan SKCK Online Polres	22	GIAT	82.800.000
	Har Jaringan SKCK Online Polsek	10	GIAT	36.000.000
MX	Biaya Telepon			
	Dukungan Pulsa PDA (Inteltek Helpdeks) Polda	480	GIAT	48.000.000
	Dukungan Pulsa PDA (Inteltek dan Helpdesk) Polres	276	GIAT	27.600.000
	Dukungan Pulsa PDA (Inteltek Helpdesk) Polsek	144	GIAT	14.400.000
OC	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor (Polda)			
	ATK SKCK	1	TAHUN	64.701.000
OD	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor (Polres)			
	ATK Perijinan SKCK Polres	1	TAHUN	254.800.000
OE	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor (Polsek)			
	ATK Perijinan SKCK Polsek	1	TAHUN	608.000.000
W	Pelayanan Konseling			
	Pelayanan Konseling Personil Satbrimob	2	GIAT	50.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
WA	Honor Benma/ Pembantu Benma			
	Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK	12	OB	4.200.000
	Honor pelaksana SKCK Polres	12	OB	4.800.000
	Honor pelaksana SKCK Sek Urban	48	OB	16.800.000
	Honor pelaksana SKCK Sek Rural	96	OB	28.800.000
	Honor pelaksana SKCK Sek PraRural	24	OB	4.800.000
Z	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian			
	Dukungan Kegiatan Bag Ops			
	Kegiatan Anev Kegiatan Operasional Satker Polres	4	GIAT	20.000.000
	Kegiatan Supervisi Bidang Operasional Tingkat Polsek	1	GIAT	8.138.000
	Dukungan Kegiatan Bag Sdm			
	Dukungan kegiatan Pabanrim	2	GIAT	93.900.000
	Dukungan Fungsi SDM di Polda Sultra	10	GIAT	30.000.000
	Giat Monev Bag Sdm Ke Polsek Jajaran	1	GIAT	10.964.000
	Giat Pembinaan Kesehatan Mental Personel Polresta Kendari	4	GIAT	26.400.000
	Giat Binrohtal Personel Polresta Kendari	6	GIAT	15.000.000
	Giat Pembinaan Jasmani Personel Polresta Kendari	6	GIAT	18.000.000
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
BI	Peningkatan Kemampuan Personel Satker			
	Latihan Kemampuan Dalmas	24	GIAT	14.400.000
	Latihan Kemampuan Turjawali	24	GIAT	6.624.000
	Latihan Kemampuan SAR Terbatas	24	GIAT	7.776.000
	Latihan Kemampuan TPTKP	24	GIAT	7.200.000
	Latihan Kemampuan Satwa	24	GIAT	3.600.000
CE	Tindak Pidana Ringan			
	Kegiatan TIPIRING	12	GIAT	2.760.000
FK	Pengendalian Massa			
	Pengamanan Unjuk Rasa	4.440	OG	122.100.000
FK	Menyelenggarakan Pengaturan, Pengawasan dan Patroli (RM)			
	Patroli	1.100	GIAT	67.100.000
	Pengaturan	400	GIAT	8.400.000
	Penjagaan	175	GIAT	3.675.000
HX	Supervisi			
	Supervis	1	GIAT	43.625.000
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
D	Honorarium Sai/Sakpa/Simak/Smapi/Pengelola Keuangan			
	Honor Operator E-Monev	12	OB	3.600.000

Honor

NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024

TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Honor KPA	12	OB	36.120.000
	Honor Bendahara Pengeluaran	12	OB	13.080.000
	Honor Staf Pengelola Keuangan	48	OB	38.880.000
E	Honor Benma / Pembantu Benma			
	Honor Pembantu Bendahara Penerimaan Pam Obvit	25	OB	11.296.000
EN	Penyelenggaraan Pnbp Pamobvitnas/Tertentu			
	Honor Bendahara Penerimaan	60	OB	16.776.000
	Bantuan Pam Obvit/Obvitnas Ditpamobvit	15	OBYEK	18.304.744.000
	Bantuan Pam Obvit/Obvitnas Polres	54	OBYEK	2.718.356.000
EW	Pembinaan Fungsi-Fungsi			
	Pembinaan kemampuan walpri dan PAM VIP	1	GIAT	27.380.000
	Koordinasi Penerapan SMP	1	GIAT	14.500.000
	Koordinasi di wilayah daratan	2	GIAT	29.600.000
	Koordinasi Wilayah Kepulauan	1	GIAT	9.464.000
	Koordinasi/Pengecekan Personil di wilayah Polres Kolaka Utara	2	GIAT	18.320.000
	Asistensi Sispamobvit	1	GIAT	20.400.000
	Koordinasi Lembaga Pemerintahan di Wilayah Hukum Polda Sultra	3	GIAT	17.545.000
FL	Menyelenggarakan Pengaturan, Pengawasan dan Patroli Polres (RM)			
	Uang Saku Destinasi Wisata	10.950	OH	240.900.000
	Uang Makan Destinasi Wisata	10.950	OH	372.300.000
HX	Supervisi			
	Supervisi	1	GIAT	50.385.000
JF	Dukopsnal Satker			
	Dukopsnal Satker	1	TAHUN	373.462.000
JW	ULP Non Organik / Jaga Fungsi			
	ULP Non Organik	730	OH	45.990.000
YI	Kegiatan 9 Prioritas Polri			
	Subdit Pam Waster	576	OG	35.136.000
	Subdit Pam Vip (Kilas Lemneg)	576	OG	35.136.000
	Subdit Pam Wisata	576	OG	35.136.000
	Koordinasi dan Pembinaan Fungsi Pam Ovit terhadap Obvitnas dan Objek tertentu	288	OG	35.136.000
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
E	Honor Benma/Pembantu Benma			
	Honor bendahara penerimaan	156	OB	78.000.000
	Honor Pembantu Bendahara Penerimaan BPKB	60	OB	22.200.000
	Honor Pembantu Benma STNK/STCK	108	OB	39.960.000
	Honor Pembantu Benma TNKB	96	OB	24.600.000

Honor

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Honor Petugas Pelaksana Samsat type D	288	OB	86.400.000
	Honor Bendahara Pembantu Penerimaan SIM	96	OB	35.520.000
	Honor Petugas Pelaksana SIM Level II	780	OB	222.600.000
	Honor Petugas Pelaksana Samsat Type E	360	OB	90.000.000
ET	Pembinaan Lalu Lintas			
	Dikmas Lantas	477	GIAT	398.474.000
	Polsanak	4	GIAT	16.820.000
	Prasjal	5	GIAT	25.678.000
	Police Go To School / Campus	1.087	GIAT	60.850.000
	Askomtiban	2	GIAT	4.152.000
	Penyuluhan Pangkalan Ojek / Terminal	466	GIAT	16.220.000
	Kegiatan Kamseltibcar Lantas			
	Survey Jalan	2	GIAT	42.953.000
	Giat Andalalin	1	GIAT	15.453.000
	Kegiatan Sarang Lantas	4	GIAT	18.162.000
	Peyuluhan Taxi	24	GIAT	3.600.000
	Peyuluhan Tukang Ojek	36	GIAT	10.800.000
	Penyuluhan Pengunjung Pasar Tradisional (Dikmas Lantas)	24	GIAT	12.960.000
	Penyuluhan Pengunjung Mall dan Swalayan (Dikmas Lantas)	24	GIAT	13.171.000
	Dikmas Lantas Sekolah	11	GIAT	10.630.000
	Giat Sosialisasi	172	GIAT	132.610.000
	Polisi Cilik Gabungan SD	48	GIAT	16.960.000
	Polsnak Tk Bhayangkari	24	GIAT	7.200.000
	Saka Bhayangkara Tingkat SMA	36	GIAT	26.400.000
	Dikmas Lantas Polsek	7	GIAT	7.000.000
	Penyuluhan Polisi Sahabat Anak	20	GIAT	16.000.000
	Spanduk Himbauan Keselamatan Berlalulintas	25	GIAT	6.800.000
F	Honor PNB			
	Honor Operator Data Lakalantas Online	288	OB	86.400.000
	Honor Pengelola Materiil SBST	48	OB	12.000.000
FB	Penyelenggaraan Etle			
	Biaya Jasa Pengiriman Surat	14.400	KG	100.800.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh Operator Etle	365	OG	6.935.000
	ATK	1	TAHUN	58.800.000
	Pulsa Listrik Tiang Etle	12	BULAN	19.800.000
	Biaya Listrik Ruang TMC	12	BULAN	60.000.000
	Biaya Listrik Gedung Stpas	1	TAHUN	422.365.000
FN	Menyelenggarakan Pengaturan, Pengawasan dan Patroli Lantas (PNBP)			
	Giat Pengaturan	14.598	OG	306.558.000
	Giat Pengawasan	1.008	OG	61.488.000
	Giat Patroli	12.467	OG	760.487.000
FR	Menyelenggarakan Pengaturan, Pengawasan dan Patroli Lantas Polres (PNBP)			
	Giat Pengaturan	28.230	OG	592.830.000
	Giat Pengawasan	364	OG	22.936.000
	Giat Patroli	31.572	OG	1.925.892.000

FS Menyelenggarakan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
FS	Menyelenggarakan Pengaturan, Pengawasan dan Patroli Lintas Polsek (PNBP)			
	Giat Patroli	1.454	OG	67.094.000
	Pengaturan Lintas	1.212	OG	47.052.000
	Pengawasan Lintas	8	OG	488.000
JB	Sentra Pelayanan Kepolisian			
	Biaya Pulsa Operasional Tablet Pendataan Laka Lintas	1.920	UB	19.200.000
	Honor Operator Data Lakalintas Online	36	OB	8.400.000
JF	Dukopsnal Satker			
	Dukopsnal Satker	1	TAHUN	323.760.000
JL	Operasi Keselamatan			
	Ops Keselamatan	1	OPS	895.215.000
JM	Operasi Patuh			
	Ops Patuh	1	OPS	597.048.000
JN	Operasi Zebra			
	Ops Zebra	1	OPS	597.048.000
MV	Biaya Listrik			
	Biaya Listrik Satpas	1	TAHUN	193.887.000
MX	Biaya Telepon			
	Biaya Telepon dan Internet Satpas	26		43.200.000
3150	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Khusus			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
DB	Lidik Taktis Intel			
	Lidik Taktis	216	GIAT	228.312.000
DN	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan			
	Penggalangan Sasaran Perorangan	5	GIAT	114.780.000
DP	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok			
	Penggalangan Sasaran Kelompok	5	GIAT	161.095.000
DR	Tukjar Binjar Intelijen Khusus			
	Tukjar Dan Binjar Tingkat Polda			
	Spoting Personel (dalam bentuk lidik)	8	GIAT	8.312.000
	FGD	1	GIAT	62.080.000
	Pengerahan Massa	2	GIAT	22.000.000
	Dana Pembinaan Jaringan			
	Jaringan Tahun 2020 - 2023	60	GIAT	30.000.000
	Jaringan Tahun 2024	32	GIAT	16.000.000
DS	Penggalangan Intelijen Sasaran Perorangan Khusus			
	Penggalangan Intelijen sasaran perorangan khusus	5	GIAT	443.410.000

DT Penggalangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
DT	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok Khusus			
	Penggalangan Intelijen sasaran kelompok khusus	3	GIAT	510.120.000
DZ	Kontra Intelijen			
	Kontra Intlijen	40	GIAT	1.148.000.000
5076	Pembinaan Potensi Keamanan			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
BH	Pelatihan			
	Pelatihan	1	GIAT	70.360.000
BO	Kegiatan Pembinaan			
	Giat Pembinaan Saka Bhayangkara Polres	1.932	GIAT	685.444.000
	Giat Pembinaan Polisi Cilik Polres	425	GIAT	285.220.000
	Giat Penyuluhan Narkoba Polres	2.658	GIAT	315.876.000
	Giat Anev Bhabinkamtibmas	11	GIAT	20.635.000
	Giat Asistensi Bhabinkamtibmas ke Polsek Jajaran	1	GIAT	8.294.000
	Perkemahan Perjusami	162	GIAT	24.414.000
DY	Kegiatan Pembinaan			
	Giat Pembinaan Saka Bhayangkara	384	GIAT	73.721.000
	Giat Pembinaan Polisi Cilik	96	GIAT	41.777.000
E	Honor Benma / Pembantu Benma			
	Pejabat pemungutan negara / atasan	12	OB	6.000.000
	Bendahara penerimaan	12	OB	4.800.000
	Staf penerima PNBP / Anggota	12	OB	3.600.000
EW	Pembinaan Fungsi-Fungsi			
	Jaldis Binpuan Bhabinkamtibmas	1	GIAT	30.134.000
	Asistensi Binpolmas	1	GIAT	30.134.000
	Asistensi Bhabinkamtibmas	1	GIAT	30.134.000
	Asistensi Bintibsos	1	GIAT	30.134.000
	Asistensi Binsatpam/Polsus	1	GIAT	30.134.000
GE	Operasional Bhabinkamtibmas			
	Uang Makan Dukungan Opsnal Bhabinkamtibmas	150.147	OH	4.504.410.000
	Dana Satuan Dukungan Opsnal Bhabinkamtibma	150.147	OH	5.255.145.000
GG	Penyelenggaraan PNBP Fungsi Binmas			
	Pemeliharaan			
	Har Laptop	1	UNIT	730.000
	har computer	1	UNIT	730.000
	Har Printer	1	UNIT	690.000
	Rakernis PNBP ke Jakarta	2	GIAT	7.980.000
	Jaringan Internet	12	BULAN	2.520.000
	Supervisi Giat BUJP	1	GIAT	720.000
	Audit Rekomendasi BUJP	1	GIAT	34.500.000
	Pembinaan siskamling	1	GIAT	8.389.000
	Lomba Siskamling	1	GIAT	15.300.000

Peningkatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Peningkatan Kemampuan Kasatkamling	4	GIAT	32.256.000
	Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas	1	GIAT	127.885.000
GL	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pengamanan Swakarsa (Polres)			
	Giat Binkamsa	1.511	OG	190.681.000
GM	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pengamanan Swakarsa (Polsek)			
	Giat Binkamsa	12.356	OG	1.173.884.000
GO	Pemberdayaan Kemitraan dengan Lembaga Pend, Masy, Tkh Masy, Insts, Swasta, Jasa Pengaman, Tkh Agama LSM (Polres)			
	Giat Bintibsos	1.790	OG	168.883.000
	Giat Binpolmas	1.982	OG	186.451.000
GP	Pemberdayaan Kemitraan dgn Lembaga Pendidikan, Tkh Masy, Lembaga Pendidikan, Instansi ,Swasta,Jasa Pengamanan, Tkh Agama & LSM (Polsek)			
	Jaldis Giat Bin FKPM	1	GIAT	6.240.000
	Jaldis Giat Bin Pokdar Kamtibmas	1	GIAT	6.240.000
	Jaldis Giat Bin Ormas	1	GIAT	6.240.000
	Jaldis Giat Bin Kommas	1	GIAT	6.240.000
	Jaldis Giat Bin Korwaspolsus	1	GIAT	6.240.000
	Jaldis Giat Penyuluhan Kamtibmas	1	GIAT	6.240.000
	Jaldis Giat Penilaian Pocil	1	GIAT	12.240.000
	Jaldis Perjusami Saka Bhayangkara	1	GIAT	9.556.000
	GIAT BINTIBSOS	11.746	OG	1.132.858.000
	GIAT BINPOLMAS	11.536	OG	1.111.825.000
GY	Pertemuan Kemitraan Polisi dan Masyarakat (Polsek)			
	Sarana Kontak Giat Kemitraan Polisi dan Masyarakat	8.100	GIAT	121.500.000
HX	Supervisi			
	Supervisi	1	TAHUN	42.171.000
JF	Dukopsnal Satker			
	Dukopsnal Satker	1	TAHUN	211.117.000
YB	Kegiatan 2 Prioritas Polri			
	Kegiatan 2 Prioritas Polri	4	GIAT	12.900.000
	TW I Sosialisasi	1	GIAT	3.750.000
	TW III Penyuluhan Pencegahan	1	GIAT	2.700.000
5079	Pembinaan Operasi Kepolisian			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
JK	Penyelenggaraan Operasi Kepolisian			
	Operasi Pekat Anoa	1	OPS	1.426.052.000
	Operasi Sikat Anoa	1	OPS	1.426.052.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
JO	Operasi Terpusat Lilin			
	Operasi Lilin dan Tahun Baru	1	OPS	2.084.314.000
JP	Operasi Terpusat Ketupat			
	Operasi Ketupat	1	OPS	3.373.855.000
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
FJ	Menyelenggarakan Pengamanan Kepolisian			
	Pengamanan Keramaian Komersil			
	Indeks Pam	2	GIAT	102.816.000
	Analisa Kamtibmas	2	GIAT	5.443.000
5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
LA	Pelayanan Kesehatan dan Makan Satwa			
	Makan Satwa	3.650	EH	182.500.000
	Obat-Obatan dan Sanitasi	3.650	EH	73.000.000
5087	Penanggulangan Keamanan dalam Negeri			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
BI	Peningkatan Kemampuan Personel Satker			
	Bag Operasi			
	Latihan PHH	2	GIAT	55.300.000
	Latihan Jungle Warfare	1	GIAT	17.075.000
	Latihan Urban Warfare	1	GIAT	14.725.000
	Latihan Selam Dasar	1	GIAT	37.100.000
	Latihan PKSSH	1	GIAT	17.075.000
	Batalyon B Pelopor (Batauga)			
	Latihan PHH	2	GIAT	46.250.000
	Latihan PKSSH	2	GIAT	27.450.000
	Batalyon C Pelopor (Totallang)			
	Latihan PHH	2	GIAT	39.200.000
	Latihan PKSSH	2	GIAT	27.450.000
CU	Deteksi Kegiatan Masyarakat			
	Pulbaket	163	GIAT	22.005.000
	Laporan Intelijen	111	GIAT	20.535.000
CY	Deteksi / Deteksi Aksi			
	Deteksi dan Penyelidikan Intelijen	15	GIAT	60.000.000
DH	Pembinaan Intelijen			
	Pembentukan Jaringan Intelijen	11	GIAT	44.000.000
DP	Penggalangan Intelijen Sasaran Kelompok			
	Giat Penggalangan Intelijen	12	GIAT	54.000.000
FK	Menyelenggarakan Pengaturan, Pengawasan dan Patroli			
	Bag Operasi	791	OG	41.923.000
	Batalyon C Pelopor	440	OG	23.320.000
	Batalyon B Pelopor	550	OG	29.150.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
HJ	Menyelenggarakan Humas			
	Dukungan Kegiatan PID Sat Brimob	1	TAHUN	25.320.000
IL	Sidang Disiplin			
	Biaya Pelaksanaan Pemeriksaan s/d Pemberkasan	15	PERKARA	14.250.000
	Sidang Disiplin	1	PERKARA	18.704.000
IN	Pengawasan dan Pembinaan			
	Patroli Dan Pengawasan Personil Satbrimob di THM	480	OG	23.070.000
IQ	Kegiatan Pembinaan Provos			
	Batalyon B Pelopor	2	GIAT	27.000.000
	Batalyon C Pelopor	2	GIAT	23.000.000
JA	Bantuan Pelayanan Masyarakat			
	Kegiatan Bantuan Unit Wanteror	120	OG	6.000.000
	Kegiatan Bantuan Unit Jibom (Sterilisasi)	120	OG	6.000.000
	Kegiatan Bantuan Unit KBR	120	OG	6.000.000
LE	Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan			
	Keslap Rutin	1	GIAT	22.608.000
	Keslap Khusus	6	GIAT	1.884.000

e. Program Dukungan Manajemen.

1) tujuan:

Terwujudnya tata Kelola Polri yang “*good governance* dan *clean government*” melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) kegiatan:

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
060.01.WA	Program Dukungan Manajemen			
3068	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
D	Honorarium SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/Pengelola Keuangan			
	Honor Pengurus/Penyimpan BMN			
	Staf Kegiatan	12	OB	1.800.000
	Honor Operator Sakpa			
	Penanggung Jawab Kegiatan	12	OB	3.600.000
	Staf Kegiatan	12	OB	1.800.000
	Honor Operator Sirena Satker			

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Staf Kegiatan	12	OB	3.600.000
	Honor Operator E-Monev Satker			
	Staf Kegiatan	12	OB	3.600.000
	Honor Pengelola Keuangan Satker			
	Honor KPA	12	OB	18.000.000
	Honor PPK	12	OB	14.400.000
	Honor PPSPM	12	OB	10.800.000
	Honor Bendahara Pengeluaran	12	OB	9.600.000
	Honor Staf PPABP	12	OB	7.200.000
EW	Pembinaan Fungsi-Fungsi			
	Kegiatan Sosialisasi Sunlapkeu Dan Asistensi Fungsi Keu T.A. 2025	1	GIAT	80.000.000
HX	Supervisi			
	Supervisi	2	GIAT	117.008.000
JF	Dukopsnal Satker			
	Dukops Satker	1	TAHUN	274.914.000
KQ	Penyusunan Program, Anggaran Dan Rencana Kerja			
	Penyusunan Rancangan Renja Satker	1	GIAT	390.000
	Penyusunan Renja Satker	1	GIAT	390.000
KR	Penyusunan RKA-KL dan DIPA			
	Penyusunan Pagu Indikatif	1	GIAT	390.000
	Penyusunan Pagu Anggaran	1	GIAT	390.000
	Penyusunan RPD	1	GIAT	390.000
	Penyusunan Kebutuhan Anggaran	1	GIAT	390.000
KS	Penyusunan Evaluasi LKIP			
	Penyusunan LKIP	1	GIAT	390.000
KV	Penyusunan Perjanjian Kinerja			
	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Bidkeu	1	GIAT	370.000
L	Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah			
	Giat Sunlapeku Tutup Buku	1	GIAT	27.877.000
3070	Penerangan Masyarakat			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
HL	Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan			
	Pelayanan Informasi Publik	12	GIAT	21.600.000
	Press Release Akhir Tahun	1	GIAT	18.051.000
	Press Release	86	GIAT	159.498.000
	Bag produk kreatif dan Prod Infografis Edukasi Masyarakat Biro Multimedia	12	GIAT	42.720.000
	Bag Diseminasi Informasi digital Biro Multimedia pada Tim Engagement Media Sosial Polda	12	GIAT	51.600.000

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Bag Pemantauan dan Penggalangan Jaringan Media Online dan Netizen Biro multimedia	12	GIAT	10.400.000
	Pemantauan / Patroli Media Sosial dan Viralisasi	12	GIAT	12.600.000
	Kontrak Iklan melalui Promosi Google	1	GIAT	30.000.000
	Bulanan Promosi melalui Goggle	12	GIAT	30.000.000
	Produk Video Informasi Edukasi Masyarakat	192	GIAT	252.042.000
	Laporan Pembuatan Narasi atau Berita atau Artikel atau Opini Pada Akun Media Sosial Facebook, Instagram, Twiter, dll	48	GIAT	20.400.000
	Laporan Pembuatan Narasi Akun Media dalam Jaringan atau Media Online Berupa Konter Opini atau Kontra Narasi atau Berita	36	GIAT	16.800.000
	Giat Patroli Siber	24		1.848.000
	Pelayanan Informasi Publik	146	GIAT	78.748.000
	Biaya Produksi	48	GIAT	80.265.000
	Pengadaan Barang Habis Pakai	8	GIAT	7.020.000
	Dukungan kemitraan dengan wartawan	12	GIAT	14.304.000
	Biaya Produk Infografi Edukasi Masyarakat	154	GIAT	147.068.000
	Biaya Pengolahan Media Sosial dalam Jaringan Polri Humas	129	GIAT	83.224.000
	Biaya Pengolahan Media Sosial dan Media Dalam Jaringan Polri	98	GIAT	52.700.000
	Honor Penerjemah Bahasa Isyarat	12	GIAT	6.000.000
	Cetak Kalender	2	GIAT	15.204.000
	Kegiatan Coffee Morning	72	GIAT	10.488.000
	Kegiatan Tatap Muka Admin Medsos (Influencer)	5	GIAT	1.000.000
	Kegiatan Konter Opini Berdasarkan Top Issue	12	GIAT	6.000.000
YB	Kegiatan 2 Prioritas Polri			
	Press Realease	8	GIAT	16.170.000
	Kemitraan Dengan Wartawan	8	GIAT	3.160.000
	Liputan	8	GIAT	1.200.000
	Rekaman	4	GIAT	800.000
	Publikasi di SKH	8	GIAT	1.200.000
	Kegiatan Humas	4	GIAT	1.700.000
3072	Pelayanan Kesehatan Polri			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
A	Pembayaran			
	Belanja Gaji dan Tunjangan Karyawan BLU	1	TAHUN	1.425.000.000
	Belanja Gaji dan Tunjangan Karyawan BLU (Gaji Ke-13)	1	TAHUN	126.000.000
	Belanja Gaji dan Tunjangan Karyawan BLU (Gaji Ke-14)	1	TAHUN	126.000.000
	Belanja Makan Karyawan BLU	47.450	OH	711.750.000
AJ	Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang			
	Jasa Pengiriman/Pengepakan Surat dan Barang Dinas FKTP Jajaran	50	KG	1.000.000

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
BA	Pendidikan Dan Latihan Non Polri			
	Pelatihan Manajemen Rumah Sakit	1	GIAT	40.000.000
	Pelatihan Tenaga Teknis Kesehatan	1	GIAT	35.460.000
BM	Kerohanian Dan Keagamaan			
	Bimbingan Rohani dan Jasmani	1	GIAT	30.000.000
H	Honorarium Medis, Paramedis Dan Non Medis			
	Jasa Medis Dan Paramedis Pelayanan BPJS FKTP Jajaran	1	TAHUN	1.742.400.000
	medis	1	TAHUN	7.100.000.000
	paramedis	1	TAHUN	4.562.433.000
	Honor Dewas	12	BULAN	120.000.000
	Honor Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa BLU dan RM	1	TAHUN	280.536.000
	Honor Bendahara Penerimaan BLU / APBN	12	BULAN	17.880.000
	Insentif Dokter	1	TAHUN	175.000.000
HR	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi			
	Pemasangan / Pengecekan Jaringan Internet, Intranet dan Alkom pada Polres Jajaran	1	TAHUN	27.000.000
HS	Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit			
	Biaya Internet (SIM-RS)	1	TAHUN	25.000.000
	Biaya Sewa IP Publik (SIM-RS)	1	TAHUN	50.000.000
	Biaya TV Berlangganan	1	TAHUN	55.100.000
	Biaya Sewa IP PUBLIK Astinet RM-E	1	TAHUN	78.000.000
JA	Bantuan Pelayanan Masyarakat			
	Belanja Bhakti Kesehatan	1	TAHUN	150.000.000
JF	Dukopsnal Satker			
	Dukops Satker	1	TAHUN	285.424.000
KA	Makan Pasien			
	Belanja Bahan Makan Pasien	1	TAHUN	1.550.000.000
KG	Rapat - Rapat Koordinasi / Kerja/Dinas/ Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi			
	Biaya Rapat Pokja Sun RBA TA.2026	1	GIAT	1.475.000
	Biaya Rapat Pokja Sun TOR/RAB TA.2026	1	GIAT	1.475.000
	Jaldis Rapat Penyusunan Pagu BPJS	3	GIAT	59.000.000
KH	Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu			
	Belanja biaya penerimaan tamu	1	TAHUN	50.000.000
KU	Pembinaan Sistem Dan Manajemen			
	Biaya Pemilihan Pegawai/ Karyawan dan Ruangan Teladan	1	GIAT	30.000.000
	Biaya Studi Banding BLU	1	GIAT	50.000.000
	Subsidi Pasien Dinas dan BPJS	1	GIAT	310.000.000

Belanja

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Belanja Biaya Audit Eksternal	1	GIAT	45.000.000
	Pengadaan Baju Olahraga Karyawan BLU	200	PAX	35.000.000
	Biaya Akreditasi Rumah Sakit	1	GIAT	50.000.000
	Belanja Fotocopy dan jilid	1	TAHUN	30.000.000
	Belanja Pembayaran iuran BPJS Karyawan BLU	1	TAHUN	90.000.000
	promotif preventif (vaksin hepatitis karyawan BLU)	175	TAHUN	28.000.000
IS	Pengembangan, Peningkatan Pengakuan Sistem Akreditasi, Sertifikasi Standar, PK Tingkat Bilateral, Regional, Internasional			
	Pendampingan Akreditasi FKTP	3	GIAT	45.000.000
	Kegiatan Survey Akreditasi FKTP Polri	4	GIAT	84.000.000
LE	Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan			
	Pembinaan Kesehatan Gigi/Kesehatan Kesemaptan Gigi dan Mulut (Dental Fitnes)			
	Pembinaan kesehatan gigi	100	ORANG	5.100.000
	Vaksinasi CA Cerviks	21	ORANG	68.670.000
	Vaksinasi Influenza	58	ORANG	19.778.000
	Kegiatan fogging	68	GIAT	74.800.000
	Pelayanan Kesehatan dengan Sarpras yang Lebih Tinggi Sesuai dengan Kondisi Pasien			
	Pelayanan Kesehatan dengan Sarpras lebih tinggi sesuai kondisi pasien	10	GIAT	1.000.000.000
	Pelayanan Kesehatan Kamtibmas			
	Keslap Rutin	356	GIAT	106.800.000
	Keslap Khusus	16	GIAT	19.200.000
	Pengamanan makanan VIP/VVIP	20	GIAT	32.000.000
	Geomedicine	1	GIAT	10.000.000
	Deteksi Dini Narkoba	301	ORG	60.200.000
	Pelayanan Kedokteran Forensik			
	Otopsi korban mati	3	ORG	7.500.000
	Pemeriksaan luar korban mati	5	ORG	3.825.000
	Gali kubur/Ekshumasi luar kota	2	ORG	9.550.000
	Olah TKP Aspek Medik Dalam Kota	3	ORG	2.700.000
	Rikkes Rutin Tahanan	1.614	ORG	32.280.000
	Pelayanan DVI			
	Pemeriksaan Anti Mortem dan Post Mortem pemeriksaan Jenazah	5	GIAT	2.500.000
	Pemeriksaan Anti Mortem dan Post Mortem pemulasaran Jenazah	5	GIAT	15.000.000
	Kantong Jenazah	5	BUAH	1.250.000
	Kegiatan Lembaga Kesehatan Kepolisian			
	Pelayanan Ident Gigi Dan Penyimpanan Database Odontogram bagi Anggota Polri Kelompok Masyarakat dgn Resiko Tinggi			
	Pembuatan Odontogram sederhana	200	ORG	10.000.000
	Dukungan Ops Giat Dokpol			
	Dukungan Kegiatan Pengambilan Sampel DNA	2	GIAT	650.000
	Dukungan Giat Bakti Kesehatan	1	GIAT	11.792.000

Dukungan

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Dukungan Giat Peningkatan Kemampuan Personil	1	GIAT	5.250.000
	Dukungan Jaldis Kegiatan Dokpol	2	GIAT	23.750.000
	Dukungan Ops BPJS FKTP	1	TAHUN	76.942.000
	Dukungan Operasional Fungsi Kepolisian	1	TAHUN	100.000.000
	Pelayanan Dokpol Rumkit			
	Kedokteran Forensik			
	Pembuatan Visum Et Repertum (VER)			
	Pemeriksaan Luar (Orang Hidup)	970	ORANG	291.000.000
	Pemeriksaan Luar Jenazah (Dalam Kota)	24	ORANG	12.000.000
	Pemeriksaan Dalam Jenazah/Otopsi (Dalam Kota)	12	ORANG	24.000.000
	Pelayanan Kesehatan Korban Kekerasan pada Wanita dan Anak yang tidak ditanggung oleh BPJS			
	Non KDRT Dewasa	9	ORANG	2.700.000
	Non KDRT Anak	9	ORANG	2.700.000
	KDRT Dewasa	8	ORANG	2.400.000
	KDRT Anak	8	ORANG	2.400.000
	Pelayanan Kesehatan Tahanan			
	Rawat Inap Tahanan dengan tindakan Operasi	2	ORANG	14.750.000
	Rawat Inap Tahanan Tanpa Tindakan Operasi	5	ORANG	14.325.000
	Rawat Jalan Tahanan	6	ORANG	3.000.000
	Pemeriksaan Kesehatan Rutin	200	ORANG	3.000.000
	Kesehatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			
	Deteksi Dini Narkoba	600	ORANG	108.000.000
	Geomedicine	1	GIAT	9.000.000
	Pelayanan Kesehatan Lapangan (Keslap)	50	GIAT	13.900.000
LF	Pemeriksaan Kesehatan			
	Administrasi Kegiatan			
	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	5	OP	6.350.000
	Pelayanan Kesehatan Kesamaptan Polri			
	Rikkes Berkala Intensif I	1.200	ORG	2.115.600.000
	Rikkes Berkala Intensif II	1.665	ORG	2.012.985.000
	Rikkes Berkala Intensif III	527	ORG	473.773.000
	Plano Test	239	ORG	7.170.000
	Rikkes Tambahan Plus	50	ORG	97.900.000
	Dukungan Jaldis Kegiatan Rikkes Berkala	1	GIAT	70.980.000
	Pelayanan Kesehatan Rumkit			
	Promotif Preventif			
	Vaksin Influenza	200	orang	60.000.000
	Kuratif dan Rehabilitatif			
	Penyakit/Kecelakaan Tanpa Tindakan Operasi	5	orang	21.480.000
	Penyakit/Kecelakaan dengan Tindakan mulai Operasi Ringan sampai Khusus	1	orang	21.376.000
	Penyakit Tertentu di Luar BPJS (Karena Tugas)			
	Pengobatan Pada Tugas Operasi Dalam Negeri	4	orang	21.200.000
	Ralan TK Lanjut/Orang/Kunjungan bagi Siswa Diktuk	18	orang	6.174.000

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Ranap Bagi Siswa Diktuk/Orang/Hari	8	ORANG	16.000.000
	Heat Stroke / Orang	2	ORANG	6.000.000
	Rehabilitasi Narkoba Bagi Personil Akibat Pelaksanaan Tugas di Bidang Narkoba			
	Evakuasi dan perawatan ke rehabilitasi sosial	2	ORANG	11.200.000
	Rawat Jalan/Assesmen/Tes Urine	2	ORANG	400.000
	Pelayanan Kesehatan Akibat Pelaksanaan Tugas Latihan Dan Operasi Polri			
	Pelayanan Kesehatan dengan sarana dan prasarana yang lebih tinggi sesuai kondisi pasien	2	ORANG	120.400.000
	Pembinaan Kesehatan Gigi Pegawai Negeri Pada Polri			
	Pembinaan Kesehatan Gigi	200	ORANG	10.000.000
	Dukungan Operasional Logistik			
	Obat Vitamin	1.000	ORANG	16.000.000
	Masker	250	ORANG	15.500.000
	Pelayanan Kesehatan Kesamaptaaan Polri			
	Rikkes Pra Nikah	30	ORANG	14.610.000
LG	Poliklinik/Obat-Obatan			
	Belanja Obat Pasien	1	TAHUN	4.529.515.000
	Pengadaan Obat dan BHP FKTP Jajaran	1		600.842.000
MV	Biaya Listrik			
	Biaya Listrik	1	TAHUN	1.011.114.000
MW	Biaya Air			
	Biaya air	1	TAHUN	20.000.000
MX	Biaya Telepon			
	Biaya Pulsa Dan Telepon	1	TAHUN	40.000.000
OC	Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor (Polda)			
	Belanja Gas Medik	1	TAHUN	130.000.000
	Belanja Gas LPG	1	TAHUN	75.000.000
	Pengadaan Barang Campuran Layanan	1	TAHUN	370.000.000
	Pengadaan Barang Campuran Umum dan Administrasi	1	TAHUN	300.000.000
	Belanja Limbah Medis Rumkit	1	TAHUN	500.000.000
	Belanja KSO	1	TAHUN	450.000.000
	Belanja Barang dan Jasa Lain-Lain	1	TAHUN	100.000.000
	Belanja Reagen Laboratorium	1	TAHUN	122.000.000
	Belanja Sewa Alat Urologi	1	TAHUN	300.000.000
	Belanja Sewa Alat Mata	1	TAHUN	130.000.000
	Belanja BHP Pasien	1	TAHUN	4.715.385.000
	Belanja Barang Cetak Kantor BLU	1	TAHUN	697.453.000
	Belanja Pengadaan ATK BLU	1	TAHUN	50.000.000
	Belanja Radiologi (Film X - Ray Chemistri).	1	TAHUN	195.000.000

133 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri			
001	Gaji dan Tunjangan			
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
	Gaji Dan Tunjangan	1	TAHUN	453.479.405.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
MX	Biaya Telepon			
	Biaya Telepon	1	TAHUN	626.030.000
MY	Internet			
	Biaya Internet	1	TAHUN	4.365.140.000
OC	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor (Polda)			
	ATK Rutin Satker	1	TAHUN	925.381.000
OD	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor (Polres)			
	ATK Rutin Polres	1	TAHUN	1.410.560.000
OE	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor (Polsek)			
	Honor Pejabat Pembuat Komitmen	1	OG	1.000.000
	Honor Pejabat Pengadaan	1	OG	680.000
	Administrasi Pengadaan	1	OG	320.000
	ATK Polsek	1	TAHUN	1.093.920.000
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
AF	Penyusunan Naskah Buku Lainnya			
	Kegiatan Penyusunan Laporan Semester I	4	GIAT	5.160.000
	Kegiatan Penyusunan Laporan Semester II / Tutup Buku	3	GIAT	5.900.000
	Sun Laporan Satuan Wasrik Itwasum	1	GIAT	6.000.000
	Sun Laporan Kesatuan Polda Sultra	1	GIAT	6.000.000
AJ	Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang			
	Pengiriman dokumen	2.336	KG	63.715.000
AQ	Studi Kelayakan			
	Kegiatan Study Kelayakan Usulan Pembangunan	1	GIAT	42.375.000
BI	Peningkatan Kemampuan Personel Satker			
	Kemampuan PID Satker	4	GIAT	77.284.000
BN	Biaya Pemakaman			
	Perawatan dan pemakaman jenazah	5	ORANG	18.000.000
D	Honorarium SAI/SAKPA/Simak/Smap/ Pengelola Keuangan			
	Honor Operator Pengurus/penyimpan BMN	288	OB	56.400.000
	Honor Operator Aplikasi GPP Polri dan Tunkin	12	OB	1.800.000

Honor

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Honor Operator SAI/Sakti Pembayaran	228	OB	46.700.000
	Honor Operator E-Monev	12	OB	3.600.000
	Penanggung Jawab Kegiatan	12	OB	3.600.000
	Staf Kegiatan Polda	12	OB	3.600.000
	Staf Kegiatan Satker	264	OB	75.600.000
	Honor Operator Sirena			
	Penanggung Jawab Kegiatan	12	OB	3.600.000
	Staf Kegiatan Polda	24	OB	7.200.000
	Staf Kegiatan Satker	252	OB	75.600.000
	Honor Pengelola Keuangan Satker			
	Honor KPA	48	OB	81.840.000
	Honor PPK	48	OB	74.760.000
	Honor PPSPM	60	OB	48.240.000
	Honor Bendahara	60	OB	44.760.000
	Honor Staf Bendahara	96	OB	46.080.000
	Honor Pengadaan Barang dan Jasa	33	OB	19.140.000
EW	Pembinaan Fungsi-Fungsi			
	Kegiatan Pembinaan Jasmani Personel Polda Sultra	1	TAHUN	103.680.000
	Pelatihan Keperawatan	1	GIAT	11.244.000
	Kegiatan Anev Tahunan	1	GIAT	19.500.000
FX	Jasa Keamanan / Kebersihan			
	Biaya Jasa Cleaning Service	120	OB	91.200.000
HI	Penerbitan Majalah/Jurnal			
	Cetakan Majalah Bulanan	1.200	EKSAMPLAR	156.000.000
HJ	Menyelenggarakan Humas			
	Pendistribusian Majalah di Satuan Kewilayahan	45	GIAT	9.000.000
	Cetak Kalender	300	EKSAMPLAR	15.600.000
	Produksi Film Ilm Publikasi Polri di Media Online Internal dan Eksternal	6	GIAT	74.100.000
	Layanan Langganan Internet Service Provider	26	LOT	66.096.000
	Penggalangan Masyarakat	12	GIAT	7.200.000
	Penggalangan Media	12	GIAT	20.400.000
	Produk Media Kerjasama	12	GIAT	360.000.000
	Crue Media Online :	12	GIAT	14.500.000
	Pembinaan Fungsi/Coffe Morning Bersama Wartawan (Subbid Penmas)	11	GIAT	174.570.000
	Menerima Kunjungan Media	1	GIAT	2.400.000
	Penandatanganan Kerjasama / MoU Bersama Media	13	GIAT	5.491.000
	Sarana Kontak Polres	13	GIAT	54.800.000
	Giat Humas Polres	12	GIAT	38.605.000
	Pemasangan Jaringan Telepon dan Instalasi	1	GIAT	145.000
HK	Supervisi			
	Supervisi	3	GIAT	80.633.000

HL Penyelenggaraan

135 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
 NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
 TANGGAL: 28 JUNI 2024

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
HL	Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan			
	Kegiatan Penerangan Masyarakat dan Pelayanan Informasi Publik	1	GIAT	41.959.000
HQ	Pemeliharaan dan Peremajaan Website			
	Pembuatan Website Bidhumas	1	GIAT	2.900.000
IN	Pengawasan Dan Pembinaan			
	Kegiatan Pembinaan Fungsi Satker	2.484	OH	49.680.000
JF	Dukopsnal Satker			
	Dukopsnal Satker	1	TAHUN	1.739.444.000
JW	ULP Non Organik/Jaga Fungsi			
	Piket Jaga	8.036	OH	506.268.000
KG	Rapat-Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/ Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29	GIAT	4.091.228.000
KI	Sosialisasi			
	Giat Sosialisasi	1	GIAT	12.875.000
KN	Evaluasi/Laporan Kegiatan AKIP			
	Kegiatan Evaluasi AKIP	1	GIAT	48.131.000
KP	Penyusunan Program Dan Rencana Kerja/Teknis/Program			
	Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Satker	20	GIAT	28.068.000
	Kegiatan Penyusunan Renja Satker	20	GIAT	27.826.000
	Giat Penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029	3	GIAT	2.250.000
	Kegiatan Bidang Perencanaan T.A 2025	3	GIAT	5.595.000
KQ	Penyusunan Program, Anggaran dan Rencana Kerja			
	Kegiatan Sun Laporan Triwulan (Anev Anggaran dan Renaksi)	4	GIAT	784.000
	Kegiatan Penyusunan Rengiat dan Rendisgar Satker	2	GIAT	2.100.000
KR	Penyusunan RKA-KL dan DIPA			
	Kegiatan Penyusunan Kebutuhan Anggaran	8	GIAT	8.200.000
	Kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif	6	GIAT	4.600.000
	Kegiatan Penyusunan Pagu Anggaran	4	GIAT	3.300.000
	Kegiatan Penyusunan Alokasi Anggaran	2	GIAT	1.250.000
	Kegiatan Penyusunan Rengiat dan Rendisgar	2	GIAT	1.254.000
	Kegiatan Penyusunan Pagu Minus Belanja Pegawai	2	GIAT	640.000
	Giat Penyusunan Revisi Pagu Anggaran	4	GIAT	2.000.000
	Giat Penyusunan RPD	2	GIAT	1.250.000
	Penyusunan TOR dan RAB Anggaran	3	GIAT	4.501.000
	Penyusunan Renkasi	1	GIAT	2.050.000

KT Kegiatan

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
KT	Kegiatan Musrenbang			
	ATK Giat Musrenbang	1	GIAT	29.210.000
	Kegiatan Musrenbang	1	GIAT	139.914.000
M	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan			
	Kegiatan penyusunan laporan keuangan	2	GIAT	1.220.000
Y	Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang			
	Pengepakkan atau Pengiriman Barang	25	KG	500.000
3088	Pertanggungjawaban Profesi			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
FK	Menyelenggarakan Pengaturan, Pengawasan Dan Patroli			
	Patroli Provos	1.410	OH	81.699.000
HX	Supervisi			
	Supervisi	3	GIAT	90.000.000
IM	Penegakkan Hukum Anggota/PNS Polri (Sidang Disiplin/ Kode Etik)			
	Subbid Provos			
	Biaya Pemeriksaan Pemberkasan Gar Disiplin	1	PERKARA	134.700.000
	Subbid Wabprof			
	Kegiatan Pemeriksaan Pemberkasan Gar KEPP	1	PERKARA	153.483.000
	Kegiatan Sidang KEPP	27	PERKARA	88.857.000
	Kegiatan Penyusunan Laporan Akreditasi	2	GIAT	3.744.000
	Kegiatan Audit Investigasi	2	GIAT	7.420.000
	Gelar Perkara KKE	5	GIAT	2.500.000
JB	Sentra Pelayanan Kepolisian			
	Kegiatan Pelayanan Pengaduan			
	Giat Pelayanan Pengaduan Masyarakat	20	GIAT	20.000.000
	Kegiatan Rehabilitasi			
	Giat Rehabilitasi Personel	20	GIAT	20.000.000
KI	Sosialisasi			
	Giat Sosialisasi Pengawasan dan Pembinaan Etika Profesi Polri	2	GIAT	63.510.000
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
EU	Pembinaan Pengamanan Polri			
	Biaya Penyelidikan Paminal			
	Penyelidikan Paminal di Wilayah	140	PERKARA	273.804.000
	Kegiatan Penelitian Personel			
	Penelitian Personel	10	GIAT	10.330.000

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
FJ	Menyelenggarakan Pengamanan Kepolisian			
	Kegiatan Penyelidikan Paminal	48	GIAT	38.068.000
	Kegiatan Penelitian Personil	4	GIAT	10.955.000
HX	Supervisi			
	Giat Supervisi Subbidpaminal di Kewilayahan	1	GIAT	30.000.000
HI	Pengawasan dan Pembinaan			
	Biaya Penyelidikan Paminal di Tingkat Kewilayahan	15	GIAT	19.608.000
IN	Pengawasan dan Pembinaan			
	Biaya Lidik Paminal Tingkat Kewilayahan	29	GIAT	39.218.000
3090	Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
IL	Sidang Disiplin			
	Pelaksanaan Sidang Disiplin	98	PERKARA	137.169.000
	Biaya Pemeriksaan sampai dengan Pemberkasan	75	PERKARA	71.087.000
	Biaya Visum Perkara Sipropam	2	PERKARA	325.000
	Biaya Sidang KKEPP	3	GIAT	12.726.000
IM	Penegakkan Hukum Anggota / PNS Polri (Sidang Disiplin/Kode Etik)			
	Biaya Pemeriksaan sampai dengan Pemberkasan Polres Bau Bau	10	PERKARA	5.708.000
	Sidang Disiplin Polres	4	GIAT	11.600.000
	Sidang Komisi Kode Etik Polres	8	GIAT	16.200.000
	Pemeriksaan Tata Tertib dan Disiplin Polres	4	GIAT	1.432.000
IQ	Kegiatan Pembinaan Provos			
	Gaktibplin	372	GIAT	21.407.000
3091	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
BO	Kegiatan Pembinaan			
	Kegiatan Pengawasan Lainnya	8	GIAT	309.600.000
	Kegiatan Pembinaan Teknis Fungsi Pengawasan	1	GIAT	41.040.000
	Kegiatan Validasi LHKPN	1	GIAT	15.200.000
HX	Supervisi			
	Supervisi	1	GIAT	200.276.000
HY	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan			
	Biaya Supervisi Siwas	25	GIAT	86.771.000
	Biaya Verifikasi Siwas	22	GIAT	32.375.000
	Biaya Klarifikasi Siwas	2	GIAT	8.656.000

Biaya

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Biaya Rapat Siwas	41	GIAT	44.453.000
	Giat Monev Kinerja Siwas Tingkat Polda	75	GIAT	157.203.000
	Giat Asistensi Siwas ke Polsek	5	GIAT	29.401.000
	Biaya Kegiatan Pra Audit Kinerja	6	GIAT	1.996.000
	Giat Pelatihan Fungsi Pengawasan di Polda Sultra	1	GIAT	4.690.000
	Giat Pengimputan LHKPN di Polda Sultra	1	GIAT	4.690.000
	Dukungan Giat Monev Fungsi Pengawasan	14	GIAT	8.068.000
	Biaya Kegiatan Pengiriman Data Temuan Audit Kinerja di Polda	3	GIAT	3.480.000
HZ	Penyelenggaraan Audit Kinerja			
	Pelaksanaan audit kinerja I dan II	1	GIAT	439.270.000
IA	Penyelenggaraan Pengawasan Pemeriksaan Khusus			
	Kegiatan Wasrik Khusus	1	GIAT	19.681.000
ID	Penyelenggaraan Pengawasan Operasi Kepolisian			
	Kegiatan Pengawasan Operasi Kepolisian	1	GIAT	413.285.000
IE	Penyelenggaraan Verifikasi			
	Kegiatan Verifikasi	1	GIAT	58.460.000
IF	Penyelenggaraan Reviu/Validasi/Revaluasi			
	Kegiatan Reviu	1	GIAT	23.400.000
IG	Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat			
	Pelaksanaan Kegiatan Dumasas	10	GIAT	120.000.000
YA	Kegiatan 1 Prioritas Polri			
	Pelaksanaan kegiatan prioritas Polri	12	GIAT	201.690.000
3149	Pengelolaan Multimedia			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
HM	Biro Multimedia			
	Coffe Morning Bersama Multimedia	4	GIAT	25.489.000
3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
FZ	Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara/Penyelesaian Perkara Hukum			
	Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Perdata Terhadap Anggota/PNS Polri	5	GIAT	34.600.000
	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana terhadap Anggota/PNS Polri	20	GIAT	29.380.000
	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Praperadilan Terhadap Anggota sebanyak 13 Perkara	13	GIAT	235.690.000
	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri sebanyak 50 Perkara	50	GIAT	48.000.000
	Bantuan dan Nasehat Hukum PTUN	1	GIAT	21.530.000

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
GA	Penyuluhan Hukum			
	Penyuluhan Hukum Tingkat Polda	1	GIAT	6.110.000
	Penyuluhan Hukum Satker Polres Jajaran	1	GIAT	97.830.000
	Penyuluhan Hukum Tingkat Polres	19	GIAT	12.260.000
HX	Supervisi			
	Supervisi Hukum	1	GIAT	63.600.000
3155	Kerjasama dan Penyuluhan Hukum			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
AE	Pengadaan Buku Lainnya			
	Buku Saku	846	BUKU	31.400.000
FY	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan			
	Rapat Penyusunan SOP	43	GIAT	60.032.000
FZ	Bantuan Hukum Saksi Penterjemah Biaya Pengacara Penyelesaian Perkara Hukum			
	Bantuan Peraturan Perundang-undangan atau Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat	1	GIAT	18.333.000
GA	Penyuluhan Hukum			
	Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Personel Polsek Jajaran	53	GIAT	36.666.000
GD	Penerapan Hukum			
	Rapat Pembahasan Perkara	12	GIAT	18.570.000
	Penerapan hukum sasaran masyarakat	24	GIAT	18.333.000
	Sosialisasi Peraturan Hukum Kepada Anggota Polri	13	GIAT	36.666.000
4339	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Polri			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
KS	Penyusunan Evaluasi LKIP			
	Penyusunan LKIP Satker	22	GIAT	31.942.000
	Kegiatan Penyusunan LKIP Polda Sultra	1	GIAT	15.400.000
	Anev Kinerja Anggaran	4	GIAT	6.500.000
KV	Penyusunan Perjanjian Kinerja			
	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Ren Aksi Satker	23	GIAT	31.171.000
	Kegiatan Evaluasi Berkala Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Polda Sultra	4	GIAT	82.160.000
	Penyusunan Rendisgar dan Rengiat Subsatker	1	GIAT	1.800.000
5051	Penyusunan Kebijakan Polri			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
KQ	Penyusunan Program Anggaran Dan Rencana Kerja			
	Dukungan Penyusunan Ranrenja Satke	1	GIAT	500.000

Dukungan

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Dukungan Penyusunan Renja Satker	1	GIAT	500.000
	Dukungan Penyusunan Ranrenja Polda Sultra	1	GIAT	23.516.000
	Dukungan Penyusunan Renja Polda Sultra	1	GIAT	23.356.000
	Dukungan Penyusunan Domren Kapolda Sultra	1	GIAT	3.128.000
5052	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
AQ	Study Kelayakan			
	Kegiatan Study Kelayakan Pembentukan Polsek/Polres	1	GIAT	91.053.000
KG	Rapat - Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja			
	Pengkajian Pembentukan Satwil	1	GIAT	70.000.000
KU	PEMBINAAN SISTEM DAN MANAJEMEN			
	Kegiatan Anev Penerapan Sistem Organisasi dan Manajemen	2	GIAT	20.065.000
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SIK3 dan SIABK	1	GIAT	50.000.000
5053	Reformasi Birokrasi Polri			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
KO	Pengkajian dan Analisis Reformasi Birokrasi			
	Pelaporan Giat RBP	2	GIAT	6.000.000
	Asistensi dan Monitoring Giat RBP	4	GIAT	171.500.000
	Sosialisasi	1	GIAT	44.301.000
	Penguatan pembangunan ZI Tingkat Polda Sultra	1	GIAT	74.168.000
	Penguatan pembangunan ZI Tingkat Polres jajaran	13	GIAT	264.291.000
	Meeting Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi Tingkat Polres Tahun 2025 dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2	GIAT	35.000.000
5054	Manajemen Anggaran			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
KN	Evaluasi/Laporan Kegiatan			
	Kegiatan Monev Anggaran	14	GIAT	48.784.000
	Supervisi Penyerapan Anggaran	1	GIAT	52.415.000
	Penyusunan Laporan Anev Anggaran T.A. 2025	22	GIAT	26.281.000
	Penyusunan Laporan Anev Kinerja T.A. 2025	4	GIAT	3.000.000
KR	Penyusunan RKA-KL dan DIPA			
	Penggandaan Buku Norma indeks 2026	1	GIAT	18.360.000

NO	PROGRAM/SUBKEGIATAN/KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Akomodasi sosialisasi DIPA dan tandatangan Perjanjian kinerja serta pakta integritas	1	GIAT	10.209.000
	Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi	1	GIAT	8.735.000
	Dukungan ATK Giat Sungar	3	GIAT	15.000.000
	Kegiatan Penyusunan Anggaran Poldasultra	1	GIAT	73.730.000
	Rapat Penyusunan Pagu Indikatif Poldasultra	1	GIAT	145.080.000
	Penyusunan Pagu Indikatif TK Polres	12	GIAT	12.859.000
	Penyusunan Pagu Anggaran TK Polres	13	GIAT	18.872.000
	Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TK Polres	11	GIAT	10.784.000
	Kegiatan Penyusunan Renbut Ideal Satker T.A 2026	2	GIAT	2.856.000
	Kegiatan Penyusunan RPD dan RKT Subsatker T.A 2025	2	GIAT	2.497.000
KU	Pembinaan Sistem dan Manajemen			
	Renja, Perjanjian Kinerja dan Ren Aksi Satker Tahun 2025	1	GIAT	1.652.000
5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi			
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			
HJ	Menyelenggarakan Humas			
	Peliputan dan Dokumentasi/Sosialisasi Pengemban PID Satker	10	GIAT	48.500.000

2. Pagu Indikatif Poldasultra T.A. 2025.

Perbandingan antara usulan kebutuhan anggaran T.A. 2025 dan Pagu Indikatif T.A. 2025 adalah sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	USULAN KEBUTUHAN T.A. 2025	PAGU INDIKATIF T.A. 2025	KET
1	PEGAWAI	642.873.592.000	672.763.706.000	Naik 4.65%
2	BARANG	450.741.513.000	344.153.506.000	Terpenuhi 76.35%
3	MODAL	143.123.092.000	2.900.000.000	Terpenuhi 2.03%
JUMLAH		1.236.738.197.000	1.019.817.212.000	Terpenuhi 82.46%

Adapun

Adapun pagu indikatif Polda Sultra TA. 2025 adalah sebagai berikut:

- a. program Profesionalisme SDM Polri dengan anggaran sebesar Rp. 28.826.638.000,- digunakan untuk kegiatan:
 - 1) dukungan manajemen profesionalisme SDM Polri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 27.677.038.000,-;
 - 2) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 621.600.000,-;
 - 3) pembinaan karier personel Polri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 290.000.000,-;
 - 4) pelayanan psikologi anggota Polri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 238.000.000,-.
- b. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan anggaran sebesar Rp. 45.157.450.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 74.294.322.000,- dan PNBP Rp. 863.128.000,- digunakan untuk kegiatan:
 - 1) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 33.787.948.000,-;
 - 2) penindakan tindak pidana umum dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 16.924.442.000,-;
 - 3) penindakan tindak pidana Narkoba dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 10.762.213.000,-;
 - 4) penindakan tindak pidana ekonomi khusus dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 524.060.000,-;
 - 5) penindakan tindak pidana korupsi dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 3.319.613.000,-;
 - 6) penindakan tindak pidana siber dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 1.135.817.000,-;
 - 7) penindakan tindak pidana perairan dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 336.617.000,-;
 - 8) penindakan tindak pidana Laka Lantas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 863.128.000,- (PNBP);
 - 9) pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 112.186.000,-;
 - 10) penindakan tindak pidana tertentu dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 668.270.000,-;
 - 11) pengawasan penyidikan dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 242.598.000,-.
- c. program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri dengan anggaran sebesar Rp. 108.657.024.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 89.508.940.000,-, PNBP Rp. 13.298.084.000,- dan BLU Rp. 5.850.000.000,- digunakan untuk:
 - 1) pengembangan peralatan Polri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.992.590.000,- terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 1.378.102.000,-, PNBP sebesar Rp. 492.590.000 dan BLU sebesar Rp. 1.500.000.000;

2) dukungan

- 2) dukungan manajemen dan teknis Sarpras dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 104.564.434.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 89.508.940.000,- dan PNBP Rp. 12.705.494.000,- serta BLU sebesar Rp. 2.350.000.000,-;
 - 3) pengembangan fasilitas dan kontruksi Polri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,-, terdiri dari BLU sebesar Rp. 200.000.000,- dan PNBP sebesar Rp. 100.000.000,-.
- d. program Pemeliharaan kemandirian dan ketertiban dengan anggaran sebesar Rp. 288.966.628.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 254.435.060.000,- dan PNBP Rp. 34.531.568.000,- digunakan untuk kegiatan:
- 1) analisis keamanan dengan alokasi anggaran sumber rupiah murni sebesar Rp. 2.562.286.000,-;
 - 2) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik dengan alokasi anggaran Rp. 4.470.308.000,- terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 4.242.372.000,- dan PNBP sebesar Rp. 227.936.000,-;
 - 3) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi dengan alokasi anggaran Rp. 3.928.760.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 3.719.526.000,- dan PNBP Rp. 209.234.000,-;
 - 4) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya dengan alokasi anggaran Rp. 4.197.144.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 3.969.208.000,- dan PNBP Rp. 227.936.000,-;
 - 5) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara dengan alokasi anggaran Rp. 5.338.383.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 5.122.119.000,- dan PNBP Rp. 216.214.000,-;
 - 6) kerjasama keamanan dan ketertiban, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.884.000,-;
 - 7) dukungan manajemen pemeliharaan Kamtibmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 187.230.055.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 184.830.912.000,- dan PNBP Rp. 2.399.143.000,-;
 - 8) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara dengan anggaran sebesar Rp. 8.031.313.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 653.260.000,- dan PNBP Rp. 7.378.053.000,-;
 - 9) penyelenggaraan pengamanan obyek vital dengan anggaran sebesar Rp. 16.392.375.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 1.452.470.000,- dan PNBP Rp. 14.939.905.000,-;
 - 10) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas anggaran sebesar Rp. 8.691.856.000,- (PNBP);
 - 11) penyelenggaraan kepolisian perairan dengan anggaran sebesar Rp. 174.962.000,- (PNBP);
 - 12) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus dengan alokasi anggaran Rp. 2.744.109.000,- (rupiah murni);
 - 13) pembinaan potensi keamanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.553.815.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 17.427.536.000,- dan PNBP Rp. 126.279.000,-;
 - 14) pembinaan

- 14) Pembinaan Operasi Kepolisian dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 18.317.211.000,-;
 - 15) pengendalian operasi kepolisian dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 8.310.273.000,-;
 - 16) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 255.500.000,-;
 - 17) penanggulangan keamanan dalam negeri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni Rp. 750.394.000,-.
- e. program dukungan manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 511.143.937.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 478.786.540.000,-, PNBK Rp. 2.197.944.000,- dan BLU sebesar Rp. 30.159.453.000,- digunakan untuk kegiatan:
- 1) pelayanan administrasi keuangan Polri dengan alokasi anggaran sebesar Rp 577.299.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 497.299.000,- dan PNBK Rp. 80.000.000,-;
 - 2) penerangan masyarakat dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 1.169.580.000,- bersumber dari rupiah murni;
 - 3) penyelenggaraan teknologi informasi dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 27.000.000,- bersumber dari rupiah murni;
 - 4) pelayanan kesehatan Polri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.405.265.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 7.279.868.000,-, PNBK sebesar Rp. 1.965.944.000,- dan BLU Rp. 30.159.453.000,-;
 - 5) dukungan pelayanan internal perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 464.142.837.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 464.070.837.000,- dan PNBK Rp. 72.000.000,-;
 - 6) pertanggungjawaban profesi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 665.913.000,- (rupiah murni);
 - 7) penyelenggaraan pengamanan internal Polri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.983.000,- (rupiah murni);
 - 8) penegakan tata tertib dan disiplin Polri dengan alokasi anggaran Rp. 277.654.000,- (rupiah murni);
 - 9) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan dengan alokasi anggaran Rp. 2.223.685.000,-(rupiah murni);
 - 10) pengelolaan multi media dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.489.000,- (rupiah murni);
 - 11) pemberian bantuan dan nasehat hukum, dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 549.000.000,- (rupiah murni);
 - 12) kerjasama penyuluhan hukum, dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 220.000.000,- (rupiah murni);
 - 13) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 231.118.000,- (rupiah murni);
 - 14) Reformasi Birokrasi Polri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 417.760.000,- (rupiah murni);

15) manajemen

145 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA
NOMOR : KEP/ 332 /VI/2024
TANGGAL: 28 JUNI 2024

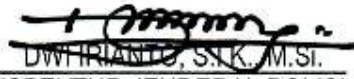
- 15) manajemen anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 740.854.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 660.854.000,- dan PNPB Rp 80.000.000,-;
- 16) pengelolaan informasi dan dokumensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.500.000,- (rupiah murni).

5. **PENUTUP**

Demikian rencana kerja Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara T.A. 2025 disusun sebagai bahan masukan/pedoman Satker di lingkungan Polda Sultra dalam menjalankan kegiatan operasional dan pembinaan untuk melayani masyarakat di bidang Harkamtibmas dan penegakan hukum T.A. 2025.

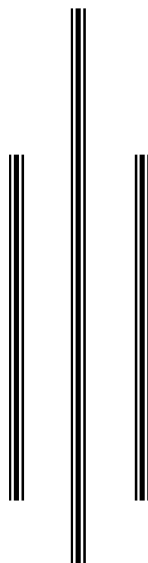
Ditetapkan di: Kendari
pada tanggal: 28 Juni 2024

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA


DWIHIRIANTO, S.T.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



RENCANA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2025



DAFTAR ISI

	Halaman
I	LATAR BELAKANG
	1. Kondisi Umum 1
	a. Perkembangan Aspek Kehidupan Daerah 2
	b. Analisis SWOT 28
	2. Identifikasi Masalah 44
II	TUJUAN dan SASARAN
	1. Visi dan Misi 45
	2. Tujuan Jangka Menengah
	a. Tujuan Jangka Menengah Polri 45
	b. Tujuan Jangka Menengah Polda Sultra 45
	3. Sasaran Prioritas
	a. sasaran prioritas Polri tahun 2025 46
	b. sasaran prioritas Polda Sultra tahun 2025. 46
III	ARAH KEBIJAKAN
	1. Kebijakan Polri tahun 2025 46
	2. Kebijakan Polda Sultra Tahun 2025 66
IV	PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF
	1. Program dan Kegiatan Polda Sultra T.A. 2025 82
	2. Pagu Indikatif Polda Sultra T.A. 2025 141
V	PENUTUP
	Penutup 145
Lampiran-Lampiran	
-	RENCANA KERJA TAHUNAN
-	FORM APLIKASI RENJA KL